



LAPORAN KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK

TA 2019
(Audited)



#Profesional #Integritas #Amanah

2019

BADAN PUSAT STATISTIK

**Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2019**

Jl. Dr. Sutomo No 6 - 8
Jakarta - 10710

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pusat Statistik adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pusat Statistik. Disamping itu Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 20 April 2020
Kepala Badan Pusat Statistik,



Suhariyanto
Suhariyanto

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Indeks Tabel	vii
Indeks Grafik	x
Indeks Singkatan	xi
Indeks CaLK LRA	xii
Indeks CaLK Neraca	xiii
Indeks CaLK LO	xiv
Indeks CaLK LPE	xv
Indeks CaLK Catatan Penting Lainnya	xvi
Pernyataan Tanggung Jawab	xvii
I. Ringkasan	1
II. Laporan Realisasi Anggaran	4
III. Neraca	5
IV. Laporan Operasional	6
V. Laporan Perubahan Ekuitas	7
VI. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
A.1 Dasar Hukum	8
A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pusat Statistik	10
A.3 Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual	15
A.4 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	15
A.5 Basis Akuntansi	18
A.6 Dasar Pengukuran	18
A.7 Kebijakan Akuntansi	18
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	24
B.1 Pendapatan Negara dan Hibah	27
B.1.1 Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	30
B.1.2 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	31
B.1.3 Pendapatan Jasa Lainnya	33
B.1.4 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	33
B.1.5 Pendapatan Denda	34
B.1.6 Pendapatan Lain-lain	35
B.2 Belanja	37
B.2.1 Belanja Pegawai	44
B.2.2 Belanja Barang	46
B.2.3 Belanja Modal	51
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	58
C.1 Aset	58

C.1.1	Aset Lancar	58
C.1.1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	58
C.1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	60
C.1.1.3	Kas Lainnya dan Setara Kas	60
C.1.1.4	Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	61
C.1.1.5	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	63
C.1.1.6	Piutang Bukan Pajak	63
C.1.1.7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	66
C.1.1.8	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	67
C.1.1.9	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Bagian Lancar Tagihan Tp/TGR	68
C.1.1.10	Persediaan	69
C.1.2	Aset Tetap	70
C.1.2.1	Tanah	71
C.1.2.2	Peralatan dan Mesin	73
C.1.2.3	Gedung dan Bangunan	74
C.1.2.4	Aset Tetap Lainnya	77
C.1.2.5	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	78
C.1.2.6	Akumulasi Penyusutan	80
C.1.3	Piutang Jangka Panjang	81
C.1.3.1	Tagihan TP/TGR	81
C.1.3.2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Tagihan TP/TGR	81
C.1.4	Aset Lainnya	82
C.1.4.1	Aset Tak Berwujud	82
C.1.4.2	Aset Lain-lain	83
C.1.4.3	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	84
C.2	Kewajiban	85
C.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	85
C.2.1.1	Utang Pada Pihak Ketiga	86
C.2.1.2	Hibah Yang Belum Disahkan	88
C.2.1.3	Pendapatan Yang Diterima Dimuka	89
C.2.1.4	Uang Muka Dari KPPN	90
C.2.1.5	Utang Jangka Pendek Lainnya	90
C.3	Ekuitas	91
C.3.1	Ekuitas	91
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	92
D.1	Pendapatan Operasional	92
D.1.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	92
D.1.1.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	92
D.2	Beban Operasional	93
D.2.1	Beban Pegawai	93
D.2.2	Beban Persediaan	95
D.2.3	Beban Barang dan Jasa	96
D.2.4	Beban Pemeliharaan	99

D.2.5	Beban Perjalanan Dinas	100
D.2.6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	101
D.2.7	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	103
D.3	Pendapatan dan Beban Non Operasional	103
D.3.1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	103
D.3.2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	104
D.4	Pendapatan dan Beban Non Operasional Lainnya	105
D.4.1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	105
D.4.2	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	106
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	108
E.1	Ekuitas Awal	108
E.2	Surplus (Defisit) LO	108
E.3	Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	108
E.3.1	Koreksi Nilai Persediaan	108
E.3.2	Koreksi Atas Reklasifikasi	109
E.3.3	Koreksi Selisih Revaluasi Aset	110
E.3.4	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	111
E.3.5	Koreksi Lain-Lain	113
E.4	Transaksi Antar Entitas	113
E.4.1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	114
E.4.2	Transfer Masuk/Transfer keluar	114
E.4.3	Pengesahan Hibah Langsung	115
E.4.4	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	116
E.4.5	Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	116
E.5	Ekuitas Akhir	116
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	117
F.1	Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	117
F.2	Revisi DIPA	117
F.3	Rekening BPS	119
F.4	Kerja Sama BPS	120
F.5	Paket Pengadaan Belanja Modal dan Belanja Barang yang Diselesaikan dengan Mekanisme Penyelesaian Belanja Akhir Tahun	132
F.6	Pengungkapan Lain-lain	136

INDEKS TABEL

	Halaman
1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran	1
2. Ringkasan Neraca	2
3. Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA	16
4. Rincian Jumlah Satker UAKPA	16
5. Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPB	17
6. Penggolongan Kualitas Piutang	20
7. Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap	21
8. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	22
9. Perubahan Estimasi Pendapatan dan Pagu Belanja	25
10. Perubahan Pagu Belanja Berdasarkan Program	26
11. Perubahan Pagu Belanja Berdasarkan Sumber Dana	26
12. Rincian Estimasi dan Realisasi Penerimaan PNB	27
13. Perbandingan Realisasi Penerimaan PNB Tahun Anggaran 2019 dan 2018	29
14. Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Program Tahun Anggaran 2019	37
15. Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana Tahun Anggaran 2019	38
16. Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana Tahun Anggaran 2019 dan 2018	41
17. Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2019	42
18. Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019 dan 2018	43
19. Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019	44
20. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 dan 2018	45
21. Pagu dan Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2019	46
22. Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2019 dan 2018	47
23. Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019	51
24. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 dan 2018	51
25. Realisasi Belanja Modal Tanah Berdasarkan Lokasi dan Peruntukannya Tahun Anggaran 2019	52
26. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2019 dan 2018	52
27. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2019 dan 2018	54
28. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2019 dan 2018	56
29. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun Anggaran 2019 dan 2018	57
30. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	58

31.	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Wilayah/Satker	59
32.	Rincian Jenis Kas di Bendahara Pengeluaran	59
33.	Rincian Setoran Kas di Bendahara Pengeluaran	59
34.	Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Per Wilayah/Satker	60
35.	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per Wilayah/Satker	60
36.	Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Per Wilayah/Satker	62
37.	Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Per Wilayah/Satker	63
38.	Rincian Piutang Bukan Pajak Per Wilayah/Satker	64
39.	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Per Wilayah/Satker	66
40.	Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per Wilayah/Satker	68
41.	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per Wilayah/Satker	69
42.	Rincian Persediaan	69
43.	Rincian Persediaan Per Wilayah/Satker	69
44.	Rincian Aset Tetap	70
45.	Perbandingan Aset Tetap antara Neraca dan Laporan BMN Per 31 Desember 2019	71
46.	Rincian Aset Tetap Lainnya	77
47.	Kondisi KDP	79
48.	Rincian KDP Per Wilayah/Satker	79
49.	Rincian Nilai Buku Aset Tetap	80
50.	Perbandingan Akumulasi Penyusutan antara Neraca dan Laporan BMN Per 31 Desember 2019	80
51.	Rincian Tagihan TP/TGR Per Wilayah/Satker	81
52.	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR Per Wilayah/Satker	82
53.	Rincian Aset Lainnya	82
54.	Rincian Nilai Buku Aset Lainnya	84
55.	Rincian Kewajiban Jangka Pendek	85
56.	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga	86
57.	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Berupa Belanja Yang Masih Harus Dibayar Per Wilayah/Satker	88
58.	Rincian Hibah Yang Belum Disahkan Per Wilayah/Satker	89
59.	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per Wilayah/Satker	89
60.	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per Wilayah/Satker	90
61.	Rincian PNBP Lainnya 31 Desember 2019 dan 2018	92
62.	Perbandingan PNBP Lainnya LO dan LRA 31 Desember 2019	92

63.	Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2019 dan 2018	94
64.	Perbandingan Beban Pegawai LO dan LRA 31 Desember 2019	94
65.	Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2019 dan 2018	95
66.	Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2019 dan 2018	96
67.	Perbandingan Beban Barang dan Jasa LO dan LRA 31 Desember 2019	97
68.	Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2019 dan 2018	99
69.	Perbandingan Beban Pemeliharaan LO dan LRA 31 Desember 2019	99
70.	Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2019 dan 2018	100
71.	Perbandingan Beban Perjalanan Dinas LO dan LRA 31 Desember 2019	100
72.	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2019 dan 2018	102
73.	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2019 dan 2018	103
74.	Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 31 Desember 2019 dan 2018	103
75.	Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar LO dan LRA 31 Desember 2019	104
76.	Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar 31 Desember 2019 dan 2018	104
77.	Rincian Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2019 dan 2018	105
78.	Perbandingan Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya LO dan LRA 31 Desember 2019	105
79.	Rincian Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2019 dan 2018	106
80.	Rincian Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	108
81.	Rincian Saldo Transaksi Antar Entitas	113
82.	Rincian Diterima dari Entitas Lain dan Ditagihkan ke Entitas Lain	114
83.	Rincian Transfer Masuk dan Transfer Keluar	114
84.	Rincian Pengesahan Hibah Langsung	115
85.	Rincian Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	116
86.	Rincian Pengesahan Hibah Langsung TAYL	116
87.	Rekapitulasi Jenis Kerja Sama BPS	120
88.	Anggaran dan Realisasi Kerja Sama Swakelola Tipe I Tahun 2019	122
89.	Anggaran dan Realisasi Kerja Sama Swakelola Tipe II Tahun 2019	122
90.	Anggaran dan Realisasi Kerja Sama Hibah Tahun 2019	124
91.	Kerja sama Hibah Menurut Jenisnya Tahun 2019	125
92.	Rincian SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS dan Sisa Dana HLLN Tahun 2019	127
93.	Rincian Hibah dari Pemerintah Daerah ke BPS	130
94.	Rincian Hibah dari BPS ke Pemerintah Daerah	131
95.	Rekapitulasi Pengadaan Belanja Modal dan Belanja Barang dengan Menggunakan Garansi Bank	133

INDEKS GRAFIK

	Halaman
1 Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2019 dan 2018	29
2 Perbandingan Realisasi PNBPN Tahun Anggaran 2019 dan 2018	30
3 Komposisi Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2019	43

INDEKS SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	:	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAIBA	:	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua
SAK	:	Sistem Akuntansi Keuangan
SIMAK BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
KUN	:	Kas Umum Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
TP	:	Tuntutan Perbendaharaan
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
KDP	:	Konstruksi Dalam Pengerjaan
UP	:	Uang Persediaan
SSBP	:	Surat Setoran Bukan Pajak
SATKER	:	Satuan Kerja
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
PPAKP	:	Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RENSTRA	:	Rencana Strategis

INDEKS CaLK LRA

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN			Halaman
Pendapatan Negara dan Hibah			
Catatan	B.1	Pendapatan Negara dan Hibah	27
Catatan	B.1.1	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	30
	B.1.2	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	31
	B.1.3	Pendapatan Jasa Lainnya	33
	B.1.4	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	33
	B.1.5	Pendapatan Denda	34
	B.1.6	Pendapatan Lain-lain	35
Belanja Negara			
Catatan	B.2	Belanja Negara	37
Catatan	B.2.1	Belanja Pegawai	44
Catatan	B.2.2	Belanja Barang	46
Catatan	B.2.3	Belanja Modal	51
Catatan	B.2.3.1	Belanja Modal Tanah	52
Catatan	B.2.3.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53
Catatan	B.2.3.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54
Catatan	B.2.3.4	Belanja Modal Lainnya	57

INDEKS CALK NERACA

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA			Halaman
	C.1	ASET	58
	C.1.1	Aset Lancar	58
Catatan	C.1.1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	58
Catatan	C.1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	60
Catatan	C.1.1.3	Kas Lainnya dan Setara Kas	60
Catatan	C.1.1.4	Belanja dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	61
Catatan	C.1.1.5	Pendapatan yang masih Harus Diterima	63
Catatan	C.1.1.6	Piutang Bukan Pajak	63
Catatan	C.1.1.7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	66
Catatan	C.1.1.8	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	67
Catatan	C.1.1.9	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	68
Catatan	C.1.1.10	Persediaan	69
	C.1.2	Aset Tetap	70
Catatan	C.1.2.1	Tanah	71
Catatan	C.1.2.2	Peralatan dan Mesin	73
Catatan	C.1.2.3	Gedung dan Bangunan	74
Catatan	C.1.2.4	Aset Tetap Lainnya	77
Catatan	C.1.2.5	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	78
Catatan	C.1.2.6	Akumulasi Penyusutan	80
	C.1.3	Piutang Jangka Panjang	81
Catatan	C.1.3.1	Tagihan TP / TGR	81
Catatan	C.1.3.2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR	81
	C.1.4	Aset Lainnya	82
Catatan	C.1.4.1	Aset Tak berwujud	82
Catatan	C.1.4.2	Aset Lain-lain	83
Catatan	C.1.4.3	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset lainnya	84
	C.2	Kewajiban	85
	C.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	85
Catatan	C.2.1.1	Utang Kepada Pihak Ketiga	86
Catatan	C.2.1.2	Hibah Yang Belum Disahkan	88
Catatan	C.2.1.3	Pendapatan Yang Diterima Dimuka	89
Catatan	C.2.1.4	Uang Muka dari KPPN	90
Catatan	C.2.1.5	Utang Jangka Pendek Lainnya	90
	C.3	Ekuitas	91
	C.3.1	Ekuitas	91

INDEKS CaLK LO

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL			Halaman
Pendapatan Negara dan Hibah			
Catatan	D.1	Pendapatan Operasional	92
Catatan	D.1.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	92
	D.1.1.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	92
	D.2	Beban Operasional	93
	D.2.1	Beban Pegawai	93
	D.2.2	Beban Persediaan	95
	D.2.3	Beban Barang dan Jasa	96
	D.2.4	Beban Pemeliharaan	99
	D.2.5	Beban Perjalanan Dinas	100
	D.2.6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	101
	D.2.7	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	103
	D.3	Pendapatan dan Beban Non Operasional	103
	D.3.1	Pendapatan Pelepasan Aset Non lancar	103
	D.3.2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	104
	D.4	Pendapatan dan Beban Non Operasional Lainnya	105
	D.4.1	Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	105
	D.4.2	Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	106

INDEKS CaLK LPE

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			Halaman
Catatan	E.1	Ekuitas Awal	108
Catatan	E.2	Surplus (Defisit) LO	108
	E.3	Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	108
	E.3.1	Koreksi Nilai Persediaan	108
	E.3.2	Koreksi Atas Reklasifikasi	109
	E.3.3	Selisih Revaluasi Aset	110
	E.3.4	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	111
	E.3.5	Koreksi Lain-lain	113
	E.4	Transaksi Antar Entitas	113
	E.4.1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	114
	E.4.2	Transfer Masuk/Transfer Keluar	114
	E.4.3	Pengesahan Hibah Langsung	115
	E.4.4	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	116
	E.4.5	Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	116
	E.5	Ekuitas Akhir	116

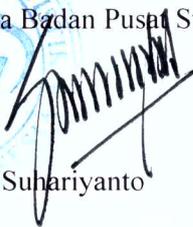
INDEKS CALK CATATAN PENTING LAINNYA

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA			Halaman
Catatan	F.1	Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	117
Catatan	F.2	Revisi DIPA	117
	F.3	Rekening BPS	119
	F.4	Kerja Sama BPS	120
	F.5	Paket Pengadaan Belanja Modal dan Belanja Barang yang Diselesaikan dengan Mekanisme Penyelesaian Belanja Akhir Tahun	132
	F.6	Pengungkapan Lain-lain	136

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 20 April 2020
Kepala Badan Pusat Statistik,

Suhariyanto

I. RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan 215/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp68.079.488.123 atau mencapai 154,50 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp44.064.328.000.

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.974.323.553.780 atau mencapai 94,80 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp5.247.071.532.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun Anggaran 2019 dan 2018 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Untuk Tahun Anggaran 2019 dan 2018

Uraian Sumber Dana	TA 2019			TA 2018
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan Negara	44.064.328.000	68.079.488.123	154,50	49.507.886.815
Belanja Negara	5.247.071.532.000	4.974.323.553.780	94,80	4.354.881.837.486

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada 31 Desember 2019 dan 2018.

Neraca yang disajikan adalah hasil proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp5.776.771.020.901 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp99.242.854.995, Aset Tetap (setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan) sebesar Rp5.363.479.942.127, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp833.164.388, dan Aset Lainnya (setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan) sebesar Rp313.215.059.391.

Nilai Kewajiban tersaji sebesar Rp82.079.287.015 yang seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu nilai Ekuitas adalah sebesar Rp5.694.691.733.886.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2019 dan 2018 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Ringkasan Neraca
Per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	31-Des-19 (Rp)	31-Des-18 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aset				
Aset Lancar	99.242.854.995	43.616.512.734	55.626.342.261	127,54
Aset Tetap	5.363.479.942.127	2.807.580.308.792	2.555.899.633.335	91,04
Piutang Jangka Panjang	833.164.388	257.414.308	575.750.080	223,67
Aset Lainnya	313.215.059.391	228.866.650.405	84.348.408.986	36,85
Jumlah Aset	5.776.771.020.901	3.080.320.886.239	2.696.450.134.662	87,54
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	82.079.287.015	133.409.030.272	(51.329.743.257)	(38,48)
Jumlah Kewajiban	82.079.287.015	133.409.030.272	(51.329.743.257)	(38,48)
Ekuitas				
Ekuitas	5.694.691.733.886	2.946.911.855.967	2.747.779.877.919	93,24
Jumlah Ekuitas	5.694.691.733.886	2.946.911.855.967	2.749.816.636.806	93,24
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	5.776.771.020.901	3.080.320.886.239	2.696.450.134.662	87,54

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp45.328.204.611, sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp4.609.420.126.179, sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp4.564.091.921.568. Kegiatan Non Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 mengalami surplus sebesar Rp8.377.703.152. Defisit dari Kegiatan Operasional dan surplus Kegiatan Non Operasional menyebabkan BPS mengalami Defisit-LO sebesar Rp4.555.714.218.416.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp2.946.911.855.967 dikurang dengan Defisit-LO sebesar Rp4.555.714.218.416 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp2.380.341.935.242 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp4.923.152.161.093 sehingga menghasilkan Ekuitas BPS pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.694.691.733.886.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun 2019 didasarkan pada basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Negara.

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BADAN PUSAT STATISTIK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

Uraian	Catatan	TA 2019			TA 2018
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)
A. Pendapatan Negara dan Hibah					
A.I Pendapatan Negara					
A.I.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak					
A.I.1.a Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan	B.1.1	1.276.120.000	16.949.094.205	1.328,17	11.366.287.969
A.I.1.b Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	B.1.2	42.788.208.000	42.275.455.669	98,80	32.628.715.908
A.I.1.c Pendapatan Jasa Lainnya	B.1.3	0	604.240.000	100,00	0
A.I.1.d Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	B.1.4	0	925.884.306	100,00	1.089.124.248
A.I.1.e Pendapatan Denda	B.1.5	0	2.366.921.147	100,00	285.972.581
A.I.1. f Pendapatan Lain - Lain	B.1.6	0	4.957.892.796	100,00	4.137.786.109
Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak		44.064.328.000	68.079.488.123	154,50	49.507.886.815
Jumlah Pendapatan Negara		44.064.328.000	68.079.488.123	154,50	49.507.886.815
A.II Hibah		0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		44.064.328.000	68.079.488.123	154,50	49.507.886.815
B. Belanja Negara					
B.1 Belanja Pegawai	B.2.1	2.181.192.541.000	2.134.590.486.821	97,86	1.995.459.018.043
B.2 Belanja Barang	B.2.2	2.365.188.685.000	2.200.051.068.346	93,02	2.009.571.195.781
B.3. Belanja Modal	B.2.3	700.690.306.000	639.681.998.613	91,29	349.851.623.662
Jumlah Belanja Negara		5.247.071.532.000	4.974.323.553.780	94,80	4.354.881.837.486

III. NERACA

BADAN PUSAT STATISTIK NERACA PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31-Des-19	31-Des-18
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.1	60.431.458	262.099.491
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.1.2	-	80.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.1.3	1.211.662.100	8.573.176.162
Jumlah Kas dan Bank		1.272.093.558	8.835.355.653
Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	C.1.1.4	3.790.809.575	1.616.040.032
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	C.1.1.5	9.623.499	11.190.198
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	C.1.1.6	9.237.728.594	2.621.948.090
Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.1.7	(90.609.491)	(57.584.671)
Piutang Bukan Pajak (<i>Netto</i>)		9.147.119.103	2.564.363.419
Bagian Lancar Tagihan TP / TGR	C.1.1.8	24.609.633.188	19.710.338.388
Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.1.1.9	(18.122.541.878)	(18.330.000.346)
Bagian Lancar Tagihan TP / TGR (<i>Netto</i>)		6.487.091.310	1.380.338.042
Jumlah Piutang (Bersih)		15.634.210.413	3.944.701.461
Persediaan	C.1.1.10	78.536.117.950	29.209.225.390
Jumlah Aset Lancar		99.242.854.995	43.616.512.734
Aset Tetap			
Tanah	C.1.2.1	3.052.318.324.207	772.800.959.901
Peralatan dan Mesin	C.1.2.2	2.115.313.606.795	1.891.531.310.334
Gedung dan Bangunan	C.1.2.3	1.900.603.566.704	1.930.243.613.988
Aset Tetap Lainnya	C.1.2.4	54.000.004.095	51.045.639.716
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.1.2.5	1.109.199.298	23.786.153.661
Akumulasi Penyusutan	C.1.2.6	(1.759.864.758.972)	(1.861.827.368.808)
Jumlah Aset Tetap		5.363.479.942.127	2.807.580.308.792
Piutang Jangka Panjang			
Tagihan TP/TGR	C.1.3.1	837.351.144	280.954.219
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C.1.3.2	(4.186.756)	(23.539.911)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)		833.164.388	257.414.308
Aset Lainnya			
Aset tak Berwujud	C.1.4.1	818.269.993.123	660.902.639.698
Aset Lain-lain	C.1.4.2	119.939.596.185	99.943.393.399
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.1.4.3	(624.994.529.917)	(531.979.382.692)
Jumlah Aset Lainnya		313.215.059.391	228.866.650.405
JUMLAH ASET		5.776.771.020.901	3.080.320.886.239
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Pada Pihak Ketiga	C.2.1.1	81.489.985.473	132.577.726.879
Hibah Yang Belum Disahkan	C.2.1.2	357.390.000	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.2.1.3	168.876.626	406.655.330
Uang Muka dari KPPN	C.2.1.4	60.431.458	262.099.491
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.1.5	2.603.458	162.548.572
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		82.079.287.015	133.409.030.272
JUMLAH KEWAJIBAN		82.079.287.015	133.409.030.272
EKUITAS			
Ekuitas	C.3.1	5.694.691.733.886	2.946.911.855.967
JUMLAH EKUITAS		5.694.691.733.886	2.946.911.855.967
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.776.771.020.901	3.080.320.886.239

IV. LAPORAN OPERASIONAL

**BADAN PUSAT STATISTIK
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2019	2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.1.1	45.328.204.611	36.754.144.184
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		45.328.204.611	36.754.144.184
Jumlah Pendapatan Operasional		45.328.204.611	36.754.144.184
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2.1	2.137.096.589.165	2.013.618.424.143
Beban Persediaan	D.2.2	55.256.909.040	60.105.843.765
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	980.719.011.337	924.981.968.556
Beban Pemeliharaan	D.2.4	126.060.861.368	121.725.089.564
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	976.912.193.264	918.996.284.417
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.6	333.568.291.808	298.563.302.224
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.2.7	(193.729.803)	(211.604.416)
Jumlah Beban Operasional		4.609.420.126.179	4.337.779.308.253
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional		(4.564.091.921.568)	(4.301.025.164.069)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.1	15.083.462.087	9.036.996.861
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.2	17.272.849.657	23.505.523.265
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(2.189.387.570)	(14.468.526.404)
SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.4.1	11.851.942.987	5.082.584.639
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.4.2	1.284.852.265	1.782.585.217
Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya		10.567.090.722	3.299.999.422
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional		8.377.703.152	(11.168.526.982)
SURPLUS/(DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL		(4.555.714.218.416)	(4.312.193.691.051)

V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BADAN PUSAT STATISTIK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2019	2018
EKUITAS AWAL	E.1	2.946.911.855.967	2.943.466.512.741
SURPLUS/(DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL	E.2	(4.555.714.218.416)	(4.312.193.691.051)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	216.948.956	727.362.820
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	(14.973.308.104)	-
Selisih Revaluasi Aset	F.3.3	2.352.598.330.233	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.4	42.628.383.247	9.647.500.477
Lain - Lain	E.3.5	(128.419.090)	(136.237.958)
Jumlah Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas		2.380.341.935.242	10.238.625.339
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	4.923.152.161.093	4.305.400.408.938
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		2.747.779.877.919	3.445.343.226
EKUITAS AKHIR	E.5	5.694.691.733.886	2.946.911.855.967

VI. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KMK.6/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman

- Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
 19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga;
 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.06/2016 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN;
 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN;
 28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
 29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara;
 30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;

31. Peraturan Menteri Keuangan 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
38. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
39. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan Pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara; dan
40. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga;

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS BADAN PUSAT STATISTIK

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat pada umumnya sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999.

Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektifitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS.

Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah tahun 2015-2019, BPS menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS menyediakan data statistik yang berkualitas, serta upaya untuk menjalankan perannya sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam kerangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif.

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) Tahun 2015-2019 disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan RPJM Nasional Tahun 2015-2019, serta memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Dalam mencapai tujuannya, BPS memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi BPS : **“Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua”**,

(“The Agent of Trustworthy Statistical Data for All”)

Misi BPS:

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional dan internasional;
2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan
3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Melalui visi dan misi tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai tujuan strategis. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2015-2019, yakni bahwa BPS berupaya terus menerus untuk meningkatkan:

1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas.
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik.
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik.
4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel.

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut diwadahi dalam sejumlah program, yakni:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).

Program teknis BPS ini bertujuan untuk menyediakan informasi statistik melalui kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, pengkajian dan analisis statistik, serta diseminasi data dan informasi statistik secara terus menerus guna menjamin kesinambungan penyediaan data statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu di bidang sosial budaya, ekonomi, kependudukan, dan lingkungan.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL).

Program generik BPS ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas dengan strategi yang dilakukan adalah: (a) Meningkatkan

Kapasitas SDM; (b) Penataan Kelembagaan dalam rangka reformasi birokrasi dan mewujudkan *good governance*; dan (c) Peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA).

Program generik ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah.

4. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS (PPAA).

Program generik BPS ini bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi barang, dan kinerja aparatur BPS di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah.

*Struktur
Organisasi*

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PUSAT STATISTIK

Badan Pusat Statistik sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 mempunyai Perwakilan BPS di Daerah yang merupakan Instansi Vertikal BPS di Daerah.

Susunan organisasi Badan Pusat Statistik (BPS) diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja BPS (Pusat) terdiri dari:

1. Kepala

Mempunyai tugas memimpin BPS dalam menjalankan tugas dan fungsi BPS.

2. Sekretaris Utama

Mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS.

3. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi dan informasi statistik.

4. Deputi Bidang Statistik Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sosial.

5. Deputi Bidang Statistik Produksi

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik produksi.

6. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik distribusi dan jasa.

7. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang neraca dan analisis statistik.

8. Inspektorat Utama

Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPS.

9. Pusat Pendidikan dan Pelatihan

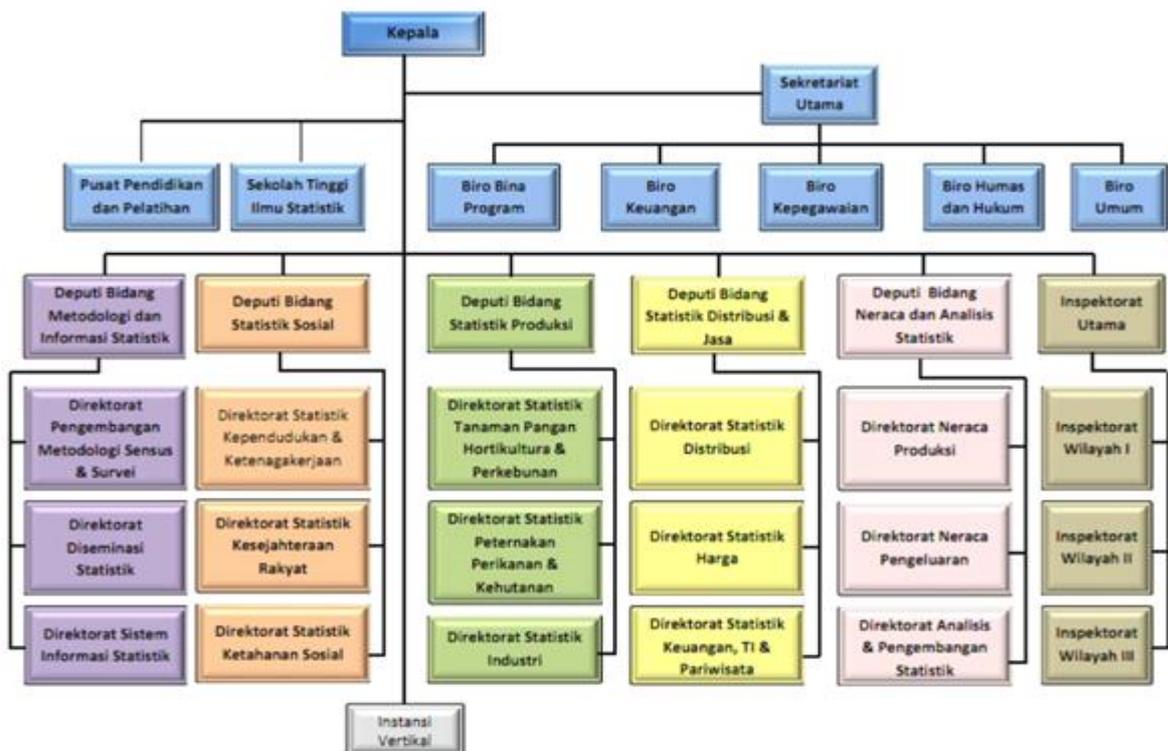
Mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta teknis dan fungsional.

10. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik

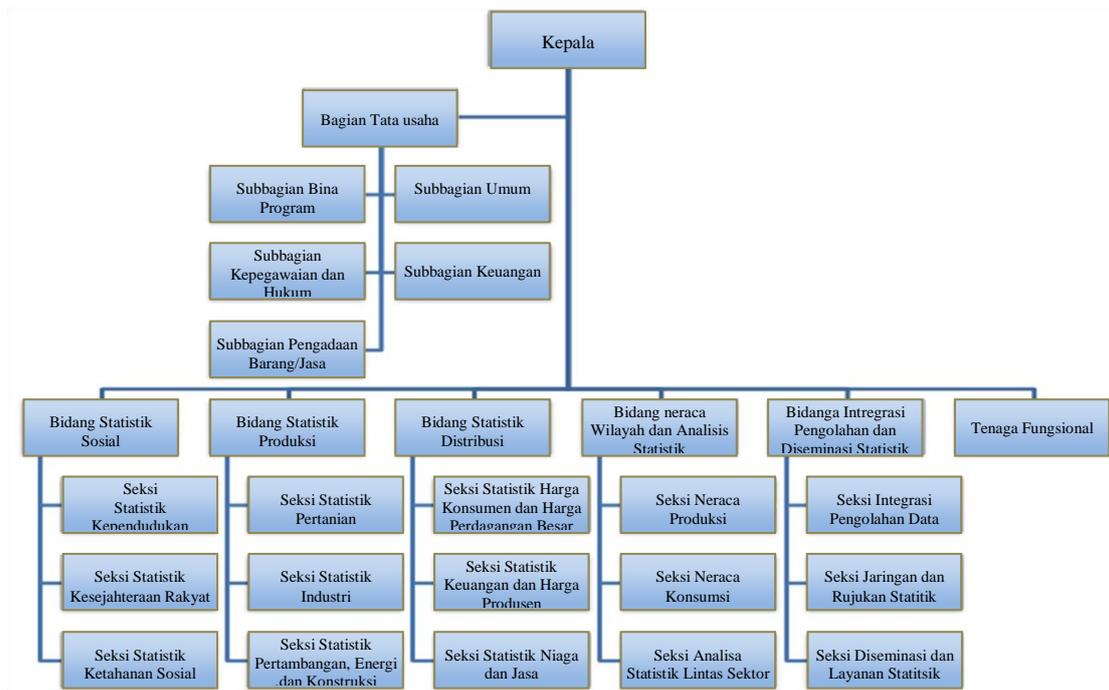
Mempunyai tugas mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang statistika dan komputasi statistik dengan mendidik kader yang memiliki kemampuan akademik/profesional.

11. Instansi Vertikal

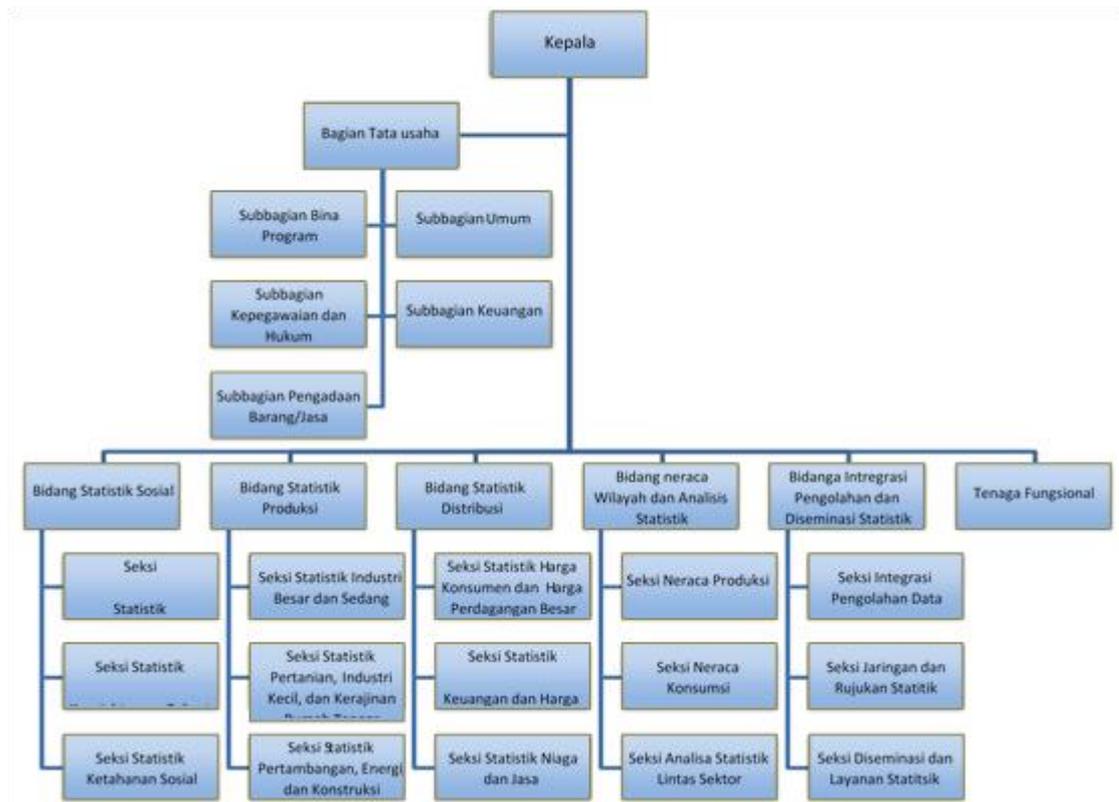
Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi instansi vertikal BPS, dilaksanakan oleh BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPS Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja perwakilan BPS di Daerah.



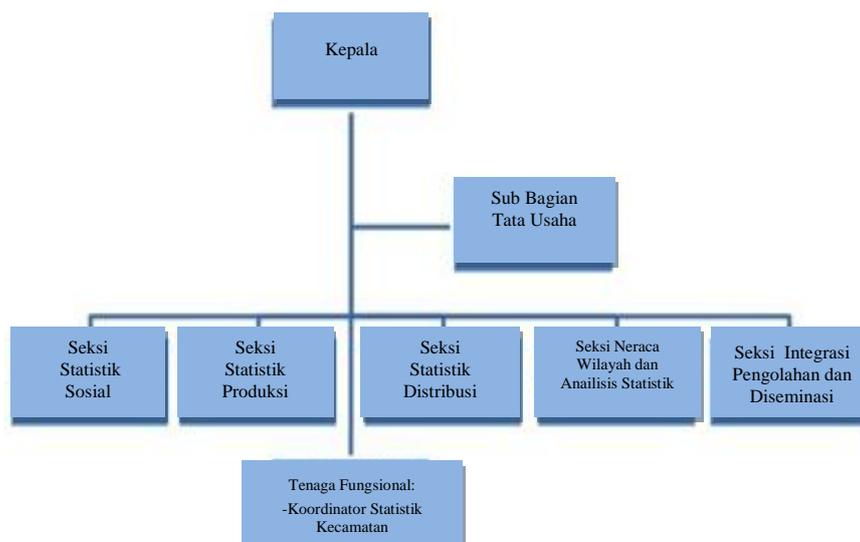
Gambar 1. Struktur Organisasi BPS Pusat



Gambar 2. Struktur Organisasi BPS Provinsi



Gambar 3. Struktur Organisasi BPS Provinsi DKI Jakarta



Gambar 4. Struktur Organisasi BPS Kabupaten/Kota

Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

A.3. IMPLEMENTASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

Badan Pusat Statistik mulai Tahun Anggaran 2015 untuk pertama kali mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.4. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPS Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan BPS Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah BPS yaitu wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Badan Pusat Statistik adalah 517 satker. Dari jumlah tersebut satker yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 517 satker. Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3
Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA

No.	Kode Eselon I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker	
			KP		KD		DK		TP			
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	054	Badan Pusat Statistik	3	-	514	-	-	-	-	-	-	517
Jumlah			3	-	514	-	-	-	-	-	-	517

Keterangan:

M = Menyampaikan Laporan Keuangan

TM = Tidak Menyampaikan Laporan Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2019, satuan kerja yang dicakup dalam laporan keuangan BPS meliputi 517 satuan kerja yang berada dalam satu eselon I yang terdiri dari 3 satker pusat, 34 satker provinsi, dan 480 satker kabupaten/kota dengan rincian yang tersebut dalam Tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4
Rincian Jumlah Satker UAKPA

No.	Kode Wilayah	Satker Pusat/Provinsi	Jumlah Satuan Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1	0199	Sekretariat Utama BPS	1
2	0199	Pusdiklat BPS	1
3	0199	Sekolah Tinggi Ilmu Statistik	1
4	0100	DKI Jakarta	7
5	0200	Jawa Barat	27
6	0300	Jawa Tengah	36
7	0400	DI Yogyakarta	6
8	0500	Jawa Timur	39
9	0600	Aceh	24
10	0700	Sumatera Utara	32
11	0800	Sumatera Barat	20
12	0900	Riau	13
13	1000	Jambi	12
14	1100	Sumatera Selatan	16
15	1200	Lampung	15
16	1300	Kalimantan Barat	15
17	1400	Kalimantan Tengah	15
18	1500	Kalimantan Selatan	14
19	1600	Kalimantan Timur	10
20	1700	Sulawesi Utara	13
21	1800	Sulawesi Tengah	12
22	1900	Sulawesi Selatan	25
23	2000	Sulawesi Tenggara	14
24	2100	Maluku	11
25	2200	Bali	10

No.	Kode Wilayah	Satker Pusat/Provinsi	Jumlah Satuan Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
26	2300	Nusa Tenggara Barat	11
27	2400	Nusa Tenggara Timur	20
28	2500	Papua	22
29	2600	Bengkulu	11
30	2800	Maluku Utara	10
31	2900	Banten	9
32	3000	Bangka Belitung	8
33	3100	Gorontalo	7
34	3200	Kepulauan Riau	8
35	3300	Papua Barat	10
36	3400	Sulawesi Barat	6
37	3500	Kalimantan Utara	6
Total Satuan Kerja			517

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya untuk diperbandingkan dengan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya.

Data BMN yang disajikan dalam Neraca ini seluruhnya telah diproses melalui SIMAK-BMN.

Jumlah satuan kerja di lingkup Badan Pusat Statistik adalah 517 satker yang menyampaikan Laporan Barang Milik Negara tingkat satker dan dikonsolidasikan menjadi Laporan Barang Milik Negara tingkat wilayah sampai dengan tingkat Kementerian Negara/Lembaga. Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5
Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPB

No.	Kode Eselon I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker	
			KP		KD		DK		TP			
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	054	Badan Pusat Statistik	3	-	514	-	-	-	-	-	-	517
Jumlah			3	-	514	-	-	-	-	-	-	517

Keterangan:

M = Menyampaikan Laporan Barang

TM = Tidak Menyampaikan Laporan Barang

Basis Akuntansi

A.5. BASIS AKUNTANSI

Badan Pusat Statistik menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.6. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pusat Statistik dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh Aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.7. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut:

Pendapatan - LRA

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan – LRA dilaksanakan berdasarkan Asas Bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan – LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan - LO

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan – LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan – LO pada Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan dari penjualan publikasi BPS diakui setelah munculnya permintaan data publikasi dari *customer*.
 - b. Pendapatan sewa gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan penjualan aset.
 - d. Pendapatan denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - e. Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan, dan akhir pendidikan.
 - f. Pendapatan penyelesaian ganti rugi.
- Akuntansi pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (Setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi Aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset disajikan di Neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di Neraca dengan menggunakan kurs tengah

Bank Indonesia (BI) pada tanggal Neraca.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam Neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan Piutang Tak Tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas Piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat di Neraca berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal Neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin serta peralatan olah raga

yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- b. Pengeluaran untuk Gedung dan Bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk Tanah, Jalan/Irigasi/Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu Aset Tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada tabel 7.

Tabel 7
Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun

Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Aset musik modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah Piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah Aset pemerintah selain Aset Lancar, Aset Tetap, dan Piutang Jangka Panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa Aset Tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan

kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Estimasi pendapatan dan pagu belanja Badan Pusat Statistik tahun 2019 semula adalah Rp16.531.275.000 dan Rp5.211.787.965.000. Estimasi pendapatan selama tahun 2019 terdapat penambahan sebesar Rp27.533.053.000 yaitu dari yang semula sebesar Rp16.531.275.000 menjadi Rp44.064.328.000. Penambahan estimasi pendapatan ini tersebar ke dua kelompok akun pendapatan yaitu kelompok Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan kelompok Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan teknologi yang masing-masing sebesar Rp1.276.120.000 dan Rp26.256.933.000. Penambahan estimasi pendapatan pada kelompok akun Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha terdapat pada akun Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin dan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan yang masing-masing sebesar Rp360.000.000 dan Rp916.120.000, sehingga secara keseluruhan bertambah sebesar Rp1.276.120.000. Penambahan estimasi pendapatan juga terjadi pada kelompok akun Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi sebesar Rp28.105.367.000. Penambahan ini terdapat pada akun Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan. Pada kelompok akun yang sama, terdapat akun Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan mengalami penurunan estimasi pendapatan sebesar Rp1.848.434.000. Akibat adanya penambahan dan penurunan estimasi pendapatan pada kelompok akun Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi maka secara agregat kelompok akun ini bertambah estimasinya sebesar Rp26.256.933.000.

Pagu belanja terdapat peningkatan secara keseluruhan sebesar Rp35.283.567.000 dari pagu semula sebesar Rp5.211.787.965.000 menjadi Rp5.247.071.532.000. Peningkatan pagu belanja terjadi pada kelompok belanja pegawai sebesar Rp258.626.707.000 dari pagu semula sebesar Rp1.922.565.834.000 menjadi Rp2.181.192.541.000. Terdapat juga penurunan pagu belanja selama tahun 2019 yaitu pada kelompok belanja barang dan modal. Untuk kelompok belanja barang, terjadi penurunan pagu belanja sebesar Rp167.147.514.000, dari pagu semua sebesar Rp2.532.336.199.000 menjadi Rp2.365.188.685.000. Pagu kelompok belanja modal menurun sebesar Rp56.195.626.000, yaitu dari pagu semula sebesar Rp756.885.932.000 menjadi Rp700.690.306.000. Kenaikan dan penurunan pagu belanja secara ringkas dituangkan dalam tabel 9. Penurunan pagu belanja barang dan modal secara umum disebabkan oleh optimalisasi pagu dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang mendesak/prioritas pada beberapa satker, serta pergeseran pagu untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai. Peningkatan pagu belanja pegawai secara umum disebabkan oleh adanya penambahan pegawai CPNS yang berasal dari lulusan pendidikan kedinasan STIS dan penerimaan jalur umum, kenaikan jabatan pegawai, serta banyaknya pegawai yang berubah status dari fungsional umum ke fungsional khusus.

Perubahan estimasi pendapatan dan pagu belanja selama tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 9
Perubahan Estimasi Pendapatan dan Pagu Belanja Tahun 2019

Uraian	Estimasi dan Pagu		
	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan			
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	0	1.276.120.000	1.276.120.000
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	16.531.275.000	42.788.208.000	26.256.933.000
Jumlah Pendapatan	16.531.275.000	44.064.328.000	27.533.053.000
Belanja			
Belanja Pegawai	1.922.565.834.000	2.181.192.541.000	258.626.707.000
Belanja Barang	2.532.336.199.000	2.365.188.685.000	(167.147.514.000)
Belanja Modal	756.885.932.000	700.690.306.000	(56.195.626.000)
Jumlah Belanja	5.211.787.965.000	5.247.071.532.000	35.283.567.000

Estimasi penerimaan pendapatan pada tahun 2019 secara keseluruhan sebesar Rp44.064.328.000. Nilai estimasi penerimaan pendapatan tersebut teralokasi atas estimasi penerimaan pendapatan kelompok akun Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan kelompok akun Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan teknologi. Masing-masing kelompok akun pendapatan tersebut bernilai Rp1.276.120.000 atau 2,90 persen dari total estimasi penerimaan pendapatan dan Rp42.788.208.000 atau 97,10 persen dari total estimasi penerimaan pendapatan. Estimasi penerimaan pendapatan kelompok akun Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi mendapatkan persentase estimasi penerimaan pendapatan yang lebih besar. Hal ini menggambarkan kelompok akun pendapatan ini terdapat potensi penerimaan pendapatan yang besar dikarenakan memiliki keterkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pusat Statistik sebagai lembaga yang menyediakan layanan data statistik.

Pagu belanja selama tahun 2019 dialokasikan berdasarkan kelompok program kegiatan sebanyak 4 kelompok, yaitu kelompok program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL), Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA), Pengawasan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur (PPAA), dan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Pagu belanja menurut kelompok program mengalami perubahan selama tahun 2019. Perubahan ini terdapat pada pagu belanja kelompok program DMPTTL, PSPA, dan PPIS, sedangkan pagu belanja kelompok program PPAA tidak mengalami perubahan. Secara ringkas perubahan pagu belanja menurut kelompok program disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 10
Perubahan Pagu Belanja Berdasarkan Program

Uraian Program	Pagu		
	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	2.647.494.633.000	2.848.094.140.000	200.599.507.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS	249.146.142.000	244.797.862.000	(4.348.280.000)
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS	8.619.710.000	8.619.710.000	0
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2.306.527.480.000	2.145.559.820.000	(160.967.660.000)
Jumlah	5.211.787.965.000	5.247.071.532.000	35.283.567.000

Pagu belanja kelompok program DMPTTL selama tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp200.599.507.000, dari pagu semula sebesar Rp2.647.494.633.000 menjadi sebesar Rp2.848.094.140.000. Sedangkan pada pagu belanja kelompok program PSPA dan PPIS terdapat penurunan yang masing-masing sebesar Rp4.348.280.000 dan Rp160.967.660.000. Atas perubahan pagu belanja pada ketiga program tersebut, secara keseluruhan, selama tahun 2019 pagu belanja berdasarkan kelompok program, selama tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp35.283.567.000.

Selain dikelompokkan berdasarkan program, pagu belanja selama tahun 2019 juga dikelompokkan berdasarkan sumber dana. Kelompok pagu belanja menurut sumber dana yang diterima terbagi menjadi 4 jenis sumber dana, yaitu kelompok sumber dana Rupiah Murni (RM), PNBPN, Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN), dan Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN). Perubahan pagu belanja berdasarkan kelompok sumber dana selama tahun 2019 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 11
Perubahan Pagu Belanja Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Pagu		
	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Rupiah Murni	5.196.989.254.000	5.196.989.224.000	(30.000)
PNBP	14.798.711.000	40.877.918.000	26.079.207.000
HLDN	0	2.820.390.000	2.820.390.000
HLLN	0	6.384.000.000	6.384.000.000
Jumlah	5.211.787.965.000	5.247.071.532.000	35.283.567.000

Pagu belanja kelompok sumber dana selama tahun 2019 mengalami perubahan sebesar Rp35.283.567.000 dari pagu semula sebesar Rp5.211.787.965.000 menjadi sebesar Rp5.247.071.532.000. Perubahan pagu belanja terdapat pada semua kelompok sumber dana. Perubahan pagu belanja kelompok sumber dana yang berupa peningkatan nilai pagu dari pagu semula terdapat pada kelompok sumber dana PNBPN, HLDN, dan HLLN. Kelompok sumber dana tersebut mengalami peningkatan pagu belanja masing-masing untuk PNBPN sebesar Rp26.079.207.000, HLDN sebesar Rp2.820.390.000, dan HLLN sebesar Rp6.384.000.000. Untuk pagu belanja kelompok sumber dana RM, selama tahun 2019 mengalami perubahan berupa penurunan pagu sebesar Rp30.000.

Realisasi Pendapatan
Rp68.079.488.123

B.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Realisasi penerimaan pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp68.079.488.123 atau mencapai 154,50 persen dari estimasi pendapatan yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp44.064.328.000. Realisasi penerimaan pendapatan selama tahun 2019 secara keseluruhan merupakan kelompok pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian estimasi dan realisasi penerimaan pendapatan sampai dengan 31 Desember 2019 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 12
Rincian Estimasi dan Realisasi Penerimaan PNBP

Uraian	TA 2019		
	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	1.276.120.000	16.949.094.205	1.328,17
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	42.788.208.000	42.275.455.669	98,80
Pendapatan Jasa Lainnya	0	604.240.000	0,00
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0	925.884.306	0,00
Pendapatan Denda	0	2.366.921.147	0,00
Pendapatan Lain-Lain	0	4.957.892.796	0,00
Jumlah	44.064.328.000	68.079.488.123	154,50

Realisasi penerimaan pendapatan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp68.079.488.123 yang tersaji dalam tabel 12 merupakan nilai bersih penerimaan yang diperoleh dari realisasi penerimaan bruto sebesar Rp68.080.228.928 dikurangi dengan penerimaan pengembalian pendapatan sebesar Rp740.805.

Penjelasan realisasi penerimaan PNBP secara rinci sebagai berikut:

1. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha merupakan penerimaan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penjualan tanah, gedung dan bangunan berupa rumah dinas, gedung kantor dan parkir yang rusak berat karena gempa, penjualan kendaraan bermotor dan benda bergerak seperti *cctv*, meja kantor, printer, penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan seperti kendaraan bermotor, *scanner*, dokumen sisa kegiatan sensus dan survei, bongkaran rumah dinas, sewa rumah dinas, dan sewa gedung dan bangunan (sewa ruang koperasi, sewa kantin, kantor kas BRI, dan ATM BRI).
2. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi merupakan penerimaan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan ujian/seleksi masuk pendidikan yaitu biaya pendaftaran ujian masuk penerimaan mahasiswa baru Politeknik Statistika STIS, layanan pendidikan dan/atau pelatihan yaitu kerjasama dengan Pusdiklat Keuangan Umum Kementerian Keuangan dan Dinas Pariwisata Propinsi Riau terkait diklat fungsional pranata komputer, layanan survei dan pemetaan yaitu kerja sama BPS dengan Bank Indonesia (BI), Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), Kementerian

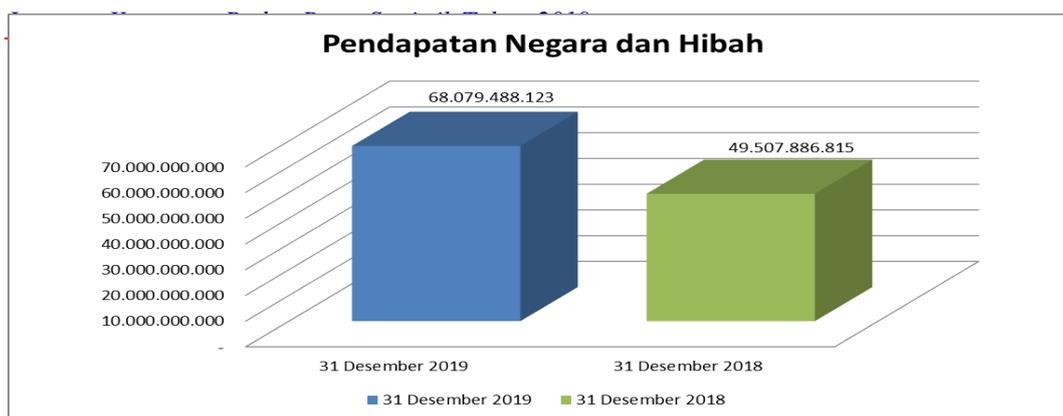
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenpolhukam), dan Pemerintah Daerah, serta kegiatan hasil survei dan pemetaan berupa penjualan buku-buku publikasi baik dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy*, penjualan data mikro (dalam proses), penjualan data mikro (dalam bentuk *Dbase file*), penjualan publikasi elektronik/*softcopy*, dan penjualan peta digital wilayah (dalam bentuk *soft file*).

3. Pendapatan Jasa Lainnya merupakan penerimaan pendapatan yang diperoleh dari hasil kerja sama Pusdiklat BPS dengan Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Kepegawaian dan Perencanaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bengkulu Utara, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait pendidikan dan latihan dasar yang diselenggarakan oleh Pusdiklat BPS.
4. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan merupakan penerimaan pendapatan yang perolehannya berupa pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) dari rekening Bendahara Pengeluaran dan rekening Pemerintah Lainnya, serta pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
5. Pendapatan denda merupakan penerimaan pendapatan yang diperoleh dari pengenaan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah.
6. Pendapatan Lain-lain adalah penerimaan pendapatan yang berupa penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu (TAYL), penerimaan kembali belanja barang TAYL, penerimaan kembali belanja modal TAYL, pendapatan setoran dari sisa utang non Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pensiunan PNS, penerimaan kembali persekot/uang muka gaji, dan pendapatan anggaran lain-lain.

Penerimaan pendapatan berupa setoran dari sisa utang non Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pensiunan PNS merupakan penerimaan setoran atas kelebihan pembayaran belanja pegawai berupa dana pensiun PNS yang dipungut dan disetor ke Kas Negara oleh PT TASPEN Persero dengan menggunakan kode satker Settama BPS.

Realisasi penerimaan pendapatan yang tidak terestimasi atau tidak diperkirakan diterima dalam DIPA Tahun 2019 adalah penerimaan pendapatan dari penjualan tanah, gedung, dan bangunan, pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya, pendapatan jasa lainnya, pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro), pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah, penerimaan kembali belanja pegawai, barang, dan modal TAYL, pendapatan setoran dari sisa utang non TP/TGR pensiunan PNS, penerimaan kembali persekot/uang muka gaji, dan pendapatan anggaran lain-lain.

Perbandingan realisasi penerimaan Pendapatan Negara dan Hibah selama Tahun Anggaran 2019 dan 2018 seperti dilihat pada grafik 1.



Grafik 1: Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2019 dan 2018

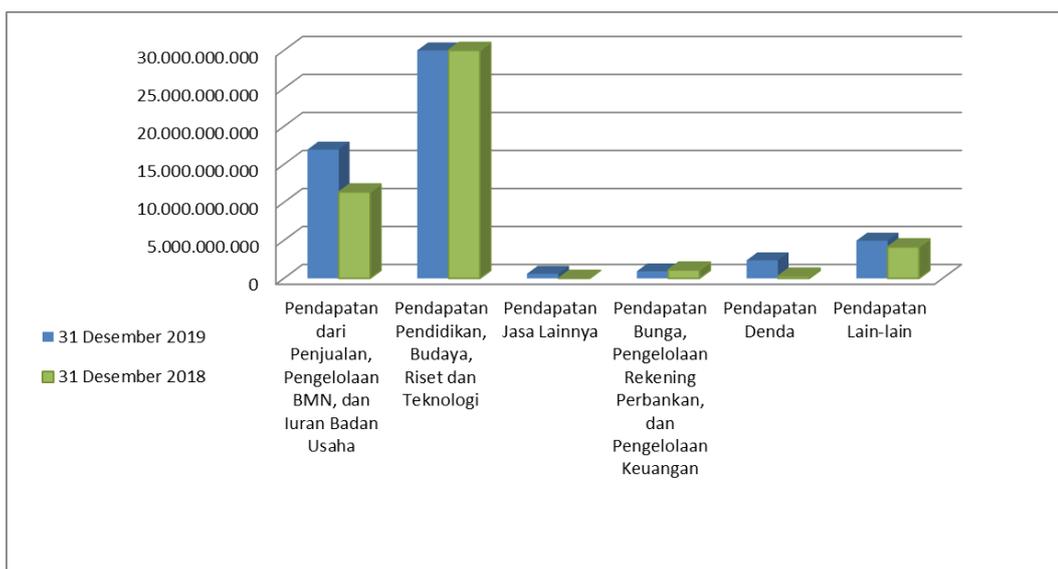
Realisasi penerimaan pendapatan selama tahun anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp18.571.601.308 atau sebesar 37,51 persen dibandingkan realisasi penerimaan pendapatan pada periode yang sama yaitu tahun anggaran 2018. Perbandingan realisasi penerimaan pendapatan berupa PNPB tahun anggaran 2019 dan 2018 disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 13
Perbandingan Realisasi Penerimaan PNPB Tahun Anggaran 2019 dan 2018**

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	16.949.094.205	11.366.287.969	5.582.806.236	49,12
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	42.275.455.669	32.628.715.908	9.646.739.761	29,57
Pendapatan Jasa Lainnya	604.240.000	0	604.240.000	0,00
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	925.884.306	1.089.124.248	(163.239.942)	(14,99)
Pendapatan Denda	2.366.921.147	285.972.581	2.080.948.566	727,67
Pendapatan Lain-lain	4.957.892.796	4.137.786.109	820.106.687	19,82
Jumlah	68.079.488.123	49.507.886.815	18.571.601.308	37,51

Kenaikan realisasi penerimaan pendapatan terbesar terdapat pada penerimaan pendapatan denda yaitu sebesar 727,67 persen. Kenaikan penerimaan ini disebabkan oleh hasil tindak lanjut temuan BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan BPS Tahun 2018 terkait wan-prestasi pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan pemerintah. Kenaikan realisasi penerimaan pendapatan juga terdapat pada penerimaan pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, iuran badan usaha sebesar 49,12 persen, pendapatan pendidikan, budaya, riset, dan teknologi sebesar 29,57 persen, dan pendapatan lain-lain sebesar 19,82 persen.

Selain kenaikan realisasi penerimaan pendapatan, terdapat akun pendapatan tahun 2019 yang mengalami penurunan realisasi dibandingkan tahun 2018 yaitu penerimaan pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan, dan pengelolaan keuangan sebesar 14,99 persen atau sebesar Rp163.239.942.



Grafik 2: Perbandingan Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2019 dan 2018

B.1.1. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha

Berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2019, BPS menetapkan estimasi penerimaan PNBP yang akan diperoleh selama tahun 2019 berupa pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, iuran badan usaha sebesar Rp1.276.120.000. Realisasi penerimaan PNBP dari penjualan, pengelolaan BMN, iuran badan usaha selama tahun 2019 tercatat sebesar Rp16.949.094.205 atau 1.328,17 persen dari estimasi penerimaannya merupakan nilai bersih yang diperoleh dari realisasi pendapatan bruto sebesar Rp16.949.835.010 setelah dikurangi dengan pengembalian pendapatan sebesar Rp740.805.

Adapun rincian perolehan realisasi pendapatan dari dari penjualan, pengelolaan BMN, iuran badan usaha adalah sebagai berikut.

Akun	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
425121	Pendapatan Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	23.992.000	0,00
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	360.000.000	7.834.386.951	2.176,22
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	7.225.083.136	0,00
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	916.120.000	1.865.632.118	203,64
Jumlah		1.276.120.000	16.949.094.205	1.328,17

Realisasi penerimaan Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No.	Wilayah/Satker	Pendapatan Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan (Rp)	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (Rp)	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (Rp)	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (Rp)
1	DKI Jakarta	0	120.600.000	238.398.356	16.541.790
2	Sestama	0	1.816.851.325	0	301.591.049
3	Pusdiklat	0	129.701.000	0	8.103.897
4	Politeknis Statistik STIS	0	0	0	94.218.017
5	Jawa Barat	0	364.098.739	532.203.696	47.602.545
6	Jawa Tengah	0	1.535.554.926	1.285.831.419	65.364.279
7	DI Yogyakarta	0	328.964.275	157.955.125	18.048.000
8	Jawa Timur	0	110.437.441	892.591.648	72.414.083
9	Aceh	0	136.900.009	687.651.251	46.837.282
10	Sumatera Utara	0	400.731.274	356.417.851	61.111.907
11	Sumatera Barat	0	233.239.000	461.196.460	62.560.330
12	Riau	0	241.244.182	42.566.000	42.763.541
13	Jambi	0	0	149.044.691	14.337.909
14	Sumatera Selatan	0	0	186.425.655	30.559.778
15	Lampung	0	0	139.460.286	36.020.553
16	Kalimantan Barat	0	0	285.893.000	50.671.704
17	Kalimantan Tengah	0	0	203.179.618	43.027.770
18	Kalimantan Selatan	0	625.519.144	2.560.000	30.817.000
19	Kalimantan Timur	0	0	88.645.687	44.716.389
20	Sulawesi Utara	0	0	138.282.098	17.704.080
21	Sulawesi Tengah	0	163.657.000	6.422.999	35.707.496
22	Sulawesi Selatan	0	54.893.111	573.751.582	38.550.288
23	Sulawesi Tenggara	0	273.427.498	36.325.000	31.337.873
24	Maluku	0	62.748.670	6.700.000	66.872.734
25	Bali	0	0	109.476.492	46.608.400
26	Nusa Tenggara Barat	23.992.000	546.135.111	0	27.372.800
27	Nusa Tenggara Timur	0	347.254.995	44.851.881	69.603.275
28	Papua	0	0	95.872.753	91.889.186
29	Bengkulu	0	63.111.000	0	13.005.480
30	Maluku Utara	0	0	22.393.500	86.080.370
31	Banten	0	0	205.742.987	16.438.084
32	Kep. Bangka Belitung	0	0	115.132.325	31.411.451
33	Gorontalo	0	123.354.000	0	14.679.401
34	Kepulauan Riau	0	104.305.251	12.495.787	27.262.849
35	Papua Barat	0	51.659.000	2.453.000	129.800.439
36	Sulawesi Barat	0	0	88.541.999	28.345.389
37	Kalimantan Utara	0	0	56.619.990	5.654.700
Jumlah		23.992.000	7.834.386.951	7.225.083.136	1.865.632.118

B.1.2. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi

Berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2019, BPS menetapkan estimasi penerimaan PNBPN yang akan diperoleh selama tahun 2019 berupa pendapatan pendidikan, budaya, riset, dan teknologi sebesar Rp42.788.208.000. Realisasi penerimaan PNBPN tersebut selama tahun 2019 sebesar Rp42.275.455.669 atau 98,80 persen.

Adapun rincian realisasi penerimaan pendapatan pendidikan, budaya, riset, dan teknologi adalah sebagai berikut.

Akun	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	5.700.000.000	4.754.100.000	83,41
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	1.797.750.000	877.500.000	48,81
425432	Pendapatan Layanan Survei dan Pemetaan	28.105.367.000	27.888.652.200	99,23
425435	Pendapatan Hasil Survei dan Pemetaan	7.185.091.000	8.755.203.469	121,85
Jumlah		42.788.208.000	42.275.455.669	98,80

Realisasi penerimaan Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No.	Wilayah/Satker	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan (Rp)	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan (Rp)	Pendapatan Layanan Survei dan Pemetaan (Rp)	Pendapatan Hasil Survei dan Pemetaan (Rp)
1	DKI Jakarta	0	0	0	342.700
2	Sestama	0	0	25.835.330.000	8.536.116.219
3	Pusdiklat	0	877.500.000	0	0
4	Politeknik Statistika STIS	4.754.100.000	0	0	0
5	Jawa Barat	0	0	632.500.000	183.531.515
6	Jawa Tengah	0	0	0	1.090.600
7	DI Yogyakarta	0	0	0	604.600
8	Jawa Timur	0	0	0	7.144.093
9	Aceh	0	0	0	617.000
10	Sumatera Utara	0	0	0	230.000
11	Sumatera Barat	0	0	0	7.375.000
12	Riau	0	0	0	1.100.000
13	Jambi	0	0	0	3.375.000
14	Sumatera Selatan	0	0	0	1.927.300
15	Lampung	0	0	0	540.000
16	Kalimantan Tengah	0	0	0	784.380
17	Kalimantan Timur	0	0	0	997.882
18	Sulawesi Utara	0	0	0	275.000
19	Sulawesi Tengah	0	0	0	2.107.726
20	Sulawesi Selatan	0	0	0	380.000
21	Sulawesi Tenggara	0	0	0	976.900
22	Maluku	0	0	0	90.000
23	Bali	0	0	522.749.200	0
24	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	15.000
25	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	1.235.354
26	Bengkulu	0	0	0	453.200
27	Maluku Utara	0	0	0	421.000
28	Banten	0	0	0	2.470.000

29	Kep. Bangka Belitung	0	0	898.073.000	0
30	Gorontalo	0	0	0	96.000
31	Kepulauan Riau	0	0	0	156.700
32	Papua Barat	0	0	0	740.000
33	Sulawesi Barat	0	0	0	10.300
Jumlah		4.754.100.000	877.500.000	27.888.652.200	8.755.203.469

B.1.3 Pendapatan Jasa Lainnya

Berdasarkan DIPA Tahun 2019, BPS tidak mengestimasi PNBPN yang berasal dari pendapatan jasa lainnya. Realisasi atas PNBPN yang berasal dari pendapatan jasa lainnya tahun anggaran 2019 sebesar Rp604.240.000.

Adapun rincian perolehan realisasi pendapatan jasa lainnya adalah sebagai berikut.

Akun	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	604.240.000	0,00
Jumlah		0	604.240.000	0,00

Realisasi penerimaan Pendapatan Jasa Lainnya terdapat pada satker Pusdiklat BPS.

B.1.4 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan DIPA Tahun 2019, BPS tidak mengestimasi PNBPN yang berasal dari pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan, dan pengelolaan keuangan. Realisasi atas penerimaan PNBPN yang berasal dari pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan, dan pengelolaan keuangan selama tahun 2019 adalah sebesar Rp924.884.306.

Adapun rincian realisasi penerimaan pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan, dan pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut.

Akun	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	4.938.992	0,00
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	0	920.945.314	0,00
Jumlah		0	925.884.306	0,00

Realisasi penerimaan Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No.	Wilayah/Satker	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) (Rp)	Pendapatan Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain (Rp)
1	DKI Jakarta	0	1.239.581

2	Sestama	3.301.515	903.094.356
3	Jawa Barat	31.316	1.590.273
4	Jawa Tengah	376.463	0
5	DI Yogyakarta	17.073	0
6	Jawa Timur	498.992	1.663.000
7	Aceh	133.286	3.484.000
8	Sumatera Utara	10.873	0
9	Kalimantan Barat	0	2.990.400
10	Kalimantan Tengah	2.881	0
11	Kalimantan Selatan	42.171	0
12	Sulawesi Utara	50.838	0
13	Sulawesi Tengah	0	2.661.000
14	Sulawesi Tenggara	18.909	0
15	Maluku	821	0
16	Banten	395.265	0
17	Gorontalo	52.211	0
18	Papua Barat	0	4.222.704
19	Sulawesi Barat	6.378	0
Jumlah		4.938.992	920.945.314

B.1.5 Pendapatan Denda

Berdasarkan DIPA Tahun 2019, BPS tidak mengestimasi PNBPN yang berasal dari pendapatan denda. Realisasi atas penerimaan PNBPN yang berasal dari pendapatan denda selama tahun 2019 adalah sebesar Rp2.366.921.147.

Adapun perolehan realisasi pendapatan denda adalah sebagai berikut.

Akun	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2.366.921.147	0,00
Jumlah		0	2.366.921.147	0,00

Realisasi penerimaan Pendapatan Denda per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No.	Wilayah/Satker	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (Rp)
1	DKI Jakarta	286.086.984
2	Sestama	1.830.391.342
3	Pusdiklat	112.455
4	Jawa Barat	7.409.915
5	Jawa Tengah	750.573
6	Jawa Timur	12.110.313
7	Aceh	20.867.524
8	Sumatera Utara	12.769.222

9	Sumatera Barat	1.340.000
10	Jambi	18.768.756
11	Sumatera Selatan	5.313.222
12	Lampung	1.553.202
13	Kalimantan Tengah	34.734.824
14	Sulawesi Tengah	15.015.631
15	Sulawesi Selatan	3.785.591
16	Maluku	11.442.279
17	Nusa Tenggara Barat	8.820.706
18	Nusa Tenggara Timur	90.305.779
19	Kep. Bangka Belitung	1.217.755
20	Gorontalo	81.600
21	Papua Barat	3.525.434
22	Sulawesi Barat	518.040
Jumlah		2.366.921.147

B.1.6 Pendapatan Lain-lain

Berdasarkan DIPA Tahun 2019, BPS tidak mengestimasi PNBPN yang berasal dari pendapatan lain-lain. Realisasi atas penerimaan PNBPN yang berasal dari pendapatan lain-lain selama tahun 2019 adalah sebesar Rp4.957.892.796.

Adapun rincian realisasi penerimaan pendapatan lain-lain adalah sebagai berikut.

Akun	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	704.738.443	0,00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0	3.277.421.382	0,00
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	0	656.451.970	0,00
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	289.257.604	0,00
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	466.360	0,00
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	29.557.037	0,00
Jumlah		0	4.957.892.796	0,00

Realisasi penerimaan Pendapatan Lain-Lain per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No.	Wilayah/Satker	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (Rp)	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu (Rp)	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu (Rp)	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS (Rp)	Penerimaan Kembali Persekot/ uang Muka Gaji (Rp)	Pendapatan Anggaran Lain-lain (Rp)
1	DKI Jakarta	9.478.483	210.000	0	0	0	437
2	Sestama	387.073.771	3.025.026.052	175.260.000	289.257.604	0	5.571.095
3	Pusdiklat	2.665.832	20.994.772	0	0	0	0
4	STIS	0	4.296.045	0	0	0	10
5	Jawa Barat	58.764.485	0	0	0	0	0
6	Jawa Tengah	67.476.807	13.943.520	0	0	0	0
7	DI Yogyakarta	960.416	0	0	0	0	0

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Tahun 2019

8	Jawa Timur	33.177.015	26.638.980	0	0	0	7.007.746
9	Aceh	9.029.306	64.091.301	194.913.737	0	0	14.674.769
10	Sumatera Utara	9.048.928	24.111.370	206.567.997	0	0	0
11	Sumatera Barat	6.855.955	4.157.000	0	0	0	0
12	Riau	6.361.937	10.174.500	0	0	0	0
13	Jambi	555.000	2.650.000	0	0	0	0
14	Sumatera Selatan	2.039.883	7.298.979	0	0	0	0
15	Lampung	1.886.861	1.654.000	41.714.693	0	0	0
16	Kalimantan Barat	5.269.798	0	0	0	0	0
17	Kalimantan Tengah	653	206.400	0	0	0	740.012
18	Kalimantan Selatan	730.040	0	0	0	0	0
19	Kalimantan Timur	16.018.538	8.381.000	0	0	0	83
20	Sulawesi Utara	6.947.908	0	0	0	0	0
21	Sulawesi Tengah	10.001.732	41.350.000	0	0	0	111
22	Sulawesi Selatan	3.549.554	680.000	0	0	0	1.528.954
23	Sulawesi Tenggara	2.192.027	150.000	0	0	0	0
24	Maluku	1.081.299	300.000	11.151.228	0	0	0
25	Bali	1.859.042	558.782	0	0	0	1.406
26	Nusa Tenggara Barat	3.352.511	0	0	0	0	574
27	Nusa Tenggara Timur	25.243.818	10.474.668	5.007.553	0	0	0
28	Papua	4.305.866	0	0	0	0	30.511
29	Bengkulu	2.836.955	0	0	0	0	1.150
30	Maluku Utara	1.617.008	0	0	0	0	0
31	Banten	3.972.722	340.000	21.836.762	0	0	0
32	Kep. Bangka Belitung	1.476.435	1.331.513	0	0	466.360	0
33	Gorontalo	555.000	181.500	0	0	0	0
34	Kepulauan Riau	423	8.221.000	0	0	0	0
35	Papua Barat	16.222.000	0	0	0	0	179
36	Sulawesi Barat	433	0	0	0	0	0
37	Kalimantan Utara	2.130.002	0	0	0	0	0
Jumlah		704.738.443	3.277.421.382	656.451.970	289.257.604	466.360	29.557.037

Realisasi
Belanja
Rp4.974.323.553.780

B.2 BELANJA

Realisasi belanja pada Badan Pusat Statistik selama tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp4.974.323.553.780 atau 94,80 persen dari pagu yang sebesar Rp5.247.071.532.000. Pagu dan realisasi belanja pada Badan Pusat Statistik dikelompokkan menurut program kegiatan menjadi 4 program, yaitu program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL), program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA), program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur (PPAA), dan program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Rincian pagu dan realisasi belanja selama tahun anggaran 2019 menurut kelompok program tersaji sebagai berikut:

Tabel 14
Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Program Tahun Anggaran 2019

Kode	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
054.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	2.848.094.140.000	2.737.239.782.787	96,11
054.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS	244.797.862.000	240.004.300.787	98,04
054.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS	8.619.710.000	8.361.203.063	97,00
054.01.06	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2.145.559.820.000	1.988.718.267.143	92,69
Jumlah		5.247.071.532.000	4.974.323.553.780	94,80

Pagu menurut kelompok program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) sebesar Rp2.848.094.140.000 atau 54,28 persen dari total pagu belanja, digunakan untuk menampung kebutuhan biaya gaji dan tunjangan pegawai termasuk tunjangan kinerja pegawai dan sudah di alokasi ke seluruh satker, operasional perkantoran sebanyak 517 satker, penyelenggaraan kegiatan pendidikan kedinasan di Politeknik Statistika STIS (Polstat STIS), penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Pusdiklat BPS, dan kegiatan non operasional lainnya. Pagu menurut kelompok program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS sebesar Rp244.797.862.000 atau 4,67 persen dari total pagu, digunakan untuk menampung kegiatan revitalisasi gedung kantor BPS di satker daerah, pembelian rumah dinas, pembangunan rumah dinas, pengadaan kendaraan dinas, pengadaan tanah rumah dinas, dan pengadaan genset. Pagu menurut kelompok program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur (PPAA) BPS sebesar Rp8.619.710.000 atau 0,16 persen dari total pagu untuk menampung kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama BPS. Sedangkan pagu menurut kelompok program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp2.145.559.820.000 atau 40,89 persen dari total pagu. Pagu ini digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi BPS yaitu menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data.

Realisasi belanja menurut kelompok program selama tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut: program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

BPS (DMPTTL) sebesar Rp2.737.239.782.787 atau 96,11 persen dari pagu belanja, program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA) sebesar Rp240.004.300.787 atau 98,04 persen dari pagu belanja, program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS (PPAA) sebesar Rp8.361.203.063 atau 97 persen dari pagu belanja, dan program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp1.988.718.267.143 atau 92,69 persen dari pagu belanja.

Realisasi belanja menurut kelompok program selama tahun anggaran 2019 secara keseluruhan adalah Rp4.974.323.553.780. Dari seluruh nilai realisasi belanja menurut kelompok program, persentase realisasi belanja kelompok program DMPTTL adalah 55,03 persen atau sebesar Rp2.737.239.782.787. Persentase realisasi belanja kelompok program PSPA adalah 4,82 persen. Realisasi belanja kelompok program PPAA adalah 0,17 persen dan realisasi belanja kelompok program PPIS adalah 39,98 persen. Berdasarkan persentase maka dari keseluruhan realisasi belanja menurut kelompok program yang terbesar adalah realisasi belanja kelompok program DMPTTL.

Pagu dan realisasi belanja selama tahun 2019 selain dikelompokkan berdasarkan program kegiatan, juga dikelompokkan berdasarkan sumber dana. Pagu dan realisasi belanja berdasarkan kelompok sumber dana terdiri dari pagu dan realisasi belanja sumber dana Rupiah Murni (RM), sumber dana PNBPN, sumber dana Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN), dan Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN). Pagu dan realisasi belanja masing-masing sumber dana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 15
Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana Tahun Anggaran 2019

Kode	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Rupiah Murni	5.196.989.224.000	4.930.585.679.687	94,87
04	PNBP	40.877.918.000	35.112.396.649	85,90
10	Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN)	2.820.390.000	2.670.479.500	94,68
11	Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN)	6.384.000.000	5.954.997.944	93,28
Jumlah		5.247.071.532.000	4.974.323.553.780	94,80

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa belanja dengan sumber dana Rupiah Murni memiliki pagu sebesar Rp5.196.989.224.000 dan realisasi sebesar Rp4.930.585.679.687 atau 94,87 persen dari pagu. Pagu dalam kelompok sumber dana Rupiah Murni merupakan pagu yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain:

1. Penyusunan Pengembangan dan Evaluasi Program dan Anggaran (2881) sebesar Rp75.347.238.000, dengan realisasi belanja sebesar Rp64.274.623.647.
2. Pelayanan Publik Hubungan Masyarakat dan Hukum (2882) sebesar Rp5.525.042.000, dengan realisasi belanja sebesar Rp4.768.606.315.
3. Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian (2883) sebesar Rp21.912.431.000, dengan realisasi belanja sebesar Rp20.075.673.257.
4. Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan (2884) sebesar Rp223.815.785.000, dengan realisasi belanja sebesar Rp219.572.643.921.

5. Dukungan Manajemen BPS Lainnya (2885) sebesar Rp102.358.422.000, dengan realisasi belanja sebesar Rp85.585.446.198.
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi (2886) sebesar Rp2.306.497.218.000, dengan realisasi belanja sebesar Rp2.237.646.903.686.
7. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS) (2887) sebesar Rp66.250.774.000, dengan realisasi belanja sebesar Rp63.393.979.342.
8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS serta Operasional Perkantoran Lainnya (2890) sebesar Rp30.890.092.000, dengan realisasi belanja sebesar Rp30.128.908.127.
9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi (2891) sebesar Rp213.907.770.000, dengan realisasi belanja sebesar Rp209.875.392.660.
10. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I (2892) sebesar Rp3.022.289.000, dengan realisasi belanja sebesar Rp2.961.643.874.
11. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II (2893) sebesar Rp2.764.017.000, dengan realisasi belanja sebesar Rp2.665.476.200.
12. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III (2894) sebesar Rp2.833.404.000, dengan realisasi belanja sebesar Rp2.734.082.989.
13. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi (2895) sebesar Rp1.528.863.818.000, dengan realisasi belanja sebesar Rp1.447.103.422.812.
14. Pengembangan dan Analisis Statistik (2896) sebesar Rp3.088.999.000, dengan realisasi belanja sebesar Rp2.896.858.800.
15. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik (2897) sebesar Rp2.291.867.000, dengan realisasi belanja sebesar Rp2.094.426.982.
16. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran (2898) sebesar Rp19.707.951.000, dengan realisasi belanja sebesar Rp18.181.070.754.
17. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi (2899) sebesar Rp12.476.072.000, dengan realisasi belanja sebesar Rp11.755.477.152.
18. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (2900) sebesar Rp770.874.000, dengan realisasi belanja sebesar Rp683.383.530.
19. Pengembangan Sistem Informasi Statistik (2901) sebesar Rp31.660.357.000, dengan realisasi belanja sebesar Rp23.523.282.056.
20. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi (2902) sebesar Rp4.942.309.000, dengan realisasi belanja sebesar Rp4.680.538.235.
21. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga (2903) sebesar Rp5.035.233.000, dengan realisasi belanja sebesar Rp4.891.730.864.

22. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi dan Konstruksi (2904) sebesar Rp5.096.425.000, dengan realisasi belanja sebesar Rp4.911.958.342.
23. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (2905) sebesar Rp416.278.988.000, dengan realisasi belanja sebesar Rp363.191.199.735.
24. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat (2906) sebesar Rp14.913.818.000, dengan realisasi belanja sebesar Rp14.146.544.842.
25. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial (2907) sebesar Rp4.397.903.000, dengan realisasi belanja sebesar Rp4.026.964.858.
26. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata (2908) sebesar Rp37.021.581.000, dengan realisasi belanja sebesar Rp34.566.102.019.
27. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan (2909) sebesar Rp1.441.782.000, dengan realisasi belanja sebesar Rp1.412.298.251.
28. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (2910) sebesar Rp14.885.562.000, dengan realisasi belanja sebesar Rp12.460.475.596.
29. Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) (2888) sebesar Rp38.991.203.000, dengan realisasi belanja sebesar Rp36.376.564.643.

Pagu belanja kelompok sumber dana PNBPN yang tercatat dalam DIPA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp40.877.918.000 dan selama tahun 2019 terealisasi sebesar Rp35.112.396.649 atau 85,90 dari pagu. Pagu belanja kelompok sumber dana PNBPN merupakan pagu untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain:

1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (2887) sebesar Rp1.763.287.000, dengan realisasi belanja sebesar Rp1.037.261.656.
2. Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) (2888) sebesar Rp5.632.740.000, dengan realisasi belanja sebesar Rp4.508.080.122.
3. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi (2895) sebesar Rp1.964.568.000, dengan realisasi belanja sebesar Rp1.841.309.229.
4. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik (2897) sebesar Rp16.732.948.000, dengan realisasi belanja sebesar Rp14.882.046.544.
5. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat (2906) sebesar Rp4.320.029.000, dengan realisasi belanja sebesar Rp3.292.214.677.
6. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial (2907) sebesar Rp10.464.346.000, dengan realisasi belanja sebesar Rp9.551.484.421.

Pagu belanja kelompok sumber dana Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN) merupakan pagu yang digunakan untuk membiayai kegiatan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi (2895) sebesar Rp2.820.390.000. Realisasi belanja kelompok sumber dana HLDN selama tahun 2019 adalah sebesar Rp2.670.479.500 atau 94,68 persen dari pagu. Pagu belanja ini merupakan hibah dalam bentuk kas/uang dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan diterima oleh BPS Propinsi DKI.

Pagu belanja kelompok sumber dana Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN) yang tercatat dalam DIPA Tahun 2019 sebesar Rp6.384.000.000. Realisasi belanja kelompok sumber dana HLLN selama tahun 2019 adalah sebesar Rp5.954.997.944 atau 93,28 persen dari pagu. Pagu belanja kelompok sumber dana HLLN digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan yang antara lain:

1. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (2905) sebesar Rp3.086.275.000 dan merupakan hibah dari UNFPA. Realisasi belanja selama tahun 2019 sebesar Rp3.000.651.443.
2. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat (2906) sebesar Rp3.297.725.000 merupakan hibah dari UNICEF. Realisasi belanja selama tahun 2019 sebesar Rp2.954.346.501.

Pagu belanja kelompok sumber dana selama tahun 2019 adalah sebesar Rp5.247.071.532.000. Persentase pagu belanja kelompok sumber dana RM dari keseluruhan nilai pagu adalah 99,05 persen atau Rp5.196.989.224.000 yang menjadikan porsi pagu belanja kelompok sumber dana RM adalah yang terbesar. Persentase pagu belanja kelompok sumber dana PNBP adalah 0,78 persen dari keseluruhan pagu atau Rp40.877.918.000. Sedangkan persentase pagu belanja kelompok sumber dana HLLN adalah 0,12 persen atau Rp6.384.000.000 dari nilai keseluruhan pagu. Persentase pagu belanja kelompok sumber dana HLDN adalah 0,05 persen atau sebesar Rp2.820.390.000 dari nilai keseluruhan pagu. Persentase ini menjadikan pagu belanja kelompok sumber dana HLDN memiliki porsi terkecil dari keseluruhan nilai pagu belanja kelompok sumber dana.

Realisasi belanja kelompok sumber dana selama tahun 2019 adalah sebesar Rp4.974.323.553.780. Dalam kelompok sumber dana, realisasi belanja sumber dana RM persentasenya adalah 99,12 persen atau Rp4.930.585.679.687 dari keseluruhan realisasi belanja kelompok sumber dana. Realisasi belanja sumber dana RM mendominasi realisasi belanja kelompok sumber dana. Realisasi belanja sumber dana PNBP memiliki porsi 0,71 persen atau Rp35.112.396.649 dari keseluruhan realisasi belanja kelompok sumber dana. Adapun realisasi belanja sumber dana HLLN, sebagaimana pagu belanjanya, memiliki persentase 0,12 persen atau Rp5.954.997.944 dari nilai keseluruhan realisasi belanja kelompok sumber dana. Realisasi belanja sumber dana HLDN memiliki persentase yang terkecil yaitu 0,05 persen atau Rp2.670.479.500 dari keseluruhan nilai realisasi belanja kelompok sumber dana.

Perbandingan realisasi belanja kelompok sumber dana tahun anggaran 2019 dan 2018 disajikan sebagai berikut.

Tabel 16
Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana Tahun Anggaran 2019 dan 2018

Kode	Sumber Dana	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Rupiah Murni (RM)	4.930.585.679.687	4.324.573.804.435	606.011.875.252	14,01
04	PNBP	35.112.396.649	26.227.593.168	8.884.803.481	33,88
10	Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN)	2.670.479.500	200.000.000	2.470.479.500	1.235,24
11	Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN)	5.954.997.944	3.880.439.883	2.074.558.061	53,46
Jumlah		4.974.323.553.780	4.354.881.837.486	619.441.716.294	14,22

Secara keseluruhan realisasi belanja kelompok sumber dana mengalami kenaikan sebesar 14,22 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran 2018. Kenaikan terjadi pada realisasi belanja sumber dana RM sebesar Rp606.011.875.252 atau sebesar 14,01 persen, sumber dana PNPB sebesar Rp8.884.803.481 atau sebesar 33,88 persen, sumber dana Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN) sebesar Rp2.470.479.500 atau sebesar 1.235,24 persen, dan sumber dana Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN) sebesar Rp2.074.558.061 atau sebesar 53,46 persen. Persentase kenaikan realisasi belanja kelompok sumber dana terbesar terjadi pada realisasi belanja sumber dana Hibah Langsung Dalam Negeri, yaitu 1.235,24 persen.

Realisasi belanja Badan Pusat Statistik selama tahun 2019 dikelompokkan menurut jenis belanja. Kelompok jenis belanja ini berupa Belanja Pegawai dengan kode jenis belanja 51, Belanja Barang dengan kode jenis belanja 52, dan Belanja Modal dengan kode jenis belanja 53. Pagu dan realisasi belanja Badan Pusat Statistik menurut kelompok jenis belanja selama tahun anggaran 2019 disajikan berikut ini.

Tabel 17
Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2019

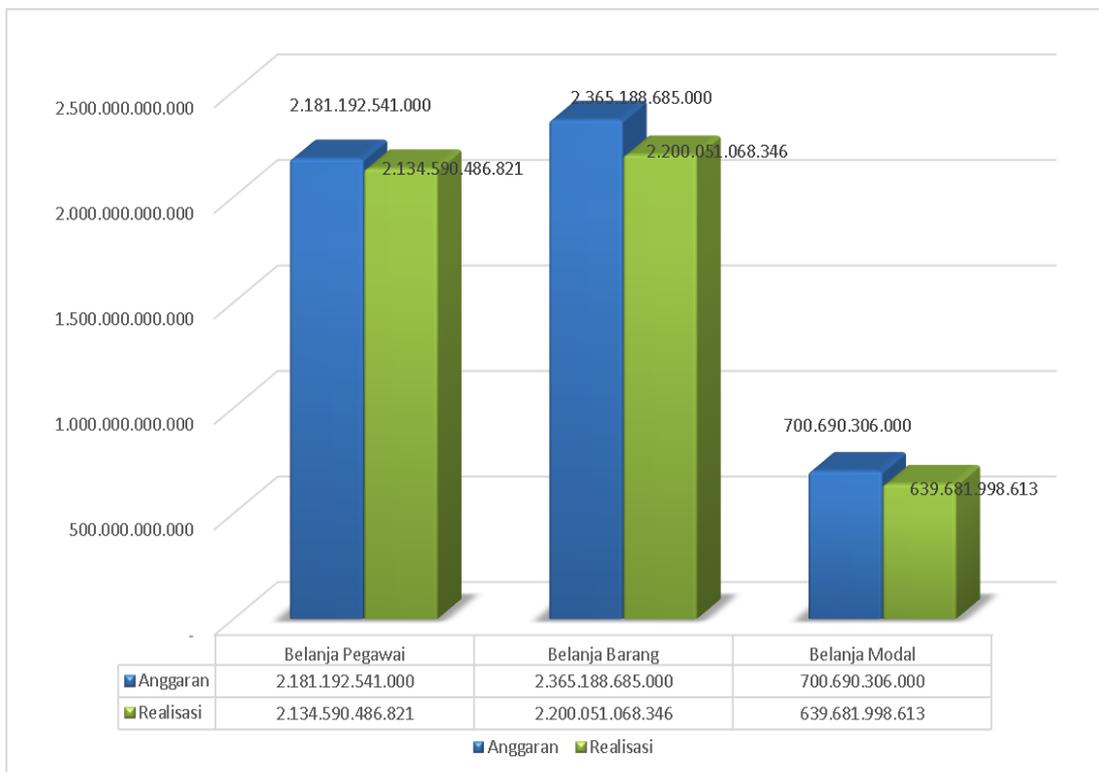
Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)			% Netto
			Bruto	Pengembalian Belanja	Netto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
51	Belanja Pegawai	2.181.192.541.000	2.135.766.594.924	1.176.108.103	2.134.590.486.821	97,86
52	Belanja Barang	2.365.188.685.000	2.202.017.536.240	1.966.467.894	2.200.051.068.346	93,02
53	Belanja Modal	700.690.306.000	639.710.678.748	28.680.135	639.681.998.613	91,29
Jumlah		5.247.071.532.000	4.977.494.809.912	3.171.256.132	4.974.323.553.780	94,80

Pagu dan realisasi belanja Badan Pusat Statistik selama tahun 2019 menurut kelompok jenis belanja, masing-masing sebesar Rp5.247.071.532.000 dan Rp4.974.323.553.780. Komposisi pagu dan realisasi belanja yang terbagi menjadi tiga jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal dari keseluruhan nilai pagu dan realisasi adalah sebagai berikut:

1. Persentase Belanja Pegawai dari keseluruhan nilai pagu adalah 41,57 persen atau senilai Rp2.181.192.541.000, sedangkan persentasenya adalah 42,91 persen atau senilai Rp2.134.590.486.821 dari keseluruhan nilai realisasi belanja.
2. Persentase Belanja Barang dari keseluruhan nilai pagu adalah 45,08 persen atau senilai Rp2.365.188.685.000, sedangkan persentasenya adalah 44,23 persen atau senilai Rp2.200.051.068.346 dari keseluruhan nilai realisasi belanja.
3. Persentase Belanja Modal dari keseluruhan nilai pagu adalah 13,35 persen atau senilai Rp700.690.306.000, sedangkan persentasenya adalah 12,86 persen atau senilai Rp639.681.998.613 dari keseluruhan nilai realisasi belanja.

Persentase pagu dan realisasi belanja barang dari keseluruhan nilai pagu dan realisasi belanja tahun 2019, lebih besar dibandingkan pagu dan realisasi belanja pegawai dan belanja modal. Hal ini dikarenakan belanja barang merupakan sumber pembiayaan operasional kelembagaan selama tahun anggaran berjalan.

Komposisi pagu dan realisasi belanja menurut jenis belanja dapat dilihat dalam grafik berikut:



Grafik 3. Komposisi Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2019

Realisasi belanja menurut jenis belanja selama tahun anggaran 2019 dibandingkan dengan tahun anggaran 2018 seperti tersaji sebagai berikut.

**Tabel 18
Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019 dan 2018**

Kode	Uraian	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
51	Belanja Pegawai	2.134.590.486.821	1.995.459.018.043	139.131.468.778	6,97
52	Belanja Barang	2.200.051.068.346	2.009.571.195.781	190.479.872.565	9,48
53	Belanja Modal	639.681.998.613	349.851.623.662	289.830.374.951	82,84
Jumlah		4.974.323.553.780	4.354.881.837.486	619.441.716.294	14,22

Secara keseluruhan realisasi belanja berdasarkan jenis belanja tahun anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp619.441.716.294 atau sebesar 14,22 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2018.

Realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp139.131.468.778 atau sebesar 6,97 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan realisasi belanja gaji dan tunjangan PNS, belanja lembur, belanja tunjangan khusus, dan belanja pegawai transito.

Realisasi Belanja Barang tahun anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp190.479.872.565 sebesar 9,48 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan realisasi belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja barang persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dalam negeri, dan belanja perjalanan luar negeri.

Realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp289.830.374.951 atau sebesar 82,84 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan pengadaan belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan modal lainnya.

Belanja Pegawai
Rp2.134.590.486.821

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS/ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai Badan Pusat Statistik tahun anggaran 2019 meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS, Belanja Lembur, Belanja Tunjangan Khusus, dan Belanja Pegawai Transito.

Realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp2.134.590.486.821 atau 97,86 persen dari pagunya sebesar Rp2.181.192.541.000. Realisasi Belanja Pegawai netto tahun anggaran 2019 tersebut naik sebesar Rp139.131.468.778 atau 6,97 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018 yang sebesar Rp1.995.459.018.043.

Pagu dan Belanja Pegawai Tahun 2019 tersaji sebagai berikut.

Tabel 19
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Netto
			Bruto	Pengembalian Belanja	Netto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.074.112.106.000	1.047.113.466.223	995.606.114	1.046.117.860.109	97,39
5122	Belanja Lembur	22.069.851.000	18.668.216.392	15.584.100	18.652.632.292	84,52
5124	Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	1.085.010.584.000	1.069.984.912.309	164.917.889	1.069.819.994.420	98,60
Jumlah		2.181.192.541.000	2.135.766.594.924	1.176.108.103	2.134.590.486.821	97,86

Realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.134.590.486.821 dan Rp1.995.459.018.043. Secara umum berdasarkan tabel

perbandingan Belanja Pegawai, realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar 6,97 persen dari realisasi Belanja Pegawai tahun 2018.

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (5111) pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp1.046.117.860.109 atau sebesar 97,39 persen dari anggaran. Realisasi Belanja Lembur (5122) pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp18.652.632.292 atau sebesar 84,52 persen dari anggaran. Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito (5124) pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp1.069.819.994.420 atau sebesar 98,60 persen dari anggaran.

Untuk Tunjangan Khusus yaitu tunjangan kinerja telah dianggarkan pada DIPA masing-masing satker pada tahun 2019. Kenaikan realisasi Belanja Pegawai disebabkan oleh:

1. Adanya penambahan pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berasal dari lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Statistika STIS sebanyak 507 orang dengan TMT tanggal 1 Januari 2019.
2. Adanya penambahan pegawai CPNS yang berasal dari penerimaan jalur umum sebanyak 313 orang dengan TMT tanggal 1 Maret 2019.
3. Adanya perubahan *grade* tunjangan kinerja sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 46 Tahun 2019.
4. Adanya kenaikan Tunjangan Kinerja sampai dengan 80 persen.
5. Adanya kenaikan tunjangan fungsional tertentu Statistisi, Pranata Komputer, Arsiparis, dan Penyuluh Hukum.
6. Adanya kenaikan pangkat dan golongan serta kenaikan gaji berkala (KGB) yang menjadi penopang belanja pegawai khususnya pada belanja gaji pokok.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Pegawai disajikan sebagai berikut.

Tabel 20
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 dan 2018

Kode	Uraian	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.047.113.466.223	979.701.047.112	67.412.419.111	6,88
5122	Belanja Lembur	18.668.216.392	19.149.990.600	(481.774.208)	(2,52)
5124	Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	1.069.984.912.309	997.634.112.847	72.350.799.462	7,25
Realisasi Belanja Bruto		2.135.766.594.924	1.996.485.150.559	139.281.444.365	6,98
<i>Pengembalian Belanja</i>		1.176.108.103	1.026.132.516	149.975.587	14,62
Realisasi Belanja Netto		2.134.590.486.821	1.995.459.018.043	139.131.468.778	6,97

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (5111) pada tahun anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp67.412.419.111 atau sebesar 6,88 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran 2018. Realisasi Belanja Lembur (5122) pada tahun anggaran 2019 mengalami penurunan sebesar Rp481.774.208 atau sebesar 2,52 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran 2018. Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito (5124) pada tahun anggaran

2019 mengalami kenaikan sebesar Rp72.350.799.462 atau sebesar 7,25 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran 2018.

Jumlah realisasi Belanja Pegawai pada tabel di atas merupakan nilai netto, yaitu nilai bruto tahun anggaran 2019 sebesar Rp2.135.766.594.924 dikurangi dengan pengembalian Belanja Pegawai sebesar Rp1.176.108.103, yang terdiri dari pengembalian belanja gaji pokok PNS, pembulatan gaji PNS, belanja tunjangan suami/istri PNS, tunjangan anak PNS, tunjangan struktural PNS, tunjangan fungsional PNS, tunjangan PPH PNS, tunjangan beras PNS, kelebihan uang makan PNS, tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil PNS, tunjangan umum PNS, dan uang lembur. Sedangkan untuk tahun anggaran 2018 nilai brutonya adalah sebesar Rp1.996.485.150.559 dikurangi dengan pengembalian Belanja Pegawai sebesar Rp1.026.132.516.

Realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2019 seluruhnya bersumber dari sumber dana Rupiah Murni.

Belanja Barang
Rp2.200.051.068.346

B.2.2 Belanja Barang

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Realisasi Belanja Barang untuk tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp2.200.051.068.346 atau 93,02 persen dari anggarannya sebesar Rp2.365.188.685.000. Secara rinci pagu dan realisasi Belanja Barang tahun anggaran 2019 tersaji sebagai berikut.

Tabel 21
Pagu dan Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2019

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Netto
			Bruto	Pengembalian Belanja	Netto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5211	Belanja Barang Operasional	235.898.450.000	213.940.439.995	42.523.016	213.897.916.979	90,67
5212	Belanja Barang Non Operasional	706.566.546.000	661.070.821.920	357.782.402	660.713.039.518	93,51
5218	Belanja Barang Persediaan	115.215.198.000	103.881.632.456	1.733.000	103.879.899.456	90,16
5221	Belanja Jasa	129.259.368.000	117.256.585.815	25.185.205	117.231.400.610	90,69
5231	Belanja Pemeliharaan	142.588.578.000	127.055.042.845	71.420.045	126.983.622.800	89,06
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.030.492.568.000	973.906.373.715	1.428.748.426	972.477.625.289	94,37
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	5.167.977.000	4.906.639.494	39.075.800	4.867.563.694	94,19
Jumlah		2.365.188.685.000	2.202.017.536.240	1.966.467.894	2.200.051.068.346	93,02

Realisasi belanja barang (netto) sebesar Rp2.200.051.068.346 berasal dari Belanja Barang (bruto) sebesar Rp2.202.017.536.240 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp1.966.467.894 yang terdiri dari pengembalian belanja keperluan perkantoran, belanja penambah daya tahan tubuh, belanja pengiriman surat dinas pos, belanja honor operasional, belanja bahan, belanja honor output kegiatan, belanja barang persediaan konsumsi, belanja jasa profesi, belanja langganan listrik, belanja langganan telepon, belanja langganan air, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja perjalanan biasa, belanja perjalanan dinas dalam kota, belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota, belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota, belanja perjalanan biasa – luar negeri, dan belanja perjalanan lainnya luar negeri.

Realisasi belanja tahun anggaran 2019 naik sebesar Rp190.479.872.565 atau 9,48 persen dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar Rp2.009.571.195.781. Hal ini disebabkan oleh adanya kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilayah Kerja Statistik SP2020 mulai dari Pelatihan Petugas Pemetaan sampai dengan pelaksanaan lapangan Pemetaan dan Pemutakhiran Wilayah Kerja Statistik SP2020 yang dilaksanakan pada Tahun 2019.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Barang disajikan sebagai berikut.

Tabel 22
Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2019 dan 2018

Kode	Uraian	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5211	Belanja Barang Operasional	213.940.439.995	185.325.070.989	28.615.369.006	15,44
5212	Belanja Barang Non Operasional	661.070.821.920	634.523.902.736	26.546.919.184	4,18
5218	Belanja Barang Persediaan	103.881.632.456	60.411.990.468	43.469.641.988	71,96
5221	Belanja Jasa	117.256.585.815	91.210.525.817	26.046.059.998	28,56
5231	Belanja Pemeliharaan	127.055.042.845	119.018.295.670	8.036.747.175	6,75
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	973.906.373.715	918.962.887.317	54.943.486.398	5,98
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	4.906.639.494	5.330.812.613	424.173.119	(7,96)
Realisasi Belanja Bruto		2.202.017.536.240	2.014.783.485.610	187.234.050.630	9,29
<i>Pengembalian Belanja</i>		1.966.467.894	5.212.289.829	3.245.821.935	(62,27)
Realisasi Belanja Netto		2.200.051.068.346	2.009.571.195.781	190.479.872.565	9,48

Jumlah realisasi Belanja Barang pada tabel di atas merupakan nilai netto, yaitu nilai bruto tahun anggaran 2019 sebesar Rp2.202.017.536.240 dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp1.966.467.894. Sedangkan tahun anggaran 2018 nilai brutonya adalah sebesar Rp2.014.783.485.610 dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp5.212.289.829.

Realisasi Belanja Barang selama tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Barang Operasional (5211) digunakan untuk pembayaran belanja keperluan perkantoran, belanja penambah daya tahan tubuh, belanja pengiriman surat dinas pos pusat, belanja honor operasional satuan kerja, dan belanja operasional lainnya.
2. Belanja Barang Non Operasional (5212) digunakan untuk pembayaran belanja bahan, belanja honor *output* kegiatan, dan belanja non operasional lainnya.
3. Belanja Barang Persediaan (5218) digunakan untuk pengadaan persediaan barang-barang konsumsi seperti ATK, kertas, bahan cetak, *booklet*, dan lain-lain.
4. Belanja Jasa (5221) digunakan untuk pembayaran belanja langganan listrik, belanja langganan telepon, belanja langganan air, dan belanja jasa profesi.
5. Belanja Pemeliharaan (5231) digunakan untuk pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, dan belanja barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin.
6. Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241) digunakan untuk pembayaran belanja perjalanan biasa, belanja perjalanan dinas dalam kota, belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota, dan belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota.
7. Belanja Perjalanan Luar Negeri (5242) digunakan untuk pembayaran belanja perjalanan biasa – luar negeri dan belanja perjalanan lainnya – luar negeri sebagai berikut:
 - a. *The Statistics Course on 'Infographics'* di Brunei Darussalam.
 - b. *The Open Group Awards for Innovation and Excellence* di India.
 - c. *Regional Workshop on State of Land Right and Land Governance in Eight Asian Countries* di Thailand.
 - d. *The Fiftieth Session of The UNSC and Related Special Events* di Amerika Serikat.
 - e. *Australia Awards Short Term Award (STA)* di Australia.
 - f. *The Regional Training Workshop on SDG Data Disaggregation Using Big Data* di Thailand.
 - g. *The Regional Workshop on The 2020 World Programme on Population and Housing Censuses: International Standards and Contemporary Technologies* di Turki.
 - h. *Regional Meeting on Mobilizing Political Will to Create An Enabling Environment and Ensuring Mutual Accountability and Monitoring For Sanitation and Water for All in East Asia and Pacific Region* di Thailand.
 - i. Tugas Belajar “*Phd Researcher of The Campus Fryslan to University of Grningen*” ke Belanda.
 - j. *Regional Technical Evaluation and Review Workshop for the 2017 International Comparison Program (ICP) for Asia and the Pacific (RDTA 9238)* di Thailand.

- k. *Regional Training Course on Big Data for Sustainable* di Korea.
- l. *Regional Workshop on The ACSS Open Data Implementation Frame Work and Big Data for Enchancing The ACSS Official Statistics* di Singapura.
- m. *Study Visits on Business Characteristics Survey* di Australia.
- n. *Study Visits on Talent Management* di Australia.
- o. *Regional Training Course on Big Data for Sustainable Development* di Korea.
- p. *Workshop on Accountable Governance for Productivity Growth and Competitieves* di Bangladesh.
- q. *The 5th International Conference on Big Data for Official Statistics* di Rwanda.
- r. *Capacity Building Workshop and The 6Th APEC TIVA Technical Group Meeting* di Chile.
- s. *The Global Burden of Disease Technical Workshop* di Yunani.
- t. *Course on Price Statistics in English Washington DC* di New York.
- u. *Invitation to Become a Member of The Friends of The Chair (FOC) Group on Economic Statistics - Indonesia* di Amerika Serikat.
- v. *The 2nd Consultative Workshop on SDG Indicator* di Turki.
- w. *The 2nd Meeting of the UN Committee of Experts on Business and Trade Statistics (UNCEBTS)* di New York.
- x. *14th Meeting of The United Nations Committee of Experts on Environmental Economic Accounting and The 2019 Forum of Experimental Ecosystem Accounting* di New York.
- y. *Strengthening Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) Forum in Korea* di Korea Selatan.
- z. *The Regional Workshop on International Merchandise Trade Statistics* di Afrika Selatan.
- aa. *Study Visits to KOSTAT* di Korea Selatan.
- bb. *UN Expert Group Meeting in Improving Migration Data* di New York.
- cc. *International Workshop on Innovation Statistics* di China.
- dd. *High-Level Political Forum* di New York.
- ee. *5th Meeting of The Working Group on The International Merchandise Trade Statistics* di Bangkok.
- ff. *Symposium of Data Science and Official Statistics and The 62nd ISI WSC* di Kuala Lumpur.
- gg. *The Second Meeting of The Regional Steering Group on Population and Social Statistics (RSG-PSS)* di Bangkok.

- hh. *6th Meeting of The ASEAN WGSITS* di Brunei Darussalam.
- ii. *WGSDI2* di Bangkok.
- jj. *The Second Meeting of The Regional Advisory Board (RAB)* di Bangkok.
- kk. *Expert Group Meeting and Workshop on Population and Housing Censuses* di Swiss.
- ll. *Regional Training on International Merchandise Trade Statistics (IMTS) 2010 Manual* di Vietnam.
- mm. *Conference HR Transformation* di UN ECE di Swiss.
- nn. *The Fifth Meeting of Focal Specialist ILMS Tahun 2019* di Bangkok.
- oo. *Mr. Nobuo Ishibashi Memorial Program Tokyo* di Tokyo.
- pp. *Expert Meeting Statistics on Gender and The Government* di Bangkok.
- qq. *Briefing Pack: Tourism Satellite Accounts* di Australia.
- rr. *The 8th BITAS Executive Series 2019* di Tokyo.
- ss. *ICP Workshop* di China.
- tt. *5th China-ASEAN Statistics Forum* di China.
- uu. *3rd Meeting of ASEAN WGSNA* di Bangkok.
- vv. *Policy Benchmarking for Digital Government Transformation and Data* di Seoul.
- ww. *Course on SDGs Indicators: Measuring Decent Work Using Microdata from Labour Force Surveys* di Tokyo.
- xx. *Regional Workshop on Compiling SDG Indicator for The 2030 Agenda for Sustainable Development* di Vietnam.
- yy. *8th Session of The OIC-Statistical Commission* di Turki.
- zz. *Thirteenth Meeting of The Advisory Expert Group on Nation Accounts* di NY.
- aaa. *9th Session of The ASEAN Community Statistical System Committee* di Bangkok.
- bbb. *Regional Capacity Development Workshop on Farm Survey Based SDG Indicators* di Chiba.
- ccc. *2020 World Programme on Population and Housing Censuses and Contemporary Technologies* di India.
- ddd. *Knowledge Exchange Visit* di Tartu di Estonia.
- eee. *International Symposium on The Use of Big Data for Official Statistics* di Hangzhou.

Belanja Modal
Rp639.681.998.613

B.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap atau Aset Lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp639.681.998.613 atau 91,29 persen dari pagunya sebesar Rp700.690.306.000. Realisasi tahun anggaran 2019 naik sebesar Rp289.830.374.950 atau 82,84 persen dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2018 sebesar Rp349.851.623.662.

Secara rinci pagu dan realisasi Belanja Modal selama tahun anggaran 2019 disajikan sebagai berikut.

Tabel 23
Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Netto
			Bruto	Pengembalian Belanja	Netto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5311	Belanja Modal Tanah	13.006.871.000	12.863.868.840	0	12.863.868.840	98,90
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	376.344.195.000	342.283.321.937	0	342.283.321.937	90,95
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	125.175.502.000	121.420.456.571	(28.680.135)	121.391.776.436	96,98
5361	Belanja Modal Lainnya	186.163.738.000	163.143.031.400	0	163.143.031.400	87,63
Jumlah		700.690.306.000	639.710.678.748	(28.680.135)	639.681.998.613	91,29

Perbandingan realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2019 dan 2018 disajikan sebagai berikut.

Tabel 24
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 dan 2018

Kode	Uraian	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5311	Belanja Modal Tanah	12.863.868.840	1.171.415.000	11.692.453.840	998,15
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	342.283.321.937	186.982.510.768	155.300.811.169	83,06
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	121.420.456.571	114.260.450.155	7.160.006.416	6,27
5361	Belanja Modal Lainnya	163.143.031.400	47.463.789.288	115.679.242.112	243,72
Realisasi Belanja Bruto		639.710.678.748	349.878.165.211	289.832.513.537	82,84
<i>Pengembalian Belanja</i>		28.680.135	26.541.549	2.138.586	8,06
Realisasi Belanja Netto		639.681.998.613	349.851.623.662	289.830.374.951	82,84

Jumlah realisasi Belanja Modal pada tabel diatas merupakan nilai netto, yaitu nilai bruto tahun anggaran 2019 sebesar Rp639.710.678.748 dikurangi dengan pengembalian Belanja Modal sebesar Rp28.680.135. Sedangkan tahun anggaran 2018 nilai brutonya adalah sebesar Rp349.878.165.211 dikurangi dengan pengembalian Belanja Modal sebesar Rp26.541.549.

Belanja Modal Tanah **B.2.3.1 Belanja Modal Tanah**
Rp12.863.868.840

Realisasi Belanja Modal Tanah tahun anggaran 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp12.863.868.840 dan Rp1.171.415.000. Realisasi Belanja Modal Tanah mengalami kenaikan sebesar 998,15 persen dibandingkan tahun anggaran 2018.

Secara rinci realisasi Belanja Modal Tanah berdasarkan lokasi dan peruntukannya disajikan sebagai berikut.

Tabel 25
Realisasi Belanja Modal Tanah Berdasarkan Lokasi dan Peruntukannya
Tahun Anggaran 2019

No.	Lokasi	Nilai Realisasi (Rp)	Peruntukan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BPS Kabupaten Pulau Morotai	354.000.000	Pembelian Tanah
2.	BPS Provinsi Kalimantan Utara	6.593.740.000	Pembelian Tanah
3.	BPS Kabupaten Musi Rawas	125.000.000	Pembelian Tanah
4.	BPS Kabupaten Ende	1.690.198.840	Pembelian Tanah
5.	BPS Kota Banjar	2.371.500.000	Pembelian Tanah
6.	BPS Kabupaten Bengkulu Tengah	859.400.000	Pembelian Tanah
7.	BPS Kota Banjar	28.600.000	Honor Tim Tanah
		4.430.000	Perjalanan Pengadaan Tanah
8.	BPS Kabupaten Sarmi	837.000.000	Pengurusan dan Pematangan Tanah
Jumlah		12.863.868.840	

Perbandingan realisasi Belanja Modal Tanah tahun anggaran 2019 dan 2018 disajikan sebagai berikut.

Tabel 26
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
Tahun Anggaran 2019 dan 2018

Kode	Uraian	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
531111	Belanja Modal Tanah	11.993.838.840	655.565.000	11.338.273.840	1.729,54
531113	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	28.600.000	0	28.600.000	0,00
531115	Belanja Modal Pengurusan dan Pematangan Tanah	837.000.000	515.850.000	321.150.000	62,26
531117	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	4.430.000	0	4.430.000	0,00
Realisasi Belanja Bruto		12.863.868.840	1.171.415.000	11.692.453.840	998,15
<i>Pengembalian Belanja</i>		0	0	0	0,00
Realisasi Belanja Netto		12.863.868.840	1.171.415.000	11.692.453.840	998,15

Jumlah realisasi Belanja Modal Tanah pada tabel di atas merupakan nilai netto, yaitu nilai bruto tahun anggaran 2019 sebesar Rp12.863.868.840 dikurangi dengan pengembalian Belanja Modal Tanah sebesar Rp0. Sedangkan tahun anggaran 2018 nilai brutonya adalah sebesar Rp1.171.415.000 dikurangi dengan pengembalian Belanja Modal Tanah sebesar Rp0.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin **B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**
Rp342.283.321.937

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp342.283.321.937 dan Rp186.981.170.768. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar 83,06 persen dibandingkan realisasi tahun 2018. Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk pengadaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2, tablet beserta kelengkapannya, PC dan *notebook*, *printer*, solar panel/listrik tenaga surya, pemanas ruangan, perangkat keras pendukung *Data Management System*, perangkat pengelola dan pengamanan *secure sockets layer (SSL) Data Center*, penambahan perangkat *blade* untuk *existing load balancer data center*, perangkat penangkal *distributed denial of service (DDOS)*, *moisture tester*, alat *Automated External Defibrillator (AED)*, alat perekam suara, *workstation* pemetaan dan publikasi BPS Provinsi, pembelian antivirus, perangkat *firewall data center*, pengadaan meja saji ruang rapat, *wireless*, dispenser, *projector*, dispenser ruang rapat dan penambahan *server* pendukung *desktop as a Service (DaaS)*, alat ubinan dan timbangan, penambahan perangkat *blade* untuk *Load Balancer* di DC, perangkat *Application Delivery Controller (ADC) DRC*, perangkat *Network Switch* untuk *Server BPS SMART Service* dan Platform Kolaborasi Terpadu, perangkat Pemindai Dokumen Berkecepatan Tinggi untuk BPS Provinsi, perangkat pengujian jalur jaringan, perangkat *server* untuk Platform Kolaborasi Terpadu, perangkat *server*, UPS, Lisensi Sistem Operasi Standar, dan Lisensi Sistem *Database* Standar Pengolahan SP2020 untuk BPS Provinsi Kalimantan Utara, *wireless presentation system*, *wireless presentation system*, *server database* pendukung sistem infrastruktur terintegrasi, perangkat penangkal *distributed denial of service (DDOS) Data Center*, pembayaran termin IV untuk pemeliharaan perangkat pendukung DC dan DRC, pengadaan Desktop PC dan UPS untuk Pendukung Pengolahan BPS Pusat, Provinsi, dan Kabupaten, *air conditioner (AC)*, lemari besi/metal, kursi besi/metal, *genset*, alat pemadam kebakaran, telepon PABX, dan lain lain.

Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2019 dan 2018 disajikan sebagai berikut.

Tabel 27
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2019 dan 2018

Kode	Uraian	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	342.152.581.489	185.777.038.529	156.375.542.960	84,17
532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	0	3.300.000	(3.300.000)	0,00
532118	BM Perjalanan Peralatan dan Mesin	15.429.058	22.195.600	(6.766.542)	(30,49)
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	115.311.390	1.179.976.639	(1.064.665.249)	(90,23)
Realisasi Belanja Bruto		342.283.321.937	186.982.510.768	155.300.811.169	83,06
<i>Pengembalian Belanja</i>		0	1.340.000	1.340.000	0,00
Realisasi Belanja Netto		342.283.321.937	186.981.170.768	155.302.151.169	83,06

Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tabel diatas merupakan nilai netto, yaitu nilai bruto tahun anggaran 2019 sebesar Rp342.283.321.937 dikurangi dengan pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp0. Sedangkan tahun anggaran 2018 nilai brutonya adalah sebesar Rp186.982.510.768 dikurangi dengan pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.340.000.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Rp121.391.776.436

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp121.391.776.436 dan Rp114.235.248.606. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar 6,26 persen dibandingkan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2018. Realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2019 digunakan untuk pengadaan antara lain:

1. Pembelian rumah dinas di BPS Kota Banda Aceh, BPS Provinsi Riau, BPS Kota Salatiga, BPS Kabupaten Gresik, BPS Kabupaten Mojokerto, BPS Kabupaten Trenggalek, BPS Kota Malang, BPS Kota Probolinggo, BPS Kabupaten Pamekasan, BPS Kabupaten Serang, BPS Provinsi Kalimantan Utara, dan BPS Kota Jayapura.
2. Perluasan gedung kantor di BPS Kabupaten Bungo, BPS Kabupaten Muara Enim, BPS Kabupaten Musi Rawas, BPS Kota Bogor, dan BPS Kabupaten Gunung Kidul.
3. Revitalisasi gedung kantor di BPS Kabupaten Aceh Singkil, BPS Kabupaten Banyuasin, BPS Kabupaten Lampung Barat, BPS Kabupaten Belitung, BPS Kota Tasikmalaya, BPS Kabupaten Lombok Utara, BPS Kabupaten Ende, BPS Kabupaten Lembata, BPS Kabupaten Sintang, BPS Kabupaten Murung Raya, BPS Kabupaten Tojo Una-Una, BPS Kabupaten Lombok Timur, BPS Kabupaten Timor Tengah Utara, BPS Kota Kupang, BPS Kabupaten Sintang, dan BPS Kabupaten Buru.
4. Pembangunan rumah dinas di BPS Kabupaten Tana Tidung, BPS Kabupaten Buru,

dan BPS Kabupaten Keerom.

5. Rehabilitasi rumah dinas di BPS Provinsi Sumatera Selatan, BPS Kabupaten Garut, dan BPS Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Pembangunan gedung kantor di BPS Kabupaten Karo, BPS Jakarta Pusat, BPS Kabupaten Padang Pariaman, BPS Kabupaten Pasaman, BPS Kabupaten Salatiga, BPS Kabupaten Bondowoso, BPS Kota Blitar, BPS Kota Banjar Baru, BPS Kabupaten Gowa, BPS Kabupaten Asmat, dan BPS Kabupaten Sorong.
7. Pemagaran gedung kantor di BPS Kabupaten Pidie Jaya, BPS Kabupaten Kerinci, BPS Kabupaten Buton Utara, dan BPS Kabupaten Mappi.
8. Rehabilitasi gedung kantor di BPS Kabupaten Aceh Besar, BPS Kabupaten Aceh Tenggara, BPS Kabupaten Aceh Jaya, BPS Kabupaten Pakpak Barat, BPS Provinsi Bengkulu, BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS Kabupaten Karangasem, BPS Kabupaten Kubu Raya, BPS Kota Bitung, BPS Provinsi Sulawesi Tengah, BPS Kabupaten Kolaka, BPS Kabupaten Bungo, BPS Provinsi Papua, BPS Kota Bogor, dan BPS Kabupaten Raja Ampat.
9. Tunggakan pembangunan gedung tahun anggaran 2018 di BPS Kota Jakarta Barat, BPS Kota Jakarta Selatan, BPS Kota Jakarta Timur, dan BPS Kota Jakarta Pusat.
10. Pemagaran rumah dinas di BPS Kabupaten Soppeng.
11. Revitalisasi rumah dinas di BPS Kota Pangkal Pinang, BPS Kabupaten Bulungan, dan BPS Kabupaten Donggala.
12. Konstruksi Rehabilitasi Mekanikal dan Elektrikal di BPS Pusat.
13. Renovasi Ruang Serba Guna Gedung 5 lantai 8 dan Ruang Rapat Gedung 3 Lantai 2 BPS.

Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2019 dan 2018 disajikan sebagai berikut.

Tabel 28
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Tahun Anggaran 2019 dan 2018

Kode	Uraian	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.655.630.935	95.160.482.785	(4.504.851.850)	(4,73)
533112	Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	0	6.630.000	(6.630.000)	0,00
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	95.141.400	654.411.505	(559.270.105)	(85,46)
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	1.383.411.500	4.942.831.597	(3.559.420.097)	(72,01)
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	78.825.537	305.589.986	(226.764.449)	(74,21)
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	29.207.447.199	13.190.504.282	16.016.942.917	121,43
Realisasi Belanja Bruto		121.420.456.571	114.260.450.155	7.160.006.416	6,27
<i>Pengembalian Belanja</i>		28.680.135	25.201.549	3.478.586	13,80
Realisasi Belanja Netto		121.391.776.436	114.235.248.606	7.156.527.830	6,26

Jumlah realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tabel diatas merupakan nilai netto, yaitu nilai bruto tahun anggaran 2019 sebesar Rp121.420.456.571 dikurangi dengan pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp28.680.135 yang terdiri dari pengembalian belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp26.466.221, belanja modal perencanaan dan pengawasan gedung dan bangunan sebesar Rp1.863.419, dan belanja penambahan nilai gedung dan bangunan sebesar Rp350.495. Sedangkan sampai dengan tahun anggaran 2018 nilai brutonya adalah sebesar Rp114.260.450.155 dikurangi dengan pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp25.201.549.

Rincian pengembalian belanja modal selama tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

No	Uraian Pengembalian	Nilai Realisasi (Rp)	Satker
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengembalian Belanja Modal gedung dan Bangunan	3.000.000	BPS Kab. Lembata
2.	Pengembalian Belanja Modal gedung dan Bangunan	60.000	BPS Kab. Lampung Barat
3.	Pengembalian Belanja Modal gedung dan Bangunan	3.885.661	BPS Kota Tasikmalaya
4.	Pengembalian Belanja Modal gedung dan Bangunan	1.210.000	BPS Kota Salatiga
5.	Pengembalian Belanja Modal gedung dan Bangunan	18.010.560	BPS Kab. Murung Raya
6.	Pengembalian Belanja Modal gedung dan Bangunan	300.000	BPS Kab. Asmat
7.	Pengembalian Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	350.495	BPS Provinsi Jawa Tengah

8.	Pengembalian Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	1.863.419	BPS Provinsi Sulawesi Barat
Jumlah		28.680.135	

Belanja Modal Lainnya
Rp163.143.031.400

B.2.3.4 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya tahun anggaran 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp163.143.031.400 dan Rp47.463.789.288. Realisasi Belanja Modal Lainnya tahun anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar 243,72 persen dibandingkan realisasi Belanja Modal Lainnya tahun anggaran 2018. Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2019 digunakan untuk pengadaan Sistem Operasi Pendukung *Data Management System (DMS)*, lisensi Sistem Operasi dan Pengelolaannya untuk *Server Platform Kolaborasi Terpadu*, lisensi Sistem Operasi Server dan Database SP 2020 di DC, lisensi Sistem Operasi *Server dan Database SP2020* di DRC, *transceiver 40 GB*, pengembangan platform BPS SMART Service, piranti lunak pendukung *IT Service Management*, penambahan lisensi ArcGIS Desktop untuk 8 Provinsi, pekerjaan jasa konsultan *Geospatial System*, pengadaan jasa konsultan *Operational Management System*, pengadaan jasa konsultan *Integrated Processing System*, pengadaan jasa konsultan *Integrated Dissemination System*, pengadaan lisensi Aplikasi Perkantoran Pendukung Kegiatan Operasional SP2020, pengadaan lisensi Sistem Database untuk Pengolahan SP2020 di BPS Provinsi, pengadaan lisensi Sistem Operasi dan Pengelolaannya untuk *Server Platform Kolaborasi Terpadu*, pengadaan Solusi Pemantauan Kinerja Sistem dan Aplikasi, pengadaan Solusi Pengelolaan Keamanan untuk Evaluasi Kerentanan Perangkat dan Pengujian Keamanan Aplikasi, jasa konsultan *Macro Analysis System*, dan penambahan lisensi *Data Capture*.

Realisasi Belanja Modal Lainnya tahun anggaran 2019 dan 2018 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 29
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
Tahun Anggaran 2019 dan 2018

Kode	Uraian	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
536111	Belanja Modal Lainnya	163.143.031.400	47.463.789.288	115.679.242.112	243,72
Realisasi Belanja Bruto		163.143.031.400	47.463.789.288	115.679.242.112	243,72
	<i>Pengembalian Belanja</i>	0	0	0	0,00
Realisasi Belanja Netto		163.143.031.400	47.463.789.288	115.679.242.112	243,72

Jumlah realisasi Belanja Modal Lainnya pada tabel diatas merupakan nilai netto, yaitu nilai bruto tahun anggaran 2019 sebesar Rp163.143.031.400 dikurangi dengan pengembalian Belanja Modal Lainnya sebesar Rp0. Sedangkan tahun anggaran 2018 nilai brutonya adalah sebesar Rp47.463.789.288 dikurangi dengan pengembalian Belanja Modal Lainnya sebesar Rp0.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET

Aset Lancar

Rp99.242.854.995

C.1.1 Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp99.242.854.995 dan Rp43.616.512.734. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Neraca BPS per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel 30.

Tabel 30
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No.	Uraian	31-Des-19 (Rp)	31-Des-18 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	60.431.458	262.099.491
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0	80.000
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	1.211.662.100	8.573.176.162
4	Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	3.790.809.575	1.616.040.032
5	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	9.623.499	11.190.198
6	Piutang Bukan Pajak	9.237.728.594	2.621.948.090
7	Penyisihan Piutang Bukan Pajak	(90.609.491)	(57.584.671)
8	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	24.609.633.188	19.710.338.388
9	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	(18.122.541.878)	(18.330.000.346)
10	Persediaan	78.536.117.950	29.209.225.390
	Jumlah	99.242.854.995	43.616.512.734

Kas di Bendahara
Pengeluaran

Rp60.431.458

C.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp60.431.458 dan Rp262.099.491, yang merupakan saldo kas/bank yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan). Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat berdasarkan nilai nominal dan disajikan dalam nilai rupiah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca per 31 Desember 2019 berupa dana sisa TUP yang belum disetorkan ke Kas Negara.

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran untuk masing-masing wilayah/satker adalah tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 31
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-19 (Rp)	31-Des-18 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	0	262.099.312	(262.099.312)
2	DKI Jakarta	24.049.458	0	24.049.458
3	Jawa Barat	14.472.000	0	14.472.000
4	Maluku	0	179	(179)
5	Sulawesi Tengah	16.762.000	0	16.762.000
6	Gorontalo	5.148.000	0	5.148.000
Jumlah		60.431.458	262.099.491	(201.668.033)

Rincian jenis Kas di Bendahara Pengeluaran dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk rekening untuk masing-masing satker/wilayah adalah disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 32
Rincian Jenis Kas di Bendahara Pengeluaran

No.	Nama Wilayah	Nama Satker	Tunai (Rp)	Saldo Bank		Total (Rp)
				Saldo (Rp)	No. Rekening	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	DKI JAKARTA	JAKARTA PUSAT	24.000.000	0	BRI-050401000093306	24.000.000
		KABUPATEN ADM. KEP. SERIBU	49.458	0	BRI-026101000440301	49.458
2	JAWA BARAT	KOTA DEPOK	14.472.000	0	Mandiri - 1570005487427	14.472.000
3	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BANGGAI	16.762.000	0	BRI-016701001092301	16.762.000
4	GORONTALO	KABUPATEN BONE BOLANGO	5.148.000	0	BRI-002701001213305	5.148.000
Jumlah			60.431.458	0		60.431.458

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 senilai Rp60.431.458 telah disetorkan ke Kas Negara pada tahun 2020. Rincian setoran Kas di Bendahara Pengeluaran adalah tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 33
Rincian Setoran Kas di Bendahara Pengeluaran

No.	Nama Wilayah	Nama Satker	Tgl Setor	NTPN/Billing	Penyetoran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	DKI JAKARTA	JAKARTA PUSAT	8 Januari 2020	3D8120N988S0LM56	24.000.000
		KABUPATEN ADM. KEP. SERIBU	7 Januari 2020	2E8AA2G4UJOPEEHQ	49.458
2	JAWA BARAT	KOTA DEPOK	7 Januari 2020	8DD1E0N9UUS0HIFQ	14.472.000
3	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BANGGAI	9 Januari 2020	34D896U8DOSPKBT7	16.762.000
4	GORONTALO	KABUPATEN BONE BOLANGO	3 Januari 2020	96184-02/2020/800157	5.148.000
Jumlah					60.431.458

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp80.000. Jumlah Saldo Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini juga mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan selaku Wajib Pungut yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal neraca.

Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan untuk masing-masing wilayah/satker adalah tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 34
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-19 (Rp)	31-Des-18 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	0	4.000	(4.000)
2	Sumatera Barat	0	6.000	(6.000)
3	Sulawesi Tenggara	0	70.000	(70.000)
Jumlah		0	80.000	(80.000)

Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp1.211.662.100

C.1.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp1.211.662.100 dan Rp8.573.176.162. Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik itu saldo yang merupakan saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai serta belanja hibah yang masih dalam bentuk SPJ yang belum disahkan oleh KPPN. Kas Lainnya dan Setara Kas dicatat berdasarkan nilai nominal dan disajikan dalam nilai rupiah.

Daftar saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per wilayah/satker adalah tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 35
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-19 (Rp)	31-Des-18 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	964.766.617	7.934.515.616	(6.969.748.999)
2	Pusdiklat	0	95.000	(95.000)
3	DKI Jakarta	0	19.124.303	(19.124.303)
4	Jawa Barat	11.657.850	0	11.657.850
5	Jawa Tengah	844.350	0	844.350
6	Jawa Timur	2.584.610	477.713.830	(475.129.220)
7	Aceh	0	47.250.450	(47.250.450)
8	Sumatera Utara	935.681	0	935.681
9	Sumatera Barat	185.000	11.192.750	(11.007.750)
10	Sumatera Selatan	971	0	971
11	Lampung	135.289.150	75.765.763	59.523.387

12	Kalimantan Barat	0	770.600	(770.600)
13	Kalimantan Selatan	140.200	0	140.200
14	Kalimantan Timur	558.604	0	558.604
15	Sulawesi Utara	2.624	0	2.624
16	Sulawesi Tengah	464.000	0	464.000
17	Sulawesi Selatan	18.984	2.243.250	(2.224.266)
18	Sulawesi Tenggara	325	0	325
19	Maluku Utara	0	4.500.000	(4.500.000)
20	Bangka Belitung	0	4.600	(4.600)
21	Nusa Tenggara Barat	97.812	0	97.812
22	Papua	11.520	0	11.520
23	Gorontalo	15.350.901	0	15.350.901
24	Papua Barat	78.697.638	0	78.697.638
25	Kalimantan Utara	55.263	0	55.263
Jumlah		1.211.662.100	8.573.176.162	(7.361.514.062)

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2019 dijelaskan sebagai berikut.

		Settama	Daerah	Total
1.	Belanja barang yang belum dibayarkan ke pihak ketiga	Rp 0	79.054.138	79.054.138
2.	Belanja yang belum dibayarkan ke pihak ketiga dari dana kerjasama	Rp 0	146.911.850	146.911.850
3.	Sisa dana dari RPL Kerja sama	Rp 0	15.350.876	15.350.876
4.	Pengembalian belanja pegawai TA 2019 yang belum disetor ke Kas Negara.	Rp 647.685.367	964.750	648.650.117
5.	Pengembalian belanja barang TA 2019 yang belum disetor ke Kas Negara.	Rp 132.385.250	1.947.510	134.332.760
6.	Pajak yang berasal dari transaksi realisasi belanja yang belum disetor ke Kas Negara.	Rp 0	2.603.458	2.603.458
7.	Jasa Giro yang belum disetorkan ke Kas Negara.	Rp 0	62.901	62.901
8.	Saldo hibah, dengan rincian:			
	a. UNICEF	Rp 184.696.000	0	184.696.000
Jumlah Kas dan Setara Kas		Rp 964.766.617	246.895.483	1.211.662.100

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)
Rp3.790.809.575

C.1.1.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp3.790.809.575 dan Rp1.616.040.032. Saldo ini merupakan pengeluaran belanja yang dilakukan atas pekerjaan/jasa pada periode tertentu yang dibayarkan pada awal perikatan. Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*)

dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh BPS, namun BPS telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Daftar saldo Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) per wilayah/satker adalah tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 36
Rincian Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	Saldo (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jawa Barat	119.644.860	Sewa Gedung
2	Jawa Tengah	455.407.103	Sewa Gedung
3	Jawa Timur	74.649.205	Sewa Gudang
4	DI Yogyakarta	46.584.699	Sewa Gudang
5	Aceh	44.360.656	Sewa Gudang
6	Sumatera Utara	239.805.964	Sewa Gedung dan Gudang
7	Sumatera Barat	20.250.000	Sewa Gudang
8	Sumatera Selatan	131.391.393	Sewa Gudang
9	Riau	43.934.426	Sewa Gudang
10	Jambi	48.233.243	Sewa Kantor dan Gudang
11	Lampung	56.972.669	Sewa Gudang
12	Kalimantan Barat	45.288.108	Sewa Gudang
13	Kalimantan Tengah	39.058.310	Sewa Gudang
14	Kalimantan Timur	92.076.503	Sewa Gedung
15	Kalimantan Selatan	68.444.345	Sewa Gudang
16	Sulawesi Utara	75.038.982	Sewa Gudang
17	Sulawesi Tengah	18.501.745	Sewa Rumah Dinas dan Gudang
18	Sulawesi Selatan	44.065.574	Sewa Gudang
19	Sulawesi Tenggara	59.488.525	Sewa Gudang
20	Maluku	157.355.191	Sewa Gudang
21	Bali	69.817.439	Sewa Gudang
22	Nusa Tenggara Barat	93.138.840	Sewa Gudang
23	Nusa Tenggara Timur	45.692.590	Sewa Gudang dan Ruangan
24	Papua	592.279.888	Sewa Gudang
25	Bengkulu	44.536.547	Sewa Gudang
26	Maluku Utara	44.879.098	Sewa Gudang dan Gedung
27	Banten	52.479.621	Sewa Gudang
28	Bangka Belitung	27.828.493	Sewa Gedung
29	Gorontalo	59.494.536	Sewa Gudang
30	Papua Barat	53.319.868	Sewa Gudang
31	Sulawesi Barat	17.459.017	Sewa Gudang
32	Kalimantan Utara	356.967.213	Sewa Gedung
Sub Jumlah		3.338.444.651	Sewa Gedung, Kantor, Gudang
1	Jawa Barat	12.502.364	Listrik Pra Bayar
2	Lampung	3.060.441	Listrik Pra Bayar
3	Sulawesi Tengah	388.272	Listrik Pra Bayar
4	Kalimantan Timur	1.552.529	Listrik Pra Bayar
5	Bali	3.949.668	Listrik Pra Bayar
6	Papua	3.607.940	Listrik Pra Bayar
7	Maluku Utara	1.833.261	Listrik Pra Bayar
8	Bangka Belitung	6.199.323	Listrik Pra Bayar
9	Papua Barat	1.000.000	Listrik Pra Bayar
10	Banten	1.854.000	Internet
Sub Jumlah		35.947.798	Listrik Pra Bayar dan Internet
1	Jawa Timur	17.053.566	Belanja iklan publisitas

2	Aceh	75.600.000	Belanja iklan publisitas
3	Aceh	82.285.715	Sewa Billboard
4	Banten	241.477.845	Billboard Publisitas
Sub Jumlah		416.417.126	Publisitas dan Billboard
Jumlah		3.790.809.575	

Pendapatan Yang Masih harus Diterima Rp9.623.499

C.1.1.5 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp9.623.499 dan Rp11.190.198. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima merupakan pendapatan PNBPN yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar namun belum diterima pembayarannya atau belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal Neraca.

Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per wilayah/satker adalah tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 37
Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-19 (Rp)	31-Des-18 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Polstat STIS	9.623.499	5.612.334	4.011.165
2	Jawa Timur	0	538.960	(538.960)
3	Sulawesi Selatan	0	3.785.591	(3.785.591)
4	Sulawesi Tenggara	0	985.250	(985.250)
5	Maluku Utara	0	13.615	(13.615)
6	Papua Barat	0	254.448	(254.448)
Jumlah		9.623.499	11.190.198	(1.566.699)

Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2019 dijelaskan sebagai berikut:

- Sewa ruangan untuk kantin yang belum diterima sebesar Rp9.623.499 pada kampus Politeknik Statistika STIS.

Piutang Bukan Pajak Rp9.237.728.594

C.1.1.6 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp9.237.728.594 dan Rp2.621.948.090. Piutang Bukan Pajak merupakan semua hak atau pengakuan/klaim pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca.

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/surat tagihan. Daftar saldo Piutang Bukan Pajak per wilayah/satker adalah terinci dalam tabel dibawah ini.

Tabel 38
Rincian Piutang Bukan Pajak Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-19 (Rp)	31-Des-18 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	9.056.315.468	2.200.479.249	6.855.836.219
2	Pusdiklat BPS	5.151.150	10.727.900	(5.576.750)
3	DKI Jakarta	0	281.641.604	(281.641.604)
4	Jawa Barat	44.604.124	6.611.850	37.992.274
5	Jawa Tengah	10.000	2.842.288	(2.832.288)
6	DI Yogyakarta	3.402.250	0	3.402.250
7	Jawa Timur	4.247.508	10.736.290	(6.488.782)
8	Aceh	6.805.014	21.773.147	(14.968.133)
9	Sumatera Utara	1.248.231	3.734.715	(2.486.484)
10	Riau	8.516.863	9.061.150	(544.287)
11	Jambi	9.940.001	0	9.940.001
12	Sumatera Selatan	560.000	0	560.000
13	Lampung	0	4.000	(4.000)
14	Kalimantan Tengah	785.352	0	785.352
15	Kalimantan Timur	4.800.000	6.524.274	(1.724.274)
16	Sulawesi Utara	0	148.000	(148.000)
17	Sulawesi Tenggara	925.000	0	925.000
18	Bali	349.350	992.500	(643.150)
19	Maluku	7.932.364	0	7.932.364
20	Nusa Tenggara Barat	427.827	0	427.827
21	Nusa Tenggara Timur	28.440.805	0	28.440.805
22	Papua	4.533.952	0	4.533.952
23	Maluku Utara	4.051.273	5.452.952	(1.401.679)
24	Bangka Belitung	0	351.513	(351.513)
25	Kepulauan Riau	44.682.062	44.644.658	37.404
26	Papua Barat	0	16.222.000	(16.222.000)
Jumlah		9.237.728.594	2.621.948.090	6.615.780.504

Sedangkan mutasi piutang PNBPN pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	Rp	2.621.948.090
Mutasi Tambah:		
- Piutang atas pendapatan sewa yg belum diterima	Rp	20.307.835
- Piutang atas pendapatan denda pekerjaan yg belum diterima dan disetor ke Kas Negara	Rp	21.420.764
- Piutang atas penarikan jaminan pekerjaan yg belum disetor ke Kas Negara	Rp	6.089.407.500
- Piutang atas kelebihan realisasi belanja pegawai tahun anggaran berjalan yg belum disetor ke Kas Negara	Rp	151.966.334
- Piutang atas kelebihan realisasi belanja barang tahun anggaran berjalan yg belum disetor ke Kas Negara	Rp	2.880.116.463
- Piutang atas kelebihan realisasi belanja pegawai tayl yg belum disetor ke Kas Negara	Rp	23.115.040
Total Mutasi Tambah	Rp	9.186.333.936
Mutasi Kurang		
- Penerimaan atas kelebihan realisasi belanja pegawai tayl dan sudah disetor ke Kas Negara	(Rp)	143.431.727)
- Penerimaan atas kelebihan realisasi belanja barang tayl dan sudah disetor ke Kas Negara	(Rp)	168.437.242)
- Penerimaan atas kelebihan realisasi belanja modal tayl dan sudah disetor ke Kas Negara	(Rp)	165.000.000)
- Penerimaan atas pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah	(Rp)	2.071.758.366)
- Penerimaan pelunasan piutang atas sewa	(Rp)	16.355.097)
- Penerimaan atas kelebihan realisasi belanja barang	(Rp)	5.571.000)

yang berasal dari dana hibah ADB TA 2017

**Total Mutasi Kurang
Kenaikan/(Penurunan)
Saldo per 31 Desember 2019**

(Rp 2.570.553.432)

**Rp 6.615.780.504
Rp 9.237.728.594**

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Mutasi tambah yang sebesar Rp9.186.333.936 terdiri dari transaksi-transaksi sebagai berikut:
 - a. Piutang berupa pendapatan sewa yang belum diterima sebesar Rp20.307.835, terdapat pada wilayah Jawa Timur sebesar Rp419.958, wilayah Aceh sebesar Rp531.598, wilayah Sumatera Utara sebesar Rp158.786, wilayah Riau sebesar Rp716.368, wilayah Jambi sebesar Rp8.390.001, wilayah Kalimantan Tengah sebesar Rp785.352, wilayah Nusa Tenggara Barat sebesar Rp427.827, wilayah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp255.316, wilayah Papua sebesar Rp4.533.952, wilayah Kepulauan Riau sebesar Rp37.404, wilayah Maluku Utara sebesar Rp4.051.273.
 - b. Piutang atas pendapatan denda penyelesaian pekerjaan yang harus disetor ke Kas Negara sebesar Rp21.420.764 pada Satker Settama.
 - c. Piutang atas penarikan jaminan pekerjaan dari pihak ketiga atas pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sebesar Rp6.089.407.500 pada Satker Settama.
 - d. Kelebihan belanja pegawai dengan jumlah Rp151.966.334 yang harus disetorkan ke Kas Negara, terdapat pada wilayah Jawa Barat sebesar Rp44.094.124, wilayah Jawa Timur sebesar Rp35.150, wilayah DI Yogyakarta sebesar Rp2.212.250, wilayah Aceh sebesar Rp4.681.416, wilayah Sumatera Utara sebesar Rp1.009.150, wilayah Riau sebesar Rp667.400, wilayah Sumatera Selatan sebesar Rp560.000, wilayah Sulawesi Tenggara sebesar Rp925.000, wilayah Bali sebesar Rp34.850, wilayah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp9.195.600, wilayah Maluku sebesar Rp7.932.364, Satker Settama sebesar Rp77.824.380, dan Satker Pusdiklat sebesar Rp2.794.650.
 - e. Kelebihan belanja barang dengan jumlah Rp2.880.116.463 yang harus disetorkan ke Kas Negara, terdapat pada wilayah Jawa Barat sebesar Rp510.000, wilayah Jawa Tengah sebesar Rp10.000, wilayah Jawa Timur sebesar Rp3.792.400, wilayah DI Yogyakarta sebesar Rp1.190.000, wilayah Aceh sebesar Rp882.000, wilayah Sumatera Utara sebesar Rp80.295, wilayah Riau sebesar Rp7.133.095, wilayah Jambi sebesar Rp1.550.000, wilayah Bali sebesar Rp314.500, wilayah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp18.989.889, Satker Settama sebesar Rp2.845.257.784, dan Satker Pusdiklat sebesar Rp406.500.
 - f. Kelebihan realiasi belanja pegawai tahun anggaran yang lalu dengan jumlah Rp23.115.040 yang harus disetorkan ke Kas Negara, terdapat pada wilayah Aceh sebesar Rp710.000 dan Satker Settama sebesar Rp22.405.040.
- Mutasi kurang yang sebesar Rp2.570.553.432 merupakan hasil pelunasan piutang dan koreksi penyesuaian penerimaan PNPB atas:
 - a. Penerimaan pengembalian atas kelebihan realisasi belanja pegawai tahun anggaran yang lalu dan sudah disetor ke Kas Negara sebesar Rp143.431.727

yang terdapat pada wilayah Jawa Barat sebesar Rp6.611.850, wilayah Jawa Tengah sebesar Rp1.125.000, wilayah Jawa Timur sebesar Rp10.736.290, wilayah Aceh sebesar Rp8.470.850, wilayah Sumatera Utara sebesar Rp3.339.000, wilayah Riau sebesar Rp386.650, wilayah Sulawesi Utara sebesar Rp148.000, wilayah Bali sebesar Rp992.500, wilayah Papua Barat sebesar Rp16.222.000, Satker Settama sebesar Rp94.698.687, dan Satker Pusdiklat sebesar Rp700.900.

- b. Penerimaan atas pengembalian kelebihan realisasi belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp168.437.242 yang terdapat pada wilayah Aceh sebesar Rp9.501.000, wilayah Sumatera Utara sebesar Rp395.715, wilayah Riau sebesar Rp8.674.500, wilayah Lampung sebesar Rp4.000, wilayah Bangka Belitung sebesar Rp351.513, Satker Settama sebesar Rp141.433.514, dan Satker Pusdiklat sebesar Rp8.077.000.
- c. Penerimaan atas pengembalian kelebihan realisasi belanja modal tahun anggaran yang lalu sebesar Rp165.000.000 yang terdapat Satker Settama.
- d. Penerimaan berupa pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp2.071.758.366 yang terdapat pada wilayah DKI Jakarta sebesar Rp281.641.604 dan Satker Settama sebesar Rp1.790.116.762.
- e. Pelunasan atas pendapatan sewa sebesar Rp16.355.097 terdapat pada wilayah Jawa Tengah sebesar Rp1.717.288, wilayah Aceh sebesar Rp3.801.297, wilayah Kalimantan Timur sebesar Rp1.724.274, wilayah Maluku Utara sebesar Rp5.452.952, dan Satker Settama sebesar Rp3.659.286.
- f. Pelunasan atas piutang atas kelebihan belanja barang yang berasal dari dana hibah ADB TA 2017 sebesar Rp5.571.000 pada Satker Settama.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Rp90.609.491

C.1.1.7 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp90.645.589 dan Rp57.584.671 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing Piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diterapkan untuk mengetahui nilai realisasi bersih dari Piutang. Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ini berdasarkan kualitas Piutang pada setiap tanggal pelaporan.

Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per wilayah/satker adalah tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 39
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Per Wilayah/Satker

Uraian	Kualitas Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Nilai Penyisihan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(5)
Settama	Lancar	9.056.315.468	(45.281.578)
Pusdiklat BPS	Lancar	5.151.150	(25.754)
Jawa Barat	Lancar	44.604.124	(223.021)
Jawa Tengah	Lancar	10.000	(50)
DI Yogyakarta	Lancar	3.402.250	(17.011)
Jawa Timur	Lancar	4.247.508	(21.237)

Aceh	Lancar	6.805.014	(33.424)
Sumatera Utara	Lancar	1.248.231	(6.241)
Riau	Lancar	8.516.863	(42.584)
Jambi	Lancar	9.940.001	(49.706)
Sumatera Selatan	Lancar	560.000	(2.800)
Kalimantan Tengah	Lancar	785.352	(3.936)
Kalimantan Timur	Lancar	4.800.000	(24.000)
Sulawesi Tenggara	Lancar	925.000	(4.625)
Bali	Lancar	349.350	(1.747)
Maluku	Lancar	7.932.364	(39.662)
Nusa Tenggara Barat	Lancar	427.827	(2.139)
Nusa Tenggara Timur	Lancar	28.440.805	(142.204)
Maluku Utara	Lancar	4.051.273	(20.257)
Kepulauan Riau	Macet	44.682.062	(44.644.845)
Papua	Lancar	4.533.952	(22.670)
Jumlah		9.237.728.594	(90.609.491)

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp24.609.633.188*

C.1.1.8 Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp24.609.633.188 dan Rp19.710.338.388. Saldo ini merupakan nilai tagihan TP/TGR yang jatuh tempo sampai dengan 31 Desember 2019 dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 16 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua bahwa Bagian Lancar Tagihan TP/TGR yang dibukukan ke dalam Neraca merupakan bagian dari Aset Lancar, sedangkan sisanya dibukukan ke dalam Tagihan TP/TGR pada Piutang Jangka Panjang. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2019 merupakan saldo dari debitor yang dikenakan TP/TGR melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) maupun Surat Keputusan Pembebanan (SKP) serta reklasifikasi saldo akun Aset Lain-Lain yang menjadi Bagian Lancar TP/TGR yaitu debitor TP/TGR yang telah dilimpahkan penagihannya ke KPKNL.

Berdasarkan Perka BPS Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Di Lingkungan BPS maka penetapan adanya kerugian negara oleh pegawai non bendahara didasarkan pada dokumen SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan. Dalam proses penetapan tersebut maka debitor dikelompokkan menjadi beberapa golongan yaitu:

1. Debitur yang telah ditetapkan nilai kerugian negaranya berdasarkan SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan.
2. Debitur yang sedang dalam proses pembebanan kerugian negaranya yang didasarkan pada Surat Pemberitahuan Ganti Rugi (SPGR).
3. Debitur yang nilai piutangnya telah dilimpahkan ke KPKNL.

Nilai Piutang atas kerugian negara yang masuk sebagai Bagian Lancar TP/TGR rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Nilai piutang Bagian Lancar TP/TGR yang status debiturnya telah ditetapkan TGR adalah sebesar Rp6.907.273.038.

2. Nilai piutang Bagian Lancar TP/TGR yang telah dilimpahkan ke KPKNL adalah sebesar Rp17.702.360.150.

Terdapat nilai TGR sebesar Rp807.361.026 yang masih dalam proses pembebanan dengan ditandai dikeluarkannya surat pemberitahuan ganti rugi (SPGR) kepada debitur TGR. Nilai ini bukan merupakan piutang karena belum ada penetapan piutang TGR dengan didasarkan pada dokumen SKTJM maupun Surat Keputusan Pembebanan sesuai dengan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 16 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua. Rincian nilai TGR yang masih dalam proses pembebanan terlampir dalam lampiran pendukung 1 laporan keuangan ini.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR yang sebesar Rp24.609.633.188 diantaranya terdapat nilai piutang sebesar Rp930.303.257 pada debitur atas nama Guntur Sugiyanto sedang dalam proses penetapan melalui penerbitan Surat Keputusan Kepala BPS atas nilai piutang yang baru dari awalnya sebesar Rp1.057.695.166. Nilai piutang sebesar Rp930.303.257, merupakan hasil pelunasan yang telah dilakukan sebelumnya sebesar Rp127.391.909 atas piutang awal sebesar Rp1.057.695.166. Proses penetapan ini diperlukan karena piutang TGR atas nama Guntur Sugiyanto merupakan hasil penarikan piutang yang telah dilimpahkan penagihannya ke KPKNL dan kemudian pengelolaan piutang tersebut dilakukan oleh BPS.

Daftar saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per wilayah/satker adalah terinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 40
Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-19 (Rp)	31-Des-18 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	24.609.633.188	19.710.338.388	4.899.294.800
Jumlah		24.609.633.188	19.710.338.388	4.899.294.800

Rincian Piutang TGR disajikan Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp18.122.541.878*

C.1.1.9 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp18.122.541.878 dan Rp18.330.000.346. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing Piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diterapkan untuk mengetahui nilai realisasi bersih dari Piutang. Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ini berdasarkan kualitas Piutang pada setiap tanggal pelaporan.

Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per wilayah/satker adalah tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 41
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
Per Wilayah/Satker

No	Wilayah/Satker	Kualitas Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan (%)	Nilai Penyisihan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Settama	Lancar	4.821.238.342	0,5%	24.106.192
		Kurang Lancar	1.619.627.257	10%	161.962.726
		Diragukan	464.589.257	50%	232.294.629
		Macet	17.704.178.332	100%	17.704.178.332
Jumlah			24.609.633.188		18.122.541.878

Persediaan

Rp78.536.117.950

C.1.1.10 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp78.536.117.950 dan Rp29.209.225.390. Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp78.536.117.950 diperoleh dari hasil inventarisasi fisik persediaan yang dilengkapi dengan Berita Acara *Stock Opname*, terdiri dari:

Tabel 42
Rincian Persediaan

Kode	Uraian	31-Des-19 (Rp)	31-Des-18 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
117111	Barang Konsumsi	77.844.174.773	28.487.526.216
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	691.943.177	721.699.174
Jumlah		78.536.117.950	29.209.225.390

Rincian saldo Persediaan per wilayah/satker adalah tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 43
Rincian Persediaan Per Wilayah/Satker

No.	Kode	Wilayah/Satker	31-Des-19 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	0199	Settama	9.561.097.481
2	0199	Pusdiklat	384.725.596
3	0199	Polstat STIS	112.022.040
4	0100	DKI Jakarta	1.346.669.518
5	0200	Jawa Barat	3.951.221.450
6	0300	Jawa Tengah	6.906.729.750
7	0400	DI Yogyakarta	1.062.137.609
8	0500	Jawa Timur	5.102.513.858
9	0600	Aceh	2.323.341.328
10	0700	Sumatera Utara	4.829.544.661
11	0800	Sumatera Barat	2.594.308.537
12	0900	Riau	2.331.478.616
13	1000	Jambi	1.302.289.738

No.	Kode	Wilayah/Satker	31-Des-19 (Rp)
14	1100	Sumatera Selatan	2.452.404.061
15	1200	Lampung	1.151.978.691
16	1300	Kalimantan Barat	2.096.054.868
17	1400	Kalimantan Tengah	1.929.321.590
18	1500	Kalimantan Selatan	2.312.409.500
19	1600	Kalimantan Timur	1.502.620.956
20	1700	Sulawesi Utara	950.533.895
21	1800	Sulawesi Tengah	1.640.152.351
22	1900	Sulawesi Selatan	1.631.359.757
23	2000	Sulawesi Tenggara	1.409.507.705
24	2100	Maluku	1.603.220.518
25	2200	Bali	422.076.206
26	2300	Nusa Tenggara Barat	1.620.314.182
27	2400	Nusa Tenggara Timur	2.829.162.886
28	2500	Papua	3.352.883.519
29	2600	Bengkulu	1.269.983.130
30	2800	Maluku Utara	1.141.764.538
31	2900	Banten	2.501.976.336
32	3000	Bangka Belitung	463.017.027
33	3100	Gorontalo	1.000.837.858
34	3200	Kepulauan Riau	869.467.795
35	3300	Papua Barat	1.540.461.889
36	3400	Sulawesi Barat	494.902.340
37	3500	Kalimantan Utara	541.626.170
Jumlah			78.536.117.950

Aset Tetap

Rp5.363.479.942.127

C.1.2 Aset Tetap

Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp5.363.479.942.127 dan Rp2.807.580.308.792. Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Rincian Aset Tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 44
Rincian Aset Tetap

Uraian	31-Des-19 (Rp)	31-Des-18 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah	3.052.318.324.207	772.800.959.901	2.279.517.364.306
Peralatan & Mesin	2.115.313.606.795	1.891.531.310.334	223.782.296.461
Gedung & Bangunan	1.900.603.566.704	1.930.243.613.988	(29.640.047.284)
Aset Tetap Lainnya	54.000.004.095	51.045.639.716	2.954.364.379
KDP	1.109.199.298	23.786.153.661	(22.676.954.363)
Jumlah	7.123.344.701.099	4.669.407.677.600	2.453.937.023.499
Akumulasi Penyusutan	(1.759.864.758.972)	(1.861.827.368.808)	101.962.609.836
Nilai Buku Aset Tetap	5.363.479.942.127	2.807.580.308.792	2.555.899.633.335

Posisi Aset Tetap pada Neraca Laporan Keuangan dibandingkan dengan posisi Aset Tetap pada Laporan Barang Milik Negara (BMN) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 45
Perbandingan Aset Tetap antara Neraca dan Laporan BMN Per 31 Desember 2019

Uraian	Neraca (Rp)	SIMAK BMN (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah	3.052.318.324.207	3.052.318.324.207	0
Peralatan & Mesin	2.115.313.606.795	2.115.313.606.795	0
Gedung & Bangunan	1.900.603.566.704	1.900.603.566.704	0
Aset Tetap Lainnya	54.000.004.095	54.000.004.095	0
KDP	1.109.199.298	1.109.199.298	0
Jumlah	7.123.344.701.099	7.123.344.701.099	0
Akumulasi Penyusutan	(1.759.864.758.972)	(1.759.864.758.972)	0
Nilai Buku Aset Tetap	5.363.479.942.127	5.363.479.942.127	0

Tidak terdapat perbedaan nilai Aset Tetap yang tercatat per 31 Desember 2019 antara Neraca pada Laporan Keuangan dengan Neraca pada Laporan Barang Milik Negara (BMN).

Penjelasan atas kenaikan dan penurunan nilai masing-masing jenis Aset Tetap dikarenakan adanya mutasi serta hubungannya dengan belanja modal, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian selanjutnya.

Tanah

Rp3.052.318.324.207

C.1.2.1 Tanah

Nilai perolehan Tanah per 31 Desember 2019 adalah Rp3.052.318.324.207, sedangkan untuk per 31 Desember 2018 adalah Rp772.800.959.901.

Perhitungan mutasi nilai Tanah per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018		Rp	772.800.959.901
Penambahan			
Pembelian	Rp	4.601.500.000	
Reklasifikasi Masuk	Rp	5.826.060.000	
Hibah (Masuk)	Rp	11.768.776.131	
Transfer Masuk	Rp	1.751.547.000	
Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	Rp	13.025.000	
Koreksi Penilaian Kembali BMN	Rp	45.382.000	
Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225	Rp	48.475.000	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp	1.384.811.000	
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	Rp	648.391.000	
Pengembangan Melalui KDP	Rp	1.690.198.840	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	15.267.268.000	
Koreksi Kesalahan input IP	Rp	60.151.254.945	
Revaluasi Aset (<i>Take In</i>)	Rp	2.199.033.105.140	
Jumlah Penambah	Rp	2.302.229.794.056	
Pengurangan			
Reklasifikasi Keluar	(Rp)	5.826.060.000	
Transfer Keluar	(Rp)	1.751.547.000	
Hibah (Keluar)	(Rp)	1.226.291.000	
Transaksi Normalisasi BMN	(Rp)	648.391.000	
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak	(Rp)	3.767.250.000	

ditemukan		
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(Rp	140.326.000)
Koreksi Pencatatan	(Rp	491.550.000)
Koreksi Nilai barang Berlebih	(Rp	66.537.000)
Koreksi Belanja Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi	(Rp	15.017.000)
Koreksi Reklasifikasi Keluar Akibat Koreksi Penilaian Kembali	(Rp	222.000)
Revaluasi Aset (<i>Take In</i>)	(Rp	8.779.238.750)
Jumlah Pengurangan	(Rp	22.712.429.750)
Kenaikan/(Pengurangan)		Rp 2.279.517.364.306
Saldo per 31 Desember 2019		Rp 3.052.318.324.207

Realisasi belanja modal tanah sampai dengan 31 Desember 2019 secara netto sebesar Rp12.863.868.840. Realisasi belanja modal tanah yang mempengaruhi mutasi nilai Aset Tetap Tanah, alokasi penggunaan belanja modal tanah, dan perolehan Aset Tetap Tanah yang menggunakan selain belanja modal tanah dijelaskan sebagai berikut:

Pembelian		Rp	4.601.500.000
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP		Rp	15.267.268.000
Pengembangan Melalui KDP		Rp	1.690.198.840
Jumlah realisasi belanja modal tanah pada mutasi nilai Aset Tetap Tanah		Rp	21.558.966.840
Penambahan:			
Belanja modal tanah yang dicatat sebagai perolehan aset tetap renovasi	Rp	837.000.000	
Jumlah Penambahan	Rp	837.000.000	
Pengurangan:			
Perolehan Tanah yang menggunakan belanja modal gedung dan bangunan	(Rp	9.532.098.000)	
Jumlah Pengurangan	(Rp	9.532.098.000)	
Lebih/(Kurang)			(Rp 8.695.098.000)
Realisasi belanja modal tanah			Rp 12.863.868.840

Penjelasan perhitungan penambahan dan pengurangan adalah sebagai berikut:

- Penambahan dikarenakan adanya belanja modal tanah yang digunakan untuk aset tetap renovasi sebesar Rp837.000.000
- Pengurangan dikarenakan adanya perolehan tanah yang menggunakan belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp9.532.098.000.

Nilai Aset Tetap Tanah pada Laporan Barang Milik Negara BPS per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.052.318.324.207 memiliki luas 1.246.543 m². Jumlah luas Tanah tersebut terdiri atas tanah yang telah bersertifikat dengan nama pemegang hak yaitu BPS seluas 1.167.734 m² dengan nilai sebesar Rp2.810.322.697.367, tanah yang belum bersertifikat dengan nama pemegang hak yaitu BPS seluas 78.809 m² senilai Rp241.995.626.840. Rincian data tanah BMN per 31 Desember 2019 terdapat pada Lampiran Pendukung Laporan Keuangan I.

Terdapat permasalahan pada Aset Tetap Tanah seperti tanah dalam sengketa, tanah yang tidak didukung bukti kepemilikan, tanah yang dikuasai pihak lain, tanah yang dihentikan penggunaannya, dan status Aset Tetap Tanah pinjam pakai. Rincian penjelasan permasalahan Aset Tetap Tanah tersebut disajikan secara terinci dalam Lampiran Pendukung Laporan Keuangan I berupa Catatan Atas Laporan BMN BPS Tahun 2019 pada laporan keuangan ini.

Peralatan dan Mesin C.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Rp2.115.313.606.795

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 adalah Rp2.115.313.606.795 dan 31 Desember 2018 adalah Rp1.891.531.310.334. Sedangkan nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan adalah Rp507.630.332.096. Nilai Buku Peralatan dan Mesin diperoleh dengan mengurangkan antara nilai perolehan dengan akumulasi penyusutannya sebesar Rp1.607.683.274.699. Perhitungan akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 terdapat pada **Lampiran A1**.

Perhitungan mutasi nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018		Rp 1.891.531.310.334
Penambahan		
Penambah Saldo Awal	Rp 1.640.284.460	
Pembelian	Rp 304.900.336.620	
Hibah (Masuk)	Rp 366.242.857	
Transfer Masuk	Rp 132.685.473.452	
Reklasifikasi Masuk	Rp 8.028.594.646	
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp 721.644.683	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp 1.209.529.309	
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	Rp 1.536.899.155	
Pengembangan Nilai Aset	Rp 1.543.267.390	
Jumlah Penambahan	Rp 452.632.272.572	
Pengurangan		
Penghapusan	(Rp 870.122.485)	
Transfer Keluar	(Rp 131.006.425.212)	
Reklasifikasi Keluar	(Rp 6.409.049.660)	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(Rp 87.539.624.688)	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(Rp 1.065.427.219)	
Transaksi Normalisasi BMN	(Rp 942.809.816)	
Koreksi Pencatatan	(Rp 484.403.844)	
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	(Rp 310.764.952)	
Usulan Barang Hilang ke Pengelola	(Rp 220.902.726)	
Penghapusan semu karena reklasifikasi dari intra ke ekstra atau sebaliknya	(Rp 445.509)	
Jumlah Pengurangan	(Rp 228.849.976.111)	
Kenaikan/(Pengurangan)		Rp 223.782.296.461
Saldo per 31 Desember 2019		Rp 2.115.313.606.795
Akumulasi Penyusutan		(Rp 1.607.683.274.699)
Nilai Buku per 31 Desember 2019		Rp 507.630.332.096

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2019 secara netto sebesar Rp342.283.321.937. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang mempengaruhi mutasi nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin, alokasi penggunaan belanja modal peralatan dan mesin, dan perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang menggunakan selain belanja modal peralatan dan mesin dijelaskan sebagai berikut:

Pembelian	Rp 304.900.336.620
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp 1.209.529.309
Pengembangan Nilai Aset	Rp 1.543.267.390
Jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada mutasi nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp 307.653.133.319
Penambahan:	
Realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang digunakan untuk perolehan gedung dan bangunan	Rp 35.890.000
Realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang digunakan untuk perolehan ATB	Rp 5.279.360.891
Realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk perolehan Ekstrakomptabel	Rp 2.958.086.898
Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang masih	Rp 26.952.856.910

terhutang sampai akhir periode pelaporan			
Jumlah Penambahan	Rp	35.226.194.699	
Pengurangan:			
Perolehan Peralatan dan Mesin yang menggunakan belanja modal gedung dan bangunan	(Rp	96.785.000)	
Perolehan Peralatan dan Mesin yang menggunakan belanja modal ATB	(Rp	440.000.000)	
Realisasi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang dikapitalisasi menjadi aset tetap Peralatan dan Mesin	(Rp	39.282.281)	
Realisasi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang dikapitalisasi menjadi aset tetap Peralatan dan Mesin	(Rp	19.938.800)	
Jumlah Pengurangan	(Rp	596.006.081)	
Lebih/(Kurang)			Rp 34.630.188.618
Realisasi belanja modal peralatan dan mesin (neto)			Rp 342.283.321.937

Penjelasan perhitungan penambahan dan pengurangan adalah sebagai berikut:

- Penambahan dikarenakan adanya realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang digunakan untuk perolehan Gedung dan Bangunan sebesar Rp35.890.000, perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) sebesar Rp5.279.360.891, dan menghasilkan aset ekstrakomptabel sebesar Rp2.958.086.898.
- Penambahan yang diakibatkan oleh perolehan aset Peralatan dan Mesin melalui belanja modal peralatan dan mesin yang masih harus dibayar sebesar Rp26.952.856.910.
- Pengurangan yang berasal dari perolehan Peralatan dan Mesin yang menggunakan belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp96.785.000, belanja modal ATB sebesar Rp440.000.000, belanja pemeliharaan peralatan mesin sebesar Rp39.282.281, dan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp19.938.800.

Selain nilai Peralatan dan Mesin tersebut di atas, terdapat Peralatan dan Mesin yang tidak tercatat di Neraca, namun dicatat secara ekstrakomptabel karena nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebesar Rp8.963.727.462. Rincian Peralatan dan Mesin yang masuk pada aset ekstrakomptabel terdapat pada lampiran I Laporan Keuangan.

Rincian kondisi barang untuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin tersaji dalam Laporan Kondisi Barang yang merupakan lampiran pada laporan keuangan ini.

*Gedung
dan Bangunan
Rp1.900.603.566.704*

C.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 adalah Rp1.900.603.566.704, sedangkan untuk per 31 Desember 2018 adalah Rp1.930.243.613.988. Sedangkan nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah Rp1.748.519.345.573. Nilai Buku Gedung dan Bangunan diperoleh dengan mengurangkan antara nilai perolehan dengan akumulasi penyusutannya sebesar Rp152.084.221.131.

Perhitungan mutasi nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018		Rp 1.930.243.613.988
Penambahan		
Penambah Saldo Awal	Rp	565.357.000
Pembelian	Rp	2.841.606.689
Transfer Masuk	Rp	663.606.000
Hibah (Masuk)	Rp	198.633.827
Reklasifikasi Masuk	Rp	25.012.493.637
Pengembangan Melalui KDP	Rp	32.283.027.893
Pengembangan Nilai Aset	Rp	3.511.426.904
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	88.973.934.812
Koreksi BMN ditemukan Kembali	Rp	125.519.569
Koreksi Penilaian Kembali BMN	Rp	192.215.314
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	Rp	235.224.508
Koreksi Transfer Keluar Akibat Koreksi Revaluasi	Rp	323.244.000
Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	Rp	509.848.000
Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	Rp	690.626.000
Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp	914.235.000
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp	1.234.468.000
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	Rp	2.938.997.281
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	Rp	3.163.723.000
Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	Rp	4.835.773.000
Koreksi Nilai barang Berlebih	Rp	14.481.281.570
Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	Rp	17.287.375.030
Revaluasi Aset (<i>Take In</i>)	Rp	30.228.390.402
Jumlah Penambahan	Rp	231.211.007.436
Pengurangan		
Reklasifikasi Keluar	(Rp	25.885.611.869)
Transfer Keluar	(Rp	663.606.000)
Penghapusan	(Rp	2.185.832.000)
Transaksi Normalisasi BMN	(Rp	2.950.640.200)
Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225	(Rp	18.441.402.000)
Koreksi Kesalahan input IP	(Rp	13.634.529.533)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(Rp	10.813.981.600)
Koreksi Pencatatan	(Rp	7.119.185.707)
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	(Rp	2.045.561.171)
Koreksi Belanja Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi	(Rp	883.877.490)
Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	(Rp	641.884.000)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(Rp	217.432.364)
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	(Rp	208.553.225)
Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	(Rp	168.080.173)
Koreksi Reklasifikasi Keluar Akibat Koreksi Penilaian Kembali	(Rp	40.431.000)
Koreksi Transfer Masuk	(Rp	16.925.000)
Revaluasi Aset (<i>Take In</i>)	(Rp	174.933.521.388)
Jumlah Pengurangan	(Rp)	260.851.054.720
Kenaikan/(Pengurangan)		(Rp 29.640.047.284)
Saldo per 31 Desember 2019		Rp 1.900.603.566.704
Akumulasi Penyusutan		(Rp 152.084.221.131)
Nilai Buku per 31 Desember 2019		Rp 1.748.519.345.573

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan sampai dengan 31 Desember 2019 secara netto sebesar Rp121.391.776.436. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang mempengaruhi mutasi nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan, alokasi penggunaan belanja modal gedung dan bangunan, dan perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

yang menggunakan selain belanja modal gedung dan bangunan dijelaskan sebagai berikut:

Pembelian	Rp	2.841.606.689
Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp	914.235.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	66.409.984.151
Pengembangan Nilai Aset	Rp	3.511.426.904
Pengembangan Melalui KDP	Rp	31.689.995.893
Jumlah realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada perubahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	105.367.248.637

Penambahan:

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang dibukukan sebagai aset tetap Tanah	Rp	9.532.098.000
Realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang digunakan untuk perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	96.785.000
Realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang digunakan untuk perolehan barang ekstrakomptabel	Rp	63.756.000
Realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang digunakan untuk pemeliharaan gedung dan bangunan	Rp	442.494.000
Realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang masih menghasilkan aset KDP	Rp	968.271.298
Pelunasan tunggakan atas belanja gedung dan bangunan tahun anggaran yang lalu	Rp	5.041.177.975

Jumlah Penambahan

Rp 16.144.582.273

Pengurangan:

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk perolehan gedung dan bangunan	(Rp)	35.890.000
Realisasi belanja barang (5221) yang menghasilkan pengembangan aset tetap Gedung dan Bangunan	(Rp)	38.280.000
Perolehan Gedung dan Bangunan melalui belanja modal yang masih terhutang sampai akhir periode pelaporan	(Rp)	22.660.000
Pengembalian belanja modal gedung dan bangunan	(Rp)	23.224.474

Jumlah Pengurangan

(Rp 120.054.474)

Lebih/(Kurang)

Rp 16.024.527.799

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan

Rp 121.391.776.436

Penjelasan perhitungan penambahan dan pengurangan adalah sebagai berikut:

- Penambahan disebabkan oleh realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang digunakan untuk perolehan Aset Tetap Tanah sebesar Rp9.532.098.000, Peralatan dan Mesin sebesar Rp96.785.000, barang ekstrakomptabel sebesar Rp63.756.000, dan pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp442.494.000.
- Penambahan yang diakibatkan oleh realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang masih menghasilkan aset KDP sebesar Rp968.271.298.
- Penambahan yang disebabkan adanya pelunasan atas tunggakan belanja modal gedung dan bangunan tahun anggaran yang lalu sebesar Rp5.041.177.975
- Pengurangan yang berasal dari perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dengan menggunakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp35.890.000.
- Pengurangan yang diakibatkan oleh realisasi belanja barang yang menghasilkan pengembangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp38.280.000.
- Pengurangan yang disebabkan oleh perolehan Gedung dan Bangunan melalui belanja modal yang masih harus dibayar sebesar Rp22.660.000

- Pengurangan yang diakibatkan oleh pengembalian belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp23.224.474.

Selain nilai Gedung dan Bangunan tersebut di atas, terdapat Gedung dan Bangunan yang tidak tercatat di Neraca, namun dicatat secara ekstrakompatabel karena nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebesar Rp302.222.192. Rincian gedung dan bangunan yang masuk pada aset ekstrakompatabel terdapat pada lampiran I Laporan Keuangan.

Aset Tetap Lainnya
Rp54.000.004.095

C.1.2.4 Aset Tetap Lainnya

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp54.000.004.095, sedangkan untuk per 31 Desember 2018 adalah Rp51.045.639.716. Adapun aset pada BPS yang masuk pada kelompok Aset Tetap Lainnya adalah tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 46
Rincian Aset Tetap Lainnya

No.	Keterangan	Total (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Aset Tetap Dalam Renovasi	837.000.000
2	Aset Tetap Lainnya	53.163.004.095
Jumlah		54.000.004.095

Aset Tetap Dalam Renovasi menurut Buletin Teknis Nomor 09 mengenai Akuntansi Aset Tetap merupakan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya. Aset Tetap Dalam Renovasi yang dimiliki oleh BPS berupa Aset Tetap Tanah Dalam Renovasi pada BPS Kab. Sarmi sebesar Rp837.000.000.

Aset Tetap Lainnya senilai Rp53.163.004.095 yang dimiliki oleh BPS per 31 Desember 2019 terdiri dari:

1. Bahan perpustakaan senilai Rp52.918.902.385.
2. Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga senilai Rp244.101.710.

Nilai buku Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah Rp53.065.740.953. Nilai Buku Aset Tetap Lainnya diperoleh dengan mengurangi antara nilai perolehan dengan akumulasi penyusutannya sebesar Rp97.263.142. Perhitungan akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 terdapat pada **Lampiran 1A**.

Mutasi perubahan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perubahan Nilai Aset Tetap Lainnya

Saldo per 31 Desember 2018		Rp	51.045.639.716
Penambahan			
Penambahan Saldo Awal	Rp	12.803.370	
Transfer Masuk	Rp	18.793.800	
Pembelian	Rp	837.000.000	
Reklasifikasi Masuk	Rp	3.296.724.947	
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp	42.743	
Jumlah Penambahan	Rp	4.165.364.860	
Pengurangan			

Penghapusan	(Rp 24.916.000)	
Transfer Keluar	(Rp 18.793.800)	
Reklasifikasi Keluar	(Rp 14.835.634)	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(Rp 1.120.700.910)	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(Rp 30.939.384)	
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	(Rp 814.753)	
Jumlah Pengurangan	(Rp 1.211.000.481)	
Kenaikan/(Pengurangan)		Rp 2.954.364.379
Saldo per 31 Desember 2019		Rp 54.000.004.095
Akumulasi Penyusutan		(Rp 97.263.142)
Nilai Buku per 31 Desember 2019		Rp 53.902.740.953

Realisasi belanja modal lainnya selama tahun anggaran 2019 secara netto sebesar Rp163.143.031.400. Dari keseluruhan belanja modal lainnya tersebut, alokasi untuk belanja perolehan Aset Tetap Lainnya adalah sebesar Rp47.047.000. Realisasi belanja modal lainnya yang mempengaruhi mutasi nilai Aset Tetap Lainnya, alokasi penggunaan belanja modal lainnya, dan perolehan Aset Tetap Lainnya yang menggunakan selain belanja modal lainnya dijelaskan sebagai berikut:

Pembelian		Rp 837.000.000
Jumlah realisasi belanja modal lainnya pada perubahan Aset Tetap Lainnya		Rp 837.000.000
Penambahan:		
Belanja modal lainnya yang tidak menghasilkan Aset Tetap Lainnya	Rp 47.047.000	
Jumlah Penambahan	Rp 47.047.000	
Pengurangan:		
Realisasi belanja modal tanah untuk perolehan Aset Tetap Renovasi	(Rp 837.000.000)	
Jumlah Pengurangan	(Rp 837.000.000)	
Lebih/(Kurang)		(Rp 789.953.000)
Realisasi belanja modal lainnya		Rp 47.047.000

Penjelasan perhitungan penambahan dan pengurangan adalah sebagai berikut:

- Penambahan yang berasal dari belanja modal lainnya yang digunakan untuk belanja aset tetap lainnya dalam bentuk cetakan buku yang tidak dicatat sebesar Rp47.047.000.
- Pengurangan yang berasal dari perolehan aset tetap renovasi yang menggunakan belanja modal tanah sebesar Rp837.000.000

Selain nilai Aset Tetap Lainnya tersebut di atas, terdapat Aset Tetap Lainnya yang tidak tercatat di Neraca, namun dicatat secara ekstrakompatabel karena nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebesar Rp40.122.000. Rincian Aset Tetap Lainnya yang masuk pada aset ekstrakompatabel terdapat pada lampiran I Laporan Keuangan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp1.109.199.298

C.1.2.5 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2019 adalah Rp1.109.199.298, sedangkan untuk per 31 Desember 2018 adalah Rp23.786.153.661. Nilai Aset Tetap KDP sebesar Rp1.109.199.298 dibedakan sesuai dengan kondisi sampai dengan tanggal neraca tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 47
Kondisi KDP

No.	Wilayah/Satker	Dilanjutkan (Rp)	Dihentikan Sementara (Rp)	Dihentikan Permanen (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	0	0	92.488.000
2	Jawa Timur	0	0	16.940.000
3	Sulawesi Utara	0	31.500.000	0
4	Sulawesi Tengah	249.050.000	0	0
5	Nusa Tenggara Barat	719.221.298	0	0
Jumlah		968.271.298	31.500.000	109.428.000

KDP yang dilanjutkan adalah KDP yang dilanjutkan pengerjaan di tahun berikutnya yang senilai Rp968.271.298. KDP yang dihentikan sementara adalah KDP yang dihentikan karena kebijakan moratorium pembangunan, terkendala pembebasan tanah, terdapat permasalahan hukum, termasuk belum ada keputusan dilanjutkan atau dihentikan secara pasti dengan nilai sebesar Rp31.500.000. Sedangkan KDP yang dihentikan permanen merupakan KDP yang akan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah atau akan dihapuskan sebesar Rp109.428.000

Nilai KDP per 31 Desember 2019 per wilayah/satker adalah tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 48
Rincian KDP Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-19 (Rp)	31-Des-18 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	92.488.000	685.520.000	(593.032.000)
2	DKI Jakarta	0	22.341.637.655	(22.341.637.655)
3	Jawa Timur	16.940.000	16.940.000	0
4	Aceh	0	231.513.006	(231.513.006)
5	Sulawesi Tengah	249.050.000	0	249.050.000
6	Sulawesi Selatan	0	82.445.000	(82.445.000)
7	Sulawesi Utara	31.500.000	74.558.000	(43.058.000)
8	Nusa Tenggara Barat	719.221.298	0	719.221.298
9	Papua	0	73.800.000	(73.800.000)
10	Maluku Utara	0	279.740.000	(279.740.000)
Jumlah		1.109.199.298	23.786.153.661	(22.676.954.363)

Mutasi perubahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perubahan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo per 31 Desember 2018		Rp	23.786.153.661
Penambahan			
Pembangunan KDP	Rp	111.897.049.217	
Perolehan/Penambahan KDP	Rp	5.343.353.935	
Jumlah Penambahan	Rp	117.240.403.152	
Pengurangan			
Pembangunan Melalui KDP	(Rp)	33.973.226.733	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	(Rp)	105.450.732.121	
Koreksi Nilai KDP	(Rp)	5.155.661	
Penghapusan/ Penghentian KDP	(Rp)	488.243.000	

Jumlah Pengurangan	(Rp 139.917.357.515)	(Rp 22.676.954.363)
Kenaikan/(Pengurangan)		Rp 1.109.199.298
Saldo per 31 Desember 2019		

Penjelasan terinci terkait dengan KDP lebih lanjut tersaji dalam lampiran I Laporan Keuangan.

**Akumulasi
Penyusutan**

Rp1.759.864.758.972

C.1.2.6 Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah Rp1.759.864.758.972, sedangkan untuk per 31 Desember 2018 adalah Rp1.861.827.368.808. Rincian Nilai Buku Aset Tetap yang berasal dari nilai perolehan Aset Tetap setelah dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 49
Rincian Nilai Buku Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan 2019 (Rp)	Nilai Buku (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peralatan dan Mesin	2.115.313.606.795	(1.607.683.274.699)	507.630.332.096
2	Gedung dan Bangunan	1.900.603.566.704	(152.084.221.131)	1.748.519.345.573
3	Aset Tetap Lainnya	54.000.004.095	(97.263.142)	53.902.740.953
Jumlah		4.069.917.177.594	(1.759.864.758.972)	2.310.052.418.622

Nilai Akumulasi Penyusutan pada Neraca Laporan Keuangan dibandingkan dengan Laporan Barang Milik Negara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 50
Perbandingan Akumulasi Penyusutan antara Neraca dan Laporan BMN Per 31 Desember 2019

Uraian	Neraca (Rp)	SIMAK BMN (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Peralatan dan Mesin	(1.607.683.274.699)	(1.607.683.274.699)	0
Gedung dan Bangunan	(152.084.221.131)	(152.084.221.131)	0
Aset Tetap Lainnya	(97.263.142)	(97.263.142)	0
Jumlah	(1.759.864.758.972)	(1.759.864.758.972)	0

Tidak terdapat perbedaan nilai akumulasi penyusutan antara Laporan Barang Milik Negara dengan Laporan Keuangan per 31 Desember 2019.

Piutang Jangka Panjang
Rp833.164.388

C.1.3 Piutang Jangka Panjang

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Rp837.351.144

C.1.3.1 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2019 adalah Rp837.351.144, sedangkan untuk per 31 Desember 2018 adalah Rp280.954.219. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Saldo ini merupakan Tagihan TP/TGR yang belum dilimpahkan ke KPKNL dan pelunasannya di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya setelah tanggal pelaporan.

Sebagaimana pada akun Piutang Bukan Pajak dan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR maka penerapan penyisihan piutang tidak tertagih juga terjadi pada akun Tagihan TP/TGR. Hal ini disebabkan Tagihan TP/TGR merupakan akun Piutang yang bersifat jangka panjang.

Berdasarkan Perka BPS Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Di Lingkungan BPS maka penetapan adanya kerugian negara oleh pegawai non bendahara didasarkan pada dokumen SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan.

Nilai Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2019 sebesar Rp837.351.144 merupakan nilai Tagihan TP/TGR dari debitur yang sudah melalui proses telah ditetapkan oleh tim TPKN BPS.

Daftar saldo Tagihan TP/TGR per wilayah/satker adalah terinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 51
Rincian Tagihan TP/TGR Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-19 (Rp)	31-Des-18 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	837.351.144	280.954.219	556.396.925
Jumlah		837.351.144	280.954.219	556.396.925

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi
Rp4.186.756

C.1.3.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp4.186.756 dan Rp23.539.911. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diterapkan untuk mengetahui nilai realisasi bersih dari Piutang. Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ini berdasarkan kualitas Piutang pada setiap tanggal pelaporan.

Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR per wilayah/satker adalah tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 52
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR Per Wilayah/Satker

Wilayah/Satker	Kualitas Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan (%)	Nilai Penyisihan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Settama	Lancar	837.351.144	0,5%	4.186.756
	Kurang Lancar	0	10%	0
Jumlah		837.351.144		4.186.756

Aset Lainnya
Rp313.215.059.391

C.1.4 Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp313.215.059.391 dan Rp228.866.650.405. Rincian nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersaji seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel 53
Rincian Aset Lainnya

No.	Uraian	31-Des-19 (Rp)	31-Des-18 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aset Tak berwujud	818.269.993.123	660.902.639.698
2	Aset Lain-lain	119.939.596.185	99.943.393.399
Jumlah		938.209.589.308	760.846.033.097
	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(624.994.529.917)	(531.979.382.692)
Nilai Buku Aset Lainnya		313.215.059.391	228.866.650.405

Penjelasan mengenai rincian mutasi perubahan Aset Lainnya yang terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain akan dijelaskan dalam penjelasan per akun

Aset Tak Berwujud
Rp818.269.993.123

C.1.4.1 Aset Tak Berwujud

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 adalah Rp818.269.993.123, sedangkan untuk per 31 Desember 2018 adalah Rp660.902.639.698.

Aset Tak Berwujud yang tercatat dalam Neraca yang dimiliki oleh BPS senilai Rp818.269.993.123, terdiri dari:

1. *Software* dengan nilai Rp493.796.273.241.
2. Lisensi dengan nilai Rp324.473.719.882

Nilai buku Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah Rp306.042.383.188. Nilai Buku Aset Tak Berwujud diperoleh dengan mengurangi antara nilai perolehan dengan akumulasi amortisasinya yang sebesar Rp512.227.609.935.

Mutasi perubahan nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perubahan Nilai Aset Lainnya Aset Tak Berwujud

Saldo per 31 Desember 2018		Rp	660.902.639.698
Penambahan			
Penambahan Saldo Awal	Rp	497.175.000	

Pembelian	Rp	161.845.937.791	
Transfer Masuk	Rp	3.168.150.000	
Reklasifikasi Masuk	Rp	47.775.000	
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	Rp	110.907.054	
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp	166.500.353	
Jumlah Penambahan	Rp	165.836.445.198	
Pengurangan			
Transfer Keluar	(Rp)	3.168.150.000	
Reklasifikasi Keluar	(Rp)	47.775.000	
Koreksi Pencatatan	(Rp)	497.175.000	
Transaksi Normalisasi BMN	(Rp)	420.559.439	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(Rp)	4.335.432.334	
Jumlah Pengurangan	(Rp)	8.469.091.773	
Kenaikan/(Pengurangan)			Rp 157.367.353.425
Saldo per 31 Desember 2019			Rp 818.269.993.123
Amortisasi Aset Tak Berwujud			(Rp 512.227.609.935)
Nilai Buku per 31 Desember 2019			Rp 306.042.383.188

Realisasi belanja modal lainnya selama tahun anggaran 2019 secara netto sebesar Rp163.143.031.400. Dari keseluruhan belanja modal lainnya tersebut, alokasi untuk belanja Aset Tak Berwujud adalah sebesar Rp163.095.984.400. Realisasi belanja modal lainnya yang mempengaruhi mutasi nilai Aset Tak Berwujud, alokasi penggunaan belanja modal lainnya, dan perolehan Aset Tak Berwujud yang menggunakan selain belanja modal lainnya dijelaskan sebagai berikut:

Pembelian		Rp	161.845.937.791
Jumlah realisasi belanja modal lainnya pada mutasi nilai Aset Tak Berwujud		Rp	161.845.937.791
Penambahan:			
Belanja modal ATB yang menjadi perolehan aset Peralatan dan Mesin	Rp	440.000.000	
Belanja modal ATB yang tidak menjadi aset (putus kontrak)	Rp	6.089.407.500	
Jumlah Penambahan	Rp	6.529.407.500	
Pengurangan:			
Perolehan ATB yang menggunakan belanja modal peralatan dan mesin	(Rp)	5.279.360.891	
Jumlah Pengurangan	(Rp)	5.279.360.891	
Lebih/(Kurang)			Rp 1.250.046.609
Realisasi belanja modal lainnya		Rp	163.095.984.400

Penjelasan perhitungan penambahan dan pengurangan adalah sebagai berikut:

- Penambahan dikarenakan adanya realisasi belanja modal ATB yang digunakan untuk perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp440.000.000.
- Belanja modal ATB yang tidak terkapitalisasi menjadi aset ATB dikarenakan putus kontrak sebesar Rp6089.407.500
- Pengurangan yang berasal dari perolehan ATB yang menggunakan belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp5.279.360.891

Aset Lain-Lain
Rp119.939.596.185

C.1.4.2 Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2019 adalah Rp119.939.596.185, sedangkan untuk per 31 Desember 2018 adalah Rp99.943.393.399. Pos Aset Lain-lain ini digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud. Nilai Aset Lain-lain tersebut diperoleh dari Aset Tetap yang rusak dan

tidak dipergunakan kembali untuk operasional tetapi belum dilakukan penghapusan dan masih tercatat sebagai aset.

Nilai buku Aset Lain-Lain pada tanggal pelaporan adalah Rp7.172.676.203. Nilai Buku Aset Lain-lain diperoleh dengan mengurangkan antara nilai perolehan dengan akumulasi penyusutannya yang sebesar Rp112.766.919.982. Perhitungan akumulasi penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2019 terdapat pada **Lampiran A1**.

Perhitungan mutasi nilai Aset Lain-Lain yang merupakan Aset Tetap yang rusak dan tidak dipergunakan kembali untuk operasional per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018		Rp	99.943.393.399
Penambahan			
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp	103.950.065.532	
Revaluasi Aset (<i>Take In</i>)	Rp	3.643.460.310	
Jumlah Penambahan	Rp	107.593.525.842	
Pengurangan			
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(Rp)	2.122.655.779	
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(Rp)	15.052.886.819	
Hibah Keluar (BMN yang dihentikan)	(Rp)	786.372.000	
Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	(Rp)	45.816.146	
Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	(Rp)	144.738.986	
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(Rp)	64.741.495.183	
Usulan Barang Hilang ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(Rp)	239.225.287	
Revaluasi Aset (<i>Take In</i>)	(Rp)	4.464.132.856	
Jumlah Pengurangan	(Rp)	87.597.323.056	
Kenaikan/(Pengurangan)		Rp	19.996.202.786
Saldo per 31 Desember 2019		Rp	119.939.596.185
Akumulasi Penyusutan		(Rp)	112.766.919.982
Nilai Buku per 31 Desember 2019		Rp	7.172.676.203

Selain nilai Aset Lain-lain tersebut di atas, terdapat Aset Lain-lain yang tidak tercatat di Neraca, namun dicatat secara ekstrakompatabel karena nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebesar Rp548.848.409. Rincian Aset Lain-lain yang masuk pada aset ekstrakompatabel terdapat pada lampiran I Laporan Keuangan.

Akumulasi Penyusutan /
Amortisasi Aset Lainnya
Rp624.994.529.917

C.1.4.3 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp624.994.529.917 dan Rp531.979.382.692. Rincian Nilai Buku Aset Lainnya yang berasal dari nilai perolehan Aset Lainnya setelah dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2019 tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 54
Rincian Nilai Buku Aset Lainnya

No.	Nama Akun	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan / Amortisasi 2019 (Rp)	Nilai Buku (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Aset Tak Berwujud			
1.	Software	493.796.273.241	(311.079.104.018)	182.717.169.223
2.	Lisensi	324.473.719.882	(201.148.505.917)	123.325.213.965

Jumlah		818.269.993.123	(512.227.609.935)	306.042.383.188
B.	Aset Lain-Lain			
1.	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	113.708.346.294	(106.536.654.466)	7.171.691.828
2.	ATB Yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	6.231.249.891	(6.230.265.516)	984.375
Jumlah		119.939.596.185	(112.766.919.982)	7.172.676.203
Total		938.209.589.308	(624.994.529.917)	313.215.059.391

Amortisasi Aset Tak Berwujud yang disajikan dalam laporan keuangan ini menggunakan metode amortisasi garis lurus tanpa memperhitungkan nilai residu/sisa. Hal ini untuk menyajikan Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas. Untuk Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Dasar perhitungan amortisasi Aset Tak Berwujud adalah menggunakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KMK.06/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

C.2 KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek
Rp82.079.287.015

C.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji sebesar Rp82.079.287.015 dan Rp133.409.030.272. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Adapun Kewajiban yang tersaji pada laporan keuangan BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 hanya terklasifikasi sebagai Kewajiban Jangka Pendek.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman (bagian lancar utang jangka panjang dan utang pada pihak ketiga), utang bunga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), serta utang jangka pendek lainnya.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 55
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No.	Uraian	31-Des-19 (Rp)	31-Des-18 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	81.489.985.473	132.577.726.879
2	Hibah Yang Belum Disahkan	357.390.000	0
3	Pendapatan Diterima Dimuka	168.876.626	406.655.330
4	Uang Muka dari KPPN	60.431.458	262.099.491
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.603.458	162.548.572
Jumlah		82.079.287.015	133.409.030.272

Utang Kepada Pihak
Ketiga
Rp81.489.985.473

C.2.1.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp81.489.985.473 dan Rp132.577.726.879. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga ini mengungkapkan kewajiban pemerintah yang masih harus diakui karena telah diterimanya hak dari pihak ketiga yang terjadi pada saat tanggal neraca. Rincian saldo utang pihak ketiga tersaji pada tabel berikut :

Tabel 56
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

No.	Uraian	31-Des-19 (Rp)	31-Des-18 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	77.970.967.536	74.640.474.242
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	3.243.900.942	18.379.999.527
3	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	26.660.000	31.983.309.185
4	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	248.456.094	5.230.274.094
5	Dana Pihak Ketiga	901	2.343.669.831
Jumlah		81.489.985.473	132.577.726.879

Saldo Utang pada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 pada Neraca berasal dari belanja yang masih harus dibayar dan utang pada pihak ketiga lainnya. Saldo Utang Pihak Ketiga pada Neraca per 31 Desember 2019 berupa Belanja yang masih harus dibayar merupakan kewajiban entitas yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima entitas, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan atas hal tersebut kepada pegawai (belanja pegawai) dan/atau pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa (belanja barang dan belanja modal), terdiri dari:

1. Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp77.970.967.536, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Nilai
Belanja Gaji Pokok PNS	160.866.794
Belanja Pembulatan Gaji PNS	31.870
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	9.867.720
Belanja Tunj. Anak PNS	3.015.388
Belanja Tunj. Struktural PNS	25.395.150
Belanja Tunj. Fungsional PNS	156.472.850
Belanja Tunj. PPh PNS	2.380.135
Belanja Tunj. Beras PNS	362.100
Belanja Uang Makan PNS	2.315.615.000
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	2.775.000
Belanja Tunjangan Umum PNS	7.440.000
Belanja Tunjangan Profesi Dosen	150.169.492
Belanja Uang Lembur	33.656.000
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	75.102.920.037
	77.970.967.536

2. Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp3.243.900.942, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Nilai
Belanja Persediaan barang konsumsi	63.000

Belanja Keperluan Perkantoran	567.083.322
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12.161.963
Belanja Honor Output Kegiatan	25.941.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	64.000
Belanja Langganan Listrik	1.948.242.205
Belanja Langganan Telepon	133.530.170
Belanja Langganan Air	159.062.904
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	858.000
Belanja Jasa Lainnya	308.339.200
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.206.344
Belanja Perjalanan Biasa	43.996.580
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.360.000
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	(7.007.746)
	3.243.900.942

Terdapat penyesuaian pencatatan atas uang pada kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp7.007.746 untuk belanja barang yang belum dibayarkan akibat disetor ke kas negara sebagai UP/TUP.

3. Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp26.660.000, yang merupakan tunggakan belanja modal gedung dan bangunan yang terdapat pada wilayah Papua Barat sebesar Rp22.660.000 dan wilayah DKI Jakarta sebesar Rp4.000.000.
4. Utang pihak ketiga lainnya sebesar Rp248.456.094, yaitu kewajiban kepada pihak ketiga yang akan direalisasikan setelah tanggal 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Wilayah	Satker	Nilai Utang Pihak Ketiga Lainnya (Rp)	Penjelasan
Jawa Barat	BPS Kab. Sukabumi	11.657.850	saldo dana kerjasama kegiatan SPI yang belum dibayarkan ke tim pelaksana
Jawa Timur	BPS Kab. Nganjuk	112.500	kelebihan pembayaran uang makan yang disimpan bendahara
	BPS Kab. Gresik	7.007.746	kelebihan setor sisa UP/TUP ke kas negara
	BPS Kab. Batu	356.500	honor entri SHPRB yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga atau mitra
Lampung	BPS Kab. Pringsewu	135.254.000	dana kerjasama yang belum dibayarkan pada pihak ketiga
Kalimantan Selatan	BPS Kab. Hulu Sungai Selatan	110.000	honor tim pelaksana kerjasama yang belum dibayarkan
Kalimantan Timur	BPS Propinsi Kalimantan Timur	727	saldo RPL SPI berupa jasa giro
	BPS Kota Bontang	100.000	honor tim pelaksanaan yang belum dibayarkan
Sulawesi Utara	BPS Kota Bitung	1.716	saldo RPL SPI berupa jasa giro
	BPS Kota Tomohon	908	saldo RPL SPI berupa jasa giro
Sulawesi Selatan	BPS Kab. Soppeng	18.628	saldo RPL SPI berupa jasa giro
	BPS Kab. Bone	356	saldo RPL SPI berupa jasa giro
NTB	BPS Propinsi NTB	97.812	saldo RPL SPI berupa jasa giro
Gorontalo	BPS Kab. Boalemo	14.984.450	dana kerjasama yang belum dibayarkan ke tim pelaksana
Papua Barat	BPS Kab. Manokwari	78.697.638	uang perjalanan dinas yang belum diberikan oleh satker kepada pihak ketiga
Kalimantan Utara	BPS Kab. Bulungan	55.263	saldo RPL SPI berupa jasa giro

5. Dana Pihak Ketiga sebesar Rp901 merupakan saldo RPL untuk kerjasama SPI berupa jasa giro pada BPS Kabupaten Pahuwato.

Daftar Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 per wilayah/satker adalah terinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 57
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Berupa Belanja Yang Masih Harus Dibayar Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	Belanja Yg Masih Harus Dibayar (Rp)				
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Utang Pihak Ketiga Lainnya	Dana Pihak Ketiga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Settama	8.349.989.196	447.001.027	0	0	0
2	Pusdiklat	398.097.295	34.550.110	0	0	0
3	Polstat STIS	748.998.215	112.078.703	0	0	0
4	DKI Jakarta	1.118.158.134	64.143.965	4.000.000	0	0
5	Jawa Barat	4.616.532.474	146.098.872	0	11.657.850	0
6	Jawa Tengah	6.467.656.534	262.251.496	0	0	0
7	Di Yogyakarta	1.307.095.052	56.634.757	0	0	0
8	Jawa Timur	5.347.777.085	275.837.861	0	7.476.746	0
9	Aceh	2.523.187.569	34.035.205	0	0	0
10	Sumatera Utara	3.848.592.670	145.495.016	0	0	0
11	Sumatera Barat	2.215.295.894	103.693.510	0	0	0
12	Riau	1.759.045.556	42.017.711	0	0	0
13	Jambi	1.433.974.059	66.676.595	0	0	0
14	Sumatera Selatan	2.144.838.076	103.137.002	0	0	0
15	Lampung	2.032.489.011	101.100.162	0	135.254.000	0
16	Kalimantan Barat	1.959.110.941	71.796.850	0	0	0
17	Kalimantan Tengah	1.626.963.998	85.543.428	0	0	0
18	Kalimantan Selatan	1.955.682.206	127.179.484	0	110.000	0
19	Kalimantan Timur	1.441.386.284	50.747.975	0	100.727	0
20	Sulawesi Utara	1.646.231.294	56.896.898	0	2.624	0
21	Sulawesi Tengah	1.701.423.054	65.992.319	0	0	0
22	Sulawesi Selatan	3.073.025.469	159.424.632	0	18.984	0
23	Sulawesi Tenggara	2.024.611.170	127.047.854	0	0	0
24	Maluku	1.458.017.196	1.601.000	0	0	0
25	Bali	1.287.322.052	52.976.510	0	0	0
26	Nusa Tenggara Barat	797.053.192	4.267.635	0	97.812	0
27	Nusa Tenggara Timur	2.526.683.838	43.213.769	0	0	0
28	Papua	2.241.621.301	60.835.464	0	0	0
29	Bengkulu	1.235.450.188	37.591.997	0	0	0
30	Maluku Utara	1.213.539.076	42.654.741	0	0	0
31	Banten	1.504.419.762	68.171.407	0	0	0
32	Kep. Bangka Belitung	987.968.576	37.373.977	0	0	0
33	Gorontalo	969.748.130	1.391.100	0	14.984.450	901
34	Kepulauan Riau	1.024.629.382	48.430.677	0	0	0
35	Papua Barat	1.296.033.470	39.458.853	22.660.000	78.697.638	0
36	Sulawesi Barat	1.068.866.161	43.336.738	0	0	0
37	Kalimantan Utara	619.453.976	23.215.642	0	55.263	0
Jumlah		77.970.967.536	3.243.900.942	26.660.000	248.456.094	901

Hibah Yang Belum Disahkan
Rp357.390.000

C.2.1.2 Hibah Yang Belum Disahkan

Saldo Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp357.390.000 dan Rp0. Hibah merupakan penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat

berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam atau luar negeri. Hibah yang belum disahkan pada Neraca BPS per 31 Desember 2019 merupakan saldo hibah yang diterima oleh BPS dan belum dilakukan pengesahan sampai dengan tanggal neraca. Hibah yang belum disahkan dalam neraca dicatat sebesar nilai nominalnya dan disajikan dalam bentuk mata uang rupiah.

Rincian saldo Hibah yang belum disahkan per 31 Desember 2019 adalah tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 58
Rincian Hibah Yang Belum Disahkan Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-19 (Rp)	31-Des-18 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	357.390.000	0	357.390.000
Jumlah		357.390.000	0	357.390.000

Hibah Yang Belum Disahkan pada Neraca BPS per 31 Desember 2019 merupakan saldo pada wilayah Aceh sebesar Rp357.390.000. Saldo ini merupakan hibah atas Tanah yang ditempati kantor BPS Kota Subulussalam yang diterima dari Pemerintah Kota Subulussam seluas 1.000 m².

*Pendapatan Yang
Diterima Dimuka
Rp168.876.626*

C.2.1.3 Pendapatan Yang Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan yang diterima dimuka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp168.876.626 dan Rp406.655.330. Pendapatan yang Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah dan sudah disetor ke Kas Negara, namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari pemerintah.

Rincian saldo Pendapatan Yang Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 adalah tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 59
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-19 Rp	31-Des-18 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	96.917.817	164.257.666	(67.339.849)
2	STIS	0	4.407.720	(4.407.720)
3	Jawa Tengah	15.468.683	11.761.000	3.707.683
4	DI Yogyakarta	4.800.657	0	4.800.657
5	Jawa Timur	704.889	649.708	55.181
6	Lampung	45.871.518	225.350.000	(179.478.482)
7	Sulawesi Tenggara	3.014.973	0	3.014.973
8	Papua barat	2.098.089	229.236	1.868.853
Jumlah		168.876.626	406.655.330	(237.778.704)

Saldo Pendapatan yang diterima dimuka per 31 Desember 2019 terdapat pada:

1. Settama, nilainya sebesar Rp96.917.817 yang terdiri dari penerimaan sewa bangunan untuk ATM dan kantor kas BRI sebesar Rp23.231.453, sewa tempat untuk ATM Bank Mandiri sebesar Rp29.248.592, sewa ruangan untuk toko mini koperasi sebesar Rp22.964.329, dan sewa ruangan untuk kantin sebesar Rp21.473.443.
2. Jawa Tengah, nilainya sebesar Rp15.468.683, yang terdiri dari penerimaan swa ruangan untuk kantin sebesar Rp11.293.461 dan sewa ruangan untuk koperasi sebesar Rp4.175.222.
3. DI Yogyakarta, nilainya sebesar Rp4.800.657 merupakan sewa ruangan untuk koperasi.
4. Jawa Timur, nilainya sebesar Rp704.889 merupakan penerimaan sewa ruangan untuk koperasi.
5. Lampung, nilainya sebesar Rp45.871.518 merupakan penerimaan sewa bangunan pada BPS Kabupaten Metro untuk toko yang belum dijalani oleh pihak ketiga dengan periode sewa April 2018 sampai dengan April 2020.
6. Sulawesi Tenggara, nilainya sebesar Rp3.014.973 merupakan penerimaan sewa ruangan untuk koperasi pada BPS Provinsi Sulawesi Tenggara dengan periode sewa 7 Oktober 2018 sampai dengan 6 September 2020.
7. Papua Barat, nilainya sebesar Rp2.098.089 merupakan penerimaan atas pendapatan sewa rumah dinas pada BPS Kota Sorong.

Utang Muka Dari
KPPN
Rp60.431.458

C.2.1.4 Utang Muka dari KPPN

Saldo Utang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp60.431.458 dan Rp262.099.491. Utang Muka dari KUN merupakan UP/TUP yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran.

Utang Jangka Pendek
lainnya
Rp2.603.458

C.2.1.5 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp2.603.458 dan Rp162.548.572. Utang Jangka Pendek Lainnya digunakan untuk mencatat potongan pajak yang dipotong oleh Bendahara Pengeluaran dan belum disetor ke Kas Negara sampai tanggal pelaporan.

Rincian saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 adalah tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 60
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-19 (Rp)	31-Des-18 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	0	158.470.619	(158.470.619)
2	DKI Jakarta	0	4.073.353	(4.073.353)
3	Jawa Tengah	844.350	0	844.350

4	Sumatera Utara	935.681	0	935.681
5	Kalimantan Timur	457.877	0	457.877
6	Bangka Belitung	0	4.600	(4.600)
7	Gorontalo	365.550	0	365.550
Jumlah		2.603.458	162.548.572	(159.945.114)

C.3 EKUITAS

Ekuitas

Rp5.694.691.733.886

C.3.1 Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp5.694.691.733.886 dan Rp2.946.911.855.967. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang berasal dari selisih antara aset dan kewajiban. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN OPERASIONAL

D.1.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pendapatan Negara Bukan Pajak merupakan hak pemerintah yang tidak berasal dari perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp45.328.204.611.

Pendapatan Negara
Bukan Pajak Lainnya
Rp45.328.204.611

D.1.1.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Saldo Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp45.328.204.611 dan Rp36.754.144.184. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 61
Rincian PNBPN Lainnya 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	NAIK (TURUN) %
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan	0	551.250	(100,00)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.109.582.455	1.942.724.234	8,59
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	220.000	(100,00)
Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya	0	2.499.000	(100,00)
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	4.754.100.000	4.623.300.000	2,83
Pendapatan Biaya Pendidikan	0	120.569.655	(100,00)
Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	12.150.000	(100,00)
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	877.500.000	1.053.000.000	(16,67)
Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	27.888.652.200	21.265.109.159	31,15
Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	8.755.123.469	5.554.667.094	57,62
Pendapatan Jasa Lainnya	604.240.000	0	100,00
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	1.734.776	35.046.671	(95,05)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	312.797.954	2.131.497.590	(85,32)
Pendapatan Denda Lainnya	0	531.000	(100,00)
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	466.360	4.910.706	(90,50)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	24.007.397	7.367.825	225,84
Jumlah	45.328.204.611	36.754.144.184	23,33

Adapun perbandingan saldo PNBPN Lainnya pada LO dengan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 62
Perbandingan PNBPN Lainnya LO dan LRA 31 Desember 2019

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.109.582.455	1.865.632.118	243.950.337
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	4.754.100.000	4.754.100.000	0

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	877.500.000	877.500.000	0
Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	27.888.652.200	27.888.652.200	0
Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	8.755.123.469	8.755.203.469	(80.000)
Pendapatan Jasa Lainnya	604.240.000	604.240.000	0
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	1.734.776	4.938.992	(3.204.216)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	312.797.954	2.366.921.147	(2.054.123.193)
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	466.360	466.360	0
Pendapatan Anggaran Lain-lain	24.007.397	29.557.037	(5.549.640)
Jumlah	45.328.204.611	47.147.211.323	(1.819.006.712)

Rincian perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Saldo PNBP Lainnya - LRA		47.147.211.323
Penambah :		
Penerimaan tunai PNBP jasa giro yang belum disetor ke Kas Negara	85.187	
Pendapatan yg masih harus diterima atas PNBP sewa	9.623.499	
Piutang bukan pajak atas PNBP sewa	20.307.835	
Piutang bukan pajak atas PNBP denda	21.420.764	
Penyesuaian saldo Piutang TGR atas lebih setor PNBP TGR	21.360	
Pendapatan sewa yang diterima dimuka	887.579.266	
Jumlah Penambah	939.037.911	
Pengurang :		
Setoran ke Kas Negara atas penerimaan tunai PNBP hasil survey TA 2018	80.000	
Setoran ke Kas Negara atas penerimaan tunai PNBP jasa giro TA 2018-2019	3.289.403	
Realisasi pendapatan yg masih harus diterima atas PNBP sewa TA 2018	7.404.607	
Realisasi pendapatan yg masih harus diterima atas PNBP denda TA 2018	3.785.591	
Pelunasan piutang bukan pajak atas PNBP sewa TA 2018	16.138.382	
Pelunasan piutang bukan pajak atas PNBP denda TA 2018	2.071.758.366	
Pelunasan piutang bukan pajak atas lebih realisasi belanja barang dari dana hibah ADB 2017	5.571.000	
Saldo pendapatan sewa diterima dimuka TA 2018-2019	649.800.562	
koreksi jurnal balik atas penyesuaian TA 2018 berupa pendapatan sewa TA 2018 yang disetorkan pada TA 2019	216.712	
Jumlah Pengurang	2.758.044.623	
Total Tambah/(Kurang)	(1.819.006.712)	
Saldo PNBP Lainnya - LO	45.328.204.611	

D.2 BEBAN OPERASIONAL

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Saldo Beban Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 berasal dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Penyusutan dan Amortisasi, serta Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

D.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi dalam bentuk uang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Diberikan kepada pejabat negara,

Beban Pegawai
Rp2.137.096.589.165

Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah dan belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Saldo Beban Pegawai pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp2.137.096.589.165 dan Rp2.013.618.424.143. Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 63
Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	NAIK (TURUN) %
(1)	(2)	(3)	(4)
Beban Gaji Pokok PNS	745.734.295.469	696.622.343.773	7,05
Beban Pembulatan Gaji PNS	10.816.615	10.356.836	4,44
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	50.136.493.698	47.798.144.037	4,89
Beban Tunj. Anak PNS	15.309.821.683	14.449.511.673	5,95
Beban Tunj. Struktural PNS	41.675.731.750	40.859.656.000	2,00
Beban Tunj. Fungsional PNS	38.652.180.198	33.765.625.404	14,47
Beban Tunj. PPh PNS	2.117.015.754	1.623.803.574	30,37
Beban Tunj. Beras PNS	36.704.490.470	36.537.676.298	0,46
Beban Uang Makan PNS	91.914.273.543	81.739.382.124	12,45
Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	427.487.500	434.075.000	(1,52)
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	3.903.957.500	3.714.471.000	5,10
Beban Tunjangan Umum PNS	18.306.092.132	19.066.874.843	(3,99)
Beban Tunjangan Profesi Dosen	1.863.646.790	1.461.566.776	27,51
Beban Uang Lembur	18.083.687.242	18.655.852.800	(3,07)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1.072.256.598.821	1.016.879.084.005	5,45
Jumlah	2.137.096.589.165	2.013.618.424.143	6,13

Adapun perbandingan antara saldo Beban Pegawai pada Laporan Operasional dengan Belanja Pegawai pada LRA Belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 64
Perbandingan Beban Pegawai LO dan LRA 31 Desember 2019

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)
Beban Gaji Pokok PNS	745.734.295.469	745.775.666.294	(41.370.825)
Beban Pembulatan Gaji PNS	10.816.615	10.798.511	18.104
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	50.136.493.698	50.152.245.910	(15.752.212)
Beban Tunj. Anak PNS	15.309.821.683	15.310.101.960	(280.277)
Beban Tunj. Struktural PNS	41.675.731.750	41.675.115.100	616.650
Beban Tunj. Fungsional PNS	38.652.180.198	38.621.187.148	30.993.050
Beban Tunj. PPh PNS	2.117.015.754	2.121.243.374	(4.227.620)
Beban Tunj. Beras PNS	36.704.490.470	36.705.866.450	(1.375.980)
Beban Uang Makan PNS	91.914.273.543	91.276.595.410	637.678.133
Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	427.487.500	427.625.000	(137.500)
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	3.903.957.500	3.901.620.000	2.337.500
Beban Tunjangan Umum PNS	18.306.092.132	18.325.084.496	(18.992.364)
Beban Tunjangan Profesi Dosen	1.863.646.790	1.814.710.456	48.936.334
Beban Uang Lembur	18.083.687.242	18.652.632.292	568.945.050
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1.072.256.598.821	1.069.819.994.420	2.436.604.401
Jumlah	2.137.096.589.165	2.134.590.486.821	2.506.102.344

Rincian perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Saldo Belanja Pegawai – LRA		2.134.590.486.821
Penambah :		
Setoran tunai ke Kas Negara atas kelebihan pencairan belanja uang makan 2018	1.765.350	
Pelunasan piutang atas kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan	104.099.740	
Belanja pegawai yg masih harus dibayar atas realisasi belanja gaji dan tunjangan TA 2019	77.974.361.933	
Jumlah Penambah	78.080.227.023	
Pengurang :		
Saldo tunai yang belum disetor ke Kas Negara atas kelebihan pencairan belanja gaji dan tunjangan TA 2019	648.537.617	
Piutang atas kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan TA 2019	213.588.974	
Pelunasan belanja pegawai yg masih harus dibayar atas kekurangan pembayaran belanja uang makan 2018	74.650.183.880	
koreksi penyesuaian TA 2019 berupa kelebihan bayar belanja pegawai TA 2019	745.050	
koreksi atas penyesuaian TA 2019 berupa pengembalian belanja tunj struktural TA 2019 yang belum disetor ke kas negara	710.000	
Penyesuaian atas pelunasan kekurangan realisasi belanja gaji dan tunjangan TA 2018	60.359.158	
Jumlah Pengurang	75.574.124.679	
Total Tambah/(Kurang)		2.506.102.344
Saldo Beban Pegawai - LO		2.137.096.589.165

Beban Persediaan
Rp55.256.909.040

D.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi/pemakaian atas barang-barang persediaan yang habis pakai. Saldo Beban Persediaan pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp55.256.909.040 dan Rp60.105.843.765. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 65
Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	NAIK (TURUN) %
(1)	(2)	(3)	(4)
Beban Persediaan Konsumsi	55.256.909.040	60.105.843.765	(8,07)
Jumlah	55.256.909.040	60.105.843.765	(8,07)

Rincian perhitungan dari Beban Persediaan adalah sebagai berikut,

Saldo Awal Persediaan - Neraca		29.209.225.390
Penambah :		
Koreksi saldo awal	- Barang konsumsi	216.948.956
Pembelian	- Barang konsumsi	103.905.742.724
	- Bahan untuk pemeliharaan	2.003.451.616
	- Persediaan untuk tujuan strategis	149.500
Transfer masuk	- Barang konsumsi	13.654.010.693
	- Bahan untuk pemeliharaan	192.500
Reklas masuk	- Barang konsumsi	1.590.540

Pendapatan penyesuaian nilai persediaan	- Bahan untuk pemeliharaan	67.500	
	- Barang konsumsi	1.680.655.917	
Hasil opname fisik - Tambah (Non Konsumsi)	- Bahan untuk pemeliharaan	52.405.654	
	- Bahan untuk pemeliharaan	1.162.600	
Koreksi tambah	- Barang konsumsi	60.899.630	
	Jumlah Penambah	121.577.277.830	
Pengurang :			
Saldo Akhir Persediaan	- Barang konsumsi	77.844.174.773	
	- Bahan untuk pemeliharaan	691.943.177	
Pemakaian (Non Konsumsi)	- Bahan untuk pemeliharaan	1.922.458.639	
Transfer keluar	- Barang konsumsi	13.654.010.693	
	- Bahan untuk pemeliharaan	192.500	
Barang usang	- Barang konsumsi	375.569.035	
	- Bahan untuk pemeliharaan	5.600.826	
Barang rusak	- Barang konsumsi	4.717.987	
Penghapusan lainnya	- Barang konsumsi	46.390.532	
Reklas keluar	- Barang konsumsi	12.464.700	
	- Persediaan untuk tujuan strategis	135.000	
Beban penyesuaian nilai persediaan	- Barang konsumsi	535.424.043	
	- Bahan untuk pemeliharaan	26.277.851	
	- Persediaan untuk tujuan strategis	14.500	
Hasil opname fisik - Kurang (Non Konsumsi)	- Bahan untuk pemeliharaan	71.976.901	
Koreksi kurang	- Barang konsumsi	277.713.873	
	- Bahan untuk pemeliharaan	60.529.150	
	Jumlah Pengurang	95.529.594.180	
	Total Tambah/Kurang	26.047.683.650	
Saldo Beban Persediaan - LO			55.256.909.040

Beban Barang dan
Jasa
Rp980.719.011.337

D.2.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa termasuk aset ekstrakomptabel yang dimanfaatkan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan operasional entitas pelaporan. Saldo Beban Barang dan Jasa pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp980.719.011.337 dan Rp924.981.968.556. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 66
Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	NAIK (TURUN) %
(1)	(2)	(3)	(4)
Beban Keperluan Perkantoran	150.861.450.695	134.677.714.048	12,02
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	1.698.584.555	3.361.988.146	(49,48)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.719.219.854	2.469.850.698	50,58
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	51.541.431.400	46.745.495.000	10,26
Beban Barang Operasional Lainnya	1.540.020.396	1.551.109.362	(0,71)
Beban Bahan	172.155.632.823	142.236.671.947	21,03
Beban Honor Output Kegiatan	460.136.486.812	460.174.707.609	(0,01)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	26.862.627.583	32.297.205.307	(16,83)
Beban Langganan Listrik	36.772.841.347	34.633.088.001	6,18
Beban Langganan Telepon	1.878.258.325	2.177.957.657	(13,76)
Beban Langganan Air	1.621.778.178	1.548.318.047	4,74
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	38.841.800	43.131.160	(9,94)
Beban Jasa Konsultan	1.443.946.000	5.000.764.600	(71,13)
Beban Sewa	10.790.243.800	9.955.314.751	8,39

Beban Jasa Profesi	8.487.789.900	8.699.240.100	(2,43)
Beban Jasa Lainnya	48.202.143.771	38.442.309.718	25,39
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	2.967.714.098	967.102.405	206,87
Jumlah	980.719.011.337	924.981.968.556	6,03

Adapun perbandingan antara saldo Beban Barang dan Jasa pada Laporan Operasional dengan Belanja Barang dan Jasa pada LRA Belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 67
Perbandingan Beban Barang dan Jasa LO dan LRA 31 Desember 2019

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Beban Keperluan Perkantoran	150.861.450.695	155.394.738.082	(4.533.287.387)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	1.698.584.555	1.698.584.555	0
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.719.219.854	3.723.042.546	(3.822.692)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	51.541.431.400	51.541.431.400	0
Beban Barang Operasional Lainnya	1.540.020.396	1.540.120.396	(100.000)
Beban Bahan	172.155.632.823	173.423.415.373	(1.267.782.550)
Beban Honor Output Kegiatan	460.136.486.812	460.424.043.512	(287.556.700)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	26.862.627.583	26.865.580.633	(2.953.050)
Beban Langganan Listrik	36.772.841.347	36.446.975.715	325.865.632
Beban Langganan Telepon	1.878.258.325	1.870.511.779	7.746.546
Beban Langganan Air	1.621.778.178	1.537.805.129	83.973.049
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	38.841.800	37.983.800	858.000
Beban Jasa Konsultan	1.443.946.000	5.785.893.000	(4.341.947.000)
Beban Sewa	10.790.243.800	12.706.265.161	(1.916.021.361)
Beban Jasa Profesi	8.487.789.900	8.485.494.900	2.295.000
Beban Jasa Lainnya	48.202.143.771	50.360.471.126	(2.158.327.355)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	2.967.714.098	0	2.967.714.098
Jumlah	980.719.011.337	991.842.357.107	(11.123.345.770)

Rincian perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Saldo Belanja Barang Jasa - LRA	991.842.357.107
Penambah :	
Setoran tunai ke Kas Negara atas kelebihan pencairan belanja keperluan perkantoran 2018	40.000
Setoran tunai ke Kas Negara atas kelebihan pencairan belanja honor output kegiatan 2018	69.945.000
Pengakuan beban keperluan perkantoran atas belanja barang dibayar dimuka 2018	1.854.000
Pengakuan beban listrik atas belanja barang dibayar dimuka 2018	50.109.394
Pengakuan beban sewa atas belanja barang dibayar dimuka 2018	2.868.855.343
koreksi atas penyesuaian berupa kelebihan setor uang persediaan TA 2019	7.007.746
Setoran piutang lainnya atas kelebihan pembayaran belanja honor output kegiatan 2018	1.452.500
Setoran piutang lainnya atas kelebihan pembayaran belanja jasa profesi 2018	2.295.000
Belanja modal peralatan mesin menghasilkan aset ekstrakomtabel	2.967.714.098
Beban modal lainnya menghasilkan barang habis pakai	47.047.000
Saldo belanja barang yg masih harus dibayar atas kekurangan pembayaran belanja keperluan perkantoran 2019	567.489.822
Saldo belanja barang yg masih harus dibayar atas kekurangan pembayaran belanja pengiriman surat dinas pos 2019	12.161.963
Saldo belanja barang yg masih harus dibayar atas kekurangan pembayaran belanja honor output kegiatan 2019	25.941.000
Saldo belanja barang yg masih harus dibayar atas kekurangan pembayaran belanja barang non operasional lainnya 2019	64.000
Saldo belanja barang yg masih harus dibayar atas belanja langganan daya dan jasa 2019	2.241.693.279

Saldo Belanja Barang Jasa - LRA		991.842.357.107
Saldo belanja barang yg masih harus dibayar atas kekurangan pembayaran belanja jasa lainnya 2019	308.339.200	
Pengesahan hibah langsung jasa 2019	4.385.742.948	
Penyesuaian atas beban keperluan perkantoran 2018-2019	60.046.085	
Penyesuaian atas pelunasan belanja langganan daya dan jasa 2018	33.681.200	
Penyesuaian atas beban jasa konsultan 2019	500	
Beban pemeliharaan Gedung Bangunan utk keperluan perkantoran	1.540.000	
Jumlah Penambah	13.653.020.078	
Pengurang :		
Saldo kas lainnya bendahara pengeluaran atas kelebihan pencairan belanja keperluan perkantoran 2019 (uang lembur)	113.029.750	
Saldo kas lainnya bendahara pengeluaran atas kelebihan pencairan belanja honor output kegiatan 2019	18.015.800	
Saldo belanja barang dibayar dimuka atas belanja keperluan perkantoran 2019	2.540.219	
Saldo belanja barang dibayar dimuka atas belanja langganan daya dan jasa 2019	51.832.831	
Saldo belanja barang dibayar dimuka atas belanja jasa lainnya 2019	310.025.126	
Saldo belanja barang dibayar dimuka atas belanja sewa 2019	4.731.190.104	
Saldo piutang lainnya atas kelebihan pembayaran belanja keperluan perkantoran 2019	78.343.266	
Saldo piutang lainnya atas kelebihan pembayaran belanja bahan 2019	1.146.000	
Saldo piutang lainnya atas kelebihan pembayaran belanja honor output kegiatan 2019	6.739.400	
Saldo piutang lainnya atas kelebihan pembayaran tagihan listrik 2019	70.000	
Saldo piutang lainnya atas kelebihan pembayaran belanja jasa konsultan 2019	2.158.365.000	
Saldo piutang lainnya atas kelebihan pembayaran belanja jasa lainnya 2019	290.169.000	
Beban bahan menghasilkan barang persediaan	415.056.950	
Beban bahan menghasilkan peralatan mesin	21.905.300	
Beban jasa lainnya menghasilkan Peralatan Mesin	1.100.000	
Beban jasa lainnya menghasilkan Gedung Bangunan	38.280.000	
Pelunasan belanja yg masih harus dibayar atas kekurangan pembayaran belanja keperluan perkantoran 2018	852.500	
Pelunasan belanja yg masih harus dibayar atas belanja langganan daya dan jasa 2018	3.663.981	
Pelunasan belanja barang yg masih harus dibayar atas kekurangan pembayaran belanja keperluan perkantoran 2018	4.848.033.329	
Pelunasan belanja barang yg masih harus dibayar atas kekurangan pembayaran belanja pengiriman surat dinas pos 2018	15.853.355	
Pelunasan belanja barang yg masih harus dibayar atas kekurangan pembayaran belanja barang operasional lainnya 2018	231.300	
Pelunasan belanja barang yg masih harus dibayar atas kekurangan pembayaran belanja bahan 2018	947.044.100	
Pelunasan belanja barang yg masih harus dibayar atas kekurangan pembayaran belanja honor output kegiatan 2018	345.245.000	
Pelunasan belanja barang yg masih harus dibayar atas kekurangan pembayaran belanja barang non operasional lainnya 2018	3.017.050	
Pelunasan belanja barang yg masih harus dibayar atas tagihan langganan daya dan jasa 2018	1.848.700.558	
Pelunasan belanja barang yg masih harus dibayar atas tagihan jasa konsultan 2018	2.183.582.500	
Pelunasan belanja barang yg masih harus dibayar atas tagihan sewa 2018	53.686.600	
Pelunasan belanja barang yg masih harus dibayar atas kekurangan pembayaran jasa lainnya 2018	6.210.195.377	
Penyesuaian atas beban keperluan perkantoran 2018-2019	60.074.176	
koreksi atas jurnal koreksi utang belanja langganan telepon TA 2018 yang seharusnya dibayarkan pada TA 2019	824.402	
Penyesuaian atas beban honor output kegiatan 2019	14.895.000	
Penyesuaian atas pelunasan tagihan listrik 2018	2.657.874	
Jumlah Pengurang	24.776.365.848	
Total Tambah/(Kurang)	(11.123.345.770)	
Saldo Beban Barang Jasa - LO		980.719.011.337

Beban Pemeliharaan
Rp126.060.861.368

D.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap atau aset lainnya yang dimiliki oleh entitas pelaporan agar tetap berada dalam kondisi normal. Saldo Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp126.060.861.368 dan Rp121.725.089.564.

Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 68
Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	NAIK (TURUN) %
(1)	(2)	(3)	(4)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34.023.368.007	29.894.315.692	13,81
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	132.415.575	351.922.385	(62,37)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	89.848.048.846	88.743.444.774	1,24
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1.993.272.940	2.667.662.133	(25,28)
Beban Persediaan suku cadang	0	400.000	(100,00)
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	63.756.000	67.344.580	(5,33)
Jumlah	126.060.861.368	121.725.089.564	3,56

Adapun perbandingan antara saldo Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional dengan Belanja Pemeliharaan pada LRA Belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 69
Perbandingan Beban Pemeliharaan LO dan LRA 31 Desember 2019

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34.023.368.007	34.111.479.806	(88.111.799)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	132.415.575	132.415.575	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	89.848.048.846	91.087.916.725	(1.239.867.879)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1.993.272.940	0	1.993.272.940
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	63.756.000	0	63.756.000
Jumlah	126.060.861.368	125.331.812.106	729.049.262

Rincian perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut,

Saldo Belanja Pemeliharaan - LRA		125.331.812.106
Penambah :		
Pemakaian persediaan bahan utk pemeliharaan	1.922.458.639	
Hasil opname fisik (kurang) persediaan bahan utk pemeliharaan	71.976.901	
Belanja barang persediaan utk pemeliharaan peralatan mesin	37.419.760	
Belanja modal Peralatan Mesin menghasilkan aset ekstrakomptabel	16.250.000	
Belanja modal Gedung Bangunan menghasilkan aset ekstrakomptabel	442.794.000	
Belanja modal Gedung Bangunan menghasilkan aset ekstrakomptabel	47.506.000	

Saldo belanja barang yg masih harus dibayar atas kekurangan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan mesin 2019	24.206.344	
Jumlah Penambah	2.562.611.644	
Pengurang :		
Saldo kas lainnya bendahara pengeluaran atas kelebihan pencairan belanja pemeliharaan peralatan mesin 2019	84.710	
Saldo piutang lainnya atas kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan mesin 2019	312.338.148	
Hasil opname fisik (tambah) persediaan bahan utk pemeliharaan	1.162.600	
Belanja pemeliharaan Gedung Bangunan menghasilkan Peralatan Mesin	36.215.781	
Pelunasan belanja barang yg masih harus dibayar atas kekurangan pembayaran belanja pemeliharaan Gedung Bangunan 2018	398.247.520	
Pelunasan belanja barang yg masih harus dibayar atas kekurangan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan mesin 2018	1.082.782.623	
Penyesuaian belanja pemeliharaan peralatan mesin 2019	1.191.000	
Belanja pemeliharaan Gedung Bangunan utk keperluan perkantoran	1.540.000	
Jumlah Pengurang	1.833.562.382	
Total Tambah/(Kurang)	729.049.262	
Saldo Beban Pemeliharaan - LO		126.060.861.368

Beban Perjalanan Dinas
Rp976.912.193.264

D.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban untuk mencatat penyelenggaraan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan jabatan. Saldo Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp976.912.193.264 dan Rp918.996.284.417. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 70
Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	NAIK (TURUN) %
(1)	(2)	(3)	(4)
Beban Perjalanan Biasa	151.690.420.545	135.106.158.698	12,27
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	203.003.260.990	223.976.645.967	(9,36)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	431.604.890.936	366.076.126.848	17,90
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	185.774.132.099	188.636.717.926	(1,52)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	745.943.184	3.076.925.388	(75,76)
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	4.093.545.510	2.123.709.590	92,75
Jumlah	976.912.193.264	918.996.284.417	6,30

Adapun perbandingan antara saldo Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional dengan Belanja Perjalanan Dinas pada LRA Belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 71
Perbandingan Beban Perjalanan Dinas LO dan LRA 31 Desember 2019

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Beban Perjalanan Biasa	151.690.420.545	151.915.581.814	(225.161.269)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	203.003.260.990	202.992.840.990	10.420.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	431.604.890.936	431.740.575.386	(135.684.450)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	185.774.132.099	185.828.627.099	(54.495.000)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	745.943.184	774.018.184	(28.075.000)

Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	4.093.545.510	4.093.545.510	0
Jumlah	976.912.193.264	977.345.188.983	(432.995.719)

Rincian perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Saldo Belanja Perjalanan Dinas - LRA		977.345.188.983
Penambah :		
Setoran kas lainnya bendahara pengeluaran atas kelebihan pencairan belanja perjadi dalam kota 2018	6.960.000	
Setoran kas lainnya bendahara pengeluaran atas kelebihan pencairan belanja perjadi paket meeting dalam kota 2018-2019	235.228.140	
Setoran piutang lainnya atas kelebihan pembayaran belanja perjalanan biasa 2018	13.849.513	
Setoran piutang lainnya atas kelebihan pembayaran belanja perjadi dalam kota 2018	1.440.000	
Setoran piutang lainnya atas kelebihan pembayaran perjadi paket meeting dalam kota 2018	150.000	
Setoran piutang lainnya atas kelebihan pembayaran belanja perjadi paket meeting luar kota 2018	1.290.000	
Saldo belanja barang yg masih harus dibayar atas kekurangan pembayaran belanja perjalanan biasa 2019	51.996.580	
Saldo belanja barang yg masih harus dibayar atas kekurangan pembayaran belanja perjadi dalam kota 2019	27.360.000	
Penyesuaian belanja perjalanan biasa 2019	635.000	
Jumlah Penambah	338.909.233	
Pengurang :		
Saldo kas lainnya bendahara pengeluaran atas kelebihan pencairan belanja perjalanan biasa 2019	12.185.500	
Saldo kas lainnya bendahara pengeluaran atas kelebihan pencairan belanja perjadi dalam kota 2019	4.710.000	
Saldo kas lainnya bendahara pengeluaran atas kelebihan pencairan belanja perjadi paket meeting dalam kota 2019	233.848.140	
Saldo kas lainnya bendahara pengeluaran atas kelebihan pencairan belanja perjadi paket meeting luar kota 2019	7.170.000	
Saldo piutang lainnya atas kelebihan pembayaran belanja perjalanan biasa 2019	10.458.945	
Saldo piutang lainnya atas kelebihan pembayaran belanja perjadi dalam kota 2019	5.440.000	
Saldo piutang lainnya atas kelebihan pembayaran belanja perjadi paket meeting dalam kota 2019	21.534.450	
Saldo piutang lainnya atas kelebihan pembayaran belanja perjadi paket meeting luar kota 2019	4.470.000	
Pelunasan belanja barang yg masih harus dibayar atas kekurangan pembayaran belanja perjalanan biasa 2018	228.520.645	
Pelunasan belanja barang yg masih harus dibayar atas kekurangan pembayaran belanja perjadi dalam kota 2018	15.130.000	
Pelunasan belanja barang yg masih harus dibayar atas kekurangan pembayaran belanja perjadi paket meeting dalam kota 2018	115.680.000	
Pelunasan belanja barang yg masih harus dibayar atas kekurangan pembayaran belanja perjadi paket meeting luar kota 2018	44.145.000	
Pelunasan belanja barang yg masih harus dibayar atas kekurangan pembayaran belanja perjalanan biasa luar negeri 2018	28.075.000	
Penyesuaian belanja perjalanan biasa 2019	40.477.272	
Penyesuaian belanja perjadi dalam kota 2019	60.000	
Jumlah Pengurang	771.904.952	
Total Tambah/(Kurang)		(432.995.719)
Saldo Beban Perjalanan Dinas - LO		976.912.193.264

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp333.568.291.808

D.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi atas Aset Tak Berwujud. Saldo Beban Penyusutan dan

Amortisasi pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp333.568.291.808 dan Rp298.563.302.224. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 72
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	NAIK (TURUN) %
(1)	(2)	(3)	(4)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	195.024.653.471	199.392.574.420	(2,19)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	61.292.111.423	41.420.685.249	47,97
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	58.535.428	29.267.714	100,00
Beban Amortisasi Software	42.326.179.412	22.453.675.713	88,50
Beban Amortisasi Lisensi	34.032.842.846	34.058.798.371	(0,08)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	196.875	306.004.798	(99,94)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	833.772.353	902.295.959	(7,59)
Jumlah	333.568.291.808	298.563.302.224	11,72

Rincian transaksi dari Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

No	Transaksi Penyusutan & Amortisasi	Jenis Aset	Nilai
1	Penyusutan/amortisasi reguler semesteran	- Peralatan mesin - Gedung dan bangunan - Aset tetap lainnya - Software - Lisensi - Aset tak berwujud tidak digunakan dalam operasional	194.944.491.663 66.761.655.818 58.535.428 42.465.912.656 34.032.842.846 196.875
2	Penyusutan/amortisasi reguler (BMN yang dihentikan)	- Aset Tetap tidak digunakan dalam operasional	826.659.613
3	Saldo Awal	- Gedung dan Bangunan	4.720.577
4	Pembelian	- Peralatan mesin - Gedung dan bangunan	94.077.904 2.270.000
5	Hibah masuk	- Peralatan mesin	10.181.633
6	Penyelesaian pembangunan dengan KDP	- Gedung dan bangunan	1.378.900
7	Reklasifikasi masuk	- Peralatan mesin - Gedung dan bangunan	58.786.226 58.649.474
8	Perolehan hasil tindak lanjut normalisasi	- Peralatan mesin - Gedung dan bangunan	80.668.086 41.477.119
9	Koreksi pencatatan nilai/kuantitas	- Gedung dan bangunan	(1.045.317)
10	Transaksi normalisasi BMN	- Peralatan mesin - Gedung dan bangunan - Software	(101.793.910) (1.442.154.450) (321.847.041)
11	Koreksi Penyusutan	- Gedung dan bangunan	(3.879.392.695)
12	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	- Aset Tetap tidak digunakan dalam operasional	7.112.740
13	Reklasifikasi keluar	- Peralatan mesin - Gedung dan bangunan	(61.758.131) (255.448.003)
14	Jurnal <i>Take Out-Take In</i> Revaluasi BMN	- Software	182.113.797
Saldo Beban Penyusutan & Amortisasi - LO			333.568.291.808

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
minus Rp193.729.803

D.2.7 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang jangka pendek maupun piutang jangka panjang dalam suatu periode pelaporan. Saldo Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar minus Rp193.729.803 dan minus Rp211.604.416. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 73
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	NAIK (TURUN) %
(1)	(2)	(3)	(4)
Beban Penyisihan Piutang PNB	(9.102.192)	(27.529.146)	(66,94)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	42.184.012	3.552.916	1.087,31
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	(18.537.458.814)	18.330.000.346	(201,13)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - TP/TGR	18.310.647.191	(18.517.628.532)	(198,88)
Jumlah	(193.729.803)	(211.604.416)	(8,45)

D.3 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL

Pendapatan
Pelepasan Aset Non
Lancar
Rp15.083.462.087

D.3.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Saldo Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing Rp15.083.462.087 dan Rp9.036.996.861. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar berasal dari hasil pelepasan aset non lancar berupa Barang Milik Negara (BMN) melalui proses pemindahtanganan aset. Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 74
Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	NAIK (TURUN) %
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	23.992.000	32.654.000	(26,53)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	7.834.386.951	3.994.390.268	96,13
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	7.225.083.136	5.009.952.593	44,21
Jumlah	15.083.462.087	9.036.996.861	66,91

Adapun perbandingan antara saldo Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada Laporan Operasional dengan LRA-PNB adalah sebagai berikut:

Tabel 75
Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar LO dan LRA 31 Desember 2019

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	23.992.000	23.992.000	0
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	7.834.386.951	7.834.386.951	0
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	7.225.083.136	7.225.083.136	0
Jumlah	15.083.462.087	15.083.462.087	0

Beban Pelepasan
Aset Non Lancar
Rp17.272.849.657

D.3.2 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Saldo Beban Pelepasan Aset Non Lancar pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp17.272.849.657 dan Rp23.505.523.265. Beban tersebut berasal dari nilai Beban Kerugian Pelepasan Aset yang memperhitungkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku ketika terjadi proses pelepasan aset.

Tabel 76
Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	NAIK (TURUN) %
(1)	(2)	(3)	(4)
Beban Kerugian Pelepasan Aset	17.272.849.657	23.505.523.265	(26,52)
Jumlah	17.272.849.657	23.505.523.265	(26,52)

Rincian transaksi dari Beban Kerugian Pelepasan Aset adalah sebagai berikut.

No	Transaksi Pelepasan Aset	Jenis Aset	Nilai
1	Penghapusan Lainnya (Barang Konsumsi)	Persediaan	46.390.532
2	Hibah Keluar	Tanah	1.226.291.000
3	Hibah Keluar (BMN yang dihentikan)	Aset Tetap tidak digunakan dalam operasional	675.262.552
4	Penghapusan	Peralatan Mesin Gedung dan Bangunan Aset Tetap Renovasi Aset Tetap Lainnya	0 1.048.714.834 18.810.000 6.106.000
5	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	Aset Tetap tidak digunakan dalam operasional Aset Tak Berwujud tidak digunakan dalam operasional	4.517.541.223 0
6	Penghapusan/Penghentian KDP	KDP	488.243.000
7	Usulan Barang Hilang ke Pengelola	Peralatan Mesin	24.165.659
8	Usulan Barang Hilang ke Pengelola (BMN yang dihentikan)	Aset Tetap tidak digunakan dalam operasional	25.922.700
9	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	Peralatan Mesin	0
10	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN yang dihentikan)	Aset Tetap tidak digunakan dalam operasional Aset Tak Berwujud tidak digunakan dalam operasional	6.645.768.849 1.716.416.992
11	Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi	Gedung dan Bangunan	833.216.316
12	Jurnal Take Out - Take In Revaluasi BMN	Aset Tetap TDOP Akum Penyusutan Aset Tetap TDOP	0 0
Saldo Beban Kerugian Pelepasan Aset - LO			17.272.849.657

Pendapatan Dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp 11.851.942.987

D.4 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL LAINNYA

D.4.1 Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Saldo Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp 11.851.942.987 dan Rp 5.082.584.639. Pendapatan ini berasal dari transaksi pendapatan yang tidak secara langsung berkaitan dengan tugas dan fungsi utama dari BPS. Rincian Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 77
Rincian Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	NAIK (TURUN) %
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	6.377.215.679	1.087.740.509	486,28
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	288.829.946	458.377.432	(36,99)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	2.679.785.595	1.348.997.140	98,65
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	422.892.962	40.028.838	956,47
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	289.257.604	61.203.357	372,62
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	1.793.961.201	2.086.237.363	(14,01)
Jumlah	11.851.942.987	5.082.584.639	133,19

Adapun perbandingan antara saldo Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Laporan Operasional dengan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 78
Perbandingan Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya LO dan LRA 31 Desember 2019

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	6.377.215.679	920.945.314	5.456.270.365
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	288.829.946	704.738.443	(415.908.497)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	2.679.785.595	3.277.421.382	(597.635.787)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	422.892.962	656.451.970	(233.559.008)
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	289.257.604	289.257.604	0
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	1.793.961.201	0	1.793.961.201
Jumlah	11.851.942.987	5.848.814.713	6.003.128.274

Rincian perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut.

Saldo Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya - LRA		5.848.814.713
Penambah :		
Saldo piutang lainnya atas kelebihan pembayaran belanja pegawai TAYL (pelunasan diangsur dgn potong gaji)	103.116.626	
Penyesuaian penyisihan piutang atas penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	57.000	
Koreksi tambah persediaan barang konsumsi (M99)	60.899.630	
Koreksi otomatis persediaan barang konsumsi (KO)	1.680.655.917	
Koreksi otomatis persediaan bahan utk pemeliharaan (KO)	52.405.654	
Pembentukan dan penyesuaian saldo Piutang TGR 2019	11.709.456.108	
Jumlah Penambah	13.606.590.935	
Pengurang :		
Setoran kas lainnya bendahara pengeluaran atas kelebihan pencairan belanja pegawai TAYL (uang makan & uang lembur 2018)	306.138.600	
Setoran kas lainnya bendahara pengeluaran atas kelebihan pencairan belanja barang TAYL	447.630.558	
Setoran kas lainnya bendahara penerimaan atas kelebihan pembayaran belanja barang TAYL	95.000	
Setoran piutang lainnya atas kelebihan pembayaran belanja pegawai TAYL (gaji & tunjangan 2018)	212.943.523	
Setoran piutang lainnya atas kelebihan pembayaran belanja barang TAYL	149.910.229	
Penyesuaian nilai aset tetap atas penerimaan kembali belanja modal TAYL (koreksi nilai non revaluasi)	68.559.008	
Setoran piutang lainnya atas kelebihan pembayaran belanja modal TAYL	165.000.000	
Pembentukan dan penyesuaian saldo Piutang TGR 2019	6.253.185.743	
Jumlah Pengurang	7.603.462.661	
Total Tambah/(Kurang)	6.003.128.274	
Saldo Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		11.851.942.987

Beban Dari Kegiatan
Non Operasional
Lainnya Rp
1.284.852.265

D.4.2 Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Saldo Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp 1.284.852.265 dan Rp1.782.585.217. Beban ini merupakan beban yang muncul karena adanya penyesuaian atas nilai dan kondisi barang persediaan. Rincian Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 79
Rincian Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	NAIK (TURUN) %
(1)	(2)	(3)	(4)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	898.964.417	1.310.052.327	(31,38)
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	385.887.848	472.532.890	(18,34)
Jumlah	1.284.852.265	1.782.585.217	(27,92)

Rincian transaksi dari Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya sebagai berikut.

No	Transaksi Non Operasional Lainnya	Jenis Aset	Nilai
1	Koreksi Otomatis Persediaan	- Barang konsumsi - Bahan untuk pemeliharaan - Persediaan untuk tujuan strategis	535.424.043 26.277.851 14.500
2	Koreksi kurang persediaan	- Barang konsumsi - Bahan untuk pemeliharaan	277.713.873 60.529.150

3	Penyesuaian pengembalian belanja persediaan	- Persediaan belum diregister	(995.000)
4	Persediaan usang	- Barang konsumsi - Bahan untuk pemeliharaan	375.569.035 5.600.826
5	Persediaan rusak	- Barang konsumsi	4.717.987
Saldo Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO			1.284.852.265

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp2.946.911.855.967

E.1 EKUITAS AWAL

Saldo Ekuitas Awal tanggal 1 Januari 2019 dan 1 Januari 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.946.911.855.967 dan Rp2.943.466.512.741.

Defisit LO
Rp4.555.714.218.416

E.2 SURPLUS (DEFISIT) LO

Saldo Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.555.714.218.416 dan Rp4.312.193.691.051. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional dan surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa pada Laporan Operasional. Rincian Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 disajikan pada Laporan Operasional.

E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH /MENGURANGI EKUITAS

Jumlah Koreksi yang menambah /mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.380.341.935.242 dan Rp10.238.625.339. Rincian saldo koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas adalah sebagai berikut:

Tabel 80
Rincian Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

No.	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koreksi Nilai Persediaan	216.948.956	727.362.820
2	Koreksi Atas Reklasifikasi	(14.973.308.104)	0
3	Selisih Revaluasi Aset	2.352.598.330.233	0
4	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	42.628.383.247	9.647.500.477
5	Lain-lain	(128.419.090)	(136.237.958)
Jumlah		2.380.341.935.242	10.238.625.339

*Koreksi Nilai
Persediaan*
Rp216.948.956

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Saldo Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp216.948.956 dan Rp727.362.820. Saldo Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan nilai koreksi atas persediaan berupa persediaan yang perolehannya pada tahun anggaran yang lalu dan dibukukan pada tahun anggaran yang berjalan. Perolehan persediaan ini melalui pembelian, transfer masuk, hibah langsung, rampasan, perolehan lainnya, maupun reklasifikasi masuk. Saldo Koreksi Nilai Persediaan yang tercatat di Laporan Perubahan Ekuitas merupakan nilai koreksi persediaan barang konsumsi yang perolehannya tahun anggaran yang lalu dan dibukukan pada tahun anggaran berjalan.

Saldo Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp216.948.956 terdapat pada satker Settama.

Koreksi Atas
Reklasifikasi minus
Rp14.973.308.104

E.3.2 Koreksi Atas Reklasifikasi

Saldo Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar minus Rp14.973.308.104 dan Rp0. Saldo Koreksi Atas Reklasifikasi pada Laporan Perubahan Ekuitas mencerminkan nilai atas reklasifikasi yang terjadi pada Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya SIMAK-BMN periode tahun berjalan. Sesuai dengan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), salah satu transaksi yang mungkin terjadi atas suatu BMN adalah reklasifikasi. Reklasifikasi masuk merupakan transaksi pencatatan BMN yang sebelumnya dicatat dengan klasifikasi BMN lain. Sedangkan reklasifikasi keluar merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus suatu BMN, sebelum dicatat kembali ke dalam klasifikasi BMN yang baru.

Penjelasan dengan menggunakan perhitungan mutasi transaksi saldo Koreksi Atas Reklasifikasi diuraikan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

Reklasifikasi Masuk	:	Bahan untuk Pemeliharaan	Rp	67.500	
	:	Barang Konsumsi	Rp	1.590.540	
	:	Aset Tetap Lainnya	Rp	3.296.724.947	
	:	Gedung dan Bangunan	Rp	25.012.493.637	
	:	Peralatan dan Mesin	Rp	8.053.444.646	
	:	Software	Rp	47.775.000	
	:	Tanah	Rp	5.826.060.000	
Reklasifikasi Keluar	:	Akumulasi Amortisasi Software	Rp	164.065	
	:	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	432.483.690	
	:	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	2.732.096.155	
Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	:	Gedung dan Bangunan	Rp	509.848.000	
Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	:	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	198.485.695	
Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225	:	Tanah	Rp	48.475.000	
Revaluasi Aset (<i>Take In</i>)	:	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	2.757.185	
	:	Gedung dan Bangunan	Rp	19.676.808	
Jumlah Mutasi Tambah:					Rp 46.182.142.868

Mutasi Kurang

Reklasifikasi Masuk	:	Akumulasi Amortisasi Software	(Rp	5.971.875)
	:	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(Rp	544.123.257)
	:	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(Rp	3.394.457.986)
Reklasifikasi Keluar	:	Barang Konsumsi	(Rp	12.464.700)
	:	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	(Rp	135.000)
	:	Aset Tetap Lainnya	(Rp	14.835.634)
	:	Gedung dan Bangunan	(Rp	25.885.611.869)
	:	Peralatan dan Mesin	(Rp	6.433.899.660)
	:	Software	(Rp	47.775.000)
	:	Tanah	(Rp	5.826.060.000)
Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	:	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(Rp	131.176.314)

Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	: Gedung dan Bangunan	(Rp	288.542.000)	
Koreksi Reklasifikasi Keluar Akibat Koreksi Penilaian Kembali	: Gedung dan Bangunan	(Rp	40.431.000)	
Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225	: Tanah	(Rp	222.000)	
	: Gedung dan Bangunan	(Rp	18.441.402.000)	
Koreksi Reklasifikasi Keluar Akibat Koreksi Penilaian Kembali	: Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(Rp	65.908.684)	
Revaluasi Aset (<i>Take In</i>)	: Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(Rp	2.757.185)	
	: Gedung dan Bangunan	(Rp	19.676.808)	
Jumlah Mutasi Kurang:				(Rp 61.155.450.972)
Saldo Koreksi Atas Reklasifikasi				(Rp 14.973.308.104)

Selisih Revaluasi Aset Rp2.352.598.330.233 **E.3.3 Selisih Revaluasi Aset**

Saldo Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.352.598.330.233 dan Rp0. Saldo Selisih Revaluasi Aset dijelaskan melalui perhitungan mutasi transaksi berikut ini:

<u>Mutasi Tambah</u>				
Koreksi BMN ditemukan Kembali	: Gedung dan Bangunan	Rp	125.519.569	
Koreksi Kesalahan input IP	: Tanah	Rp	60.151.254.945	
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	: Gedung dan Bangunan	Rp	235.224.508	
Koreksi Penilaian Kembali BMN	: Gedung dan Bangunan	Rp	192.215.314	
	: Tanah	Rp	45.382.000	
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	: Gedung dan Bangunan	Rp	2.938.997.281	
Koreksi BMN ditemukan Kembali	: Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	28.364.419	
Koreksi Penilaian Kembali BMN	: Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	131.176.314	
Revaluasi Aset (<i>Take In</i>)	: Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	294.441.967.768	
	: Tanah	Rp	2.181.358.329.140	
Jumlah Mutasi Tambah				Rp 2.539.648.431.258
<u>Mutasi Kurang</u>				
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	: Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(Rp	157.798.225)	
	: Gedung dan Bangunan	(Rp	208.553.225)	
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	: Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(Rp	2.655.517.533)	
	: Gedung dan Bangunan	(Rp	2.045.561.171)	
	: Tanah	(Rp	3.767.250.000)	
Koreksi Kesalahan input IP	: Gedung dan Bangunan	(Rp	13.634.529.533)	
Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	: Gedung dan Bangunan	(Rp	168.080.173)	
Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi	: Tanah	(Rp	15.017.000)	
Revaluasi Aset (<i>Take In</i>)	: Gedung dan Bangunan	(Rp	164.397.794.165)	
Jumlah Mutasi Kurang				(Rp 187.050.101.025)
Saldo 31 Desember 2019 Revaluasi Aset Tetap				Rp 2.352.598.330.233

Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp42.628.383.247

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Saldo Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp42.628.383.247 dan Rp9.647.500.477. Saldo Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi atas catatan dan koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang dilakukan selain karena revaluasi nilai.

Saldo Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada Laporan Perubahan Ekuitas mencerminkan nilai atas reklasifikasi dan pengurangan nilai aset yang terjadi pada nilai SIMAK-BMN periode tahun berjalan.

- Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp40.757.091.547. Penjelasan dengan menggunakan perhitungan mutasi transaksi Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah :

Saldo Awal	:	Aset Tetap Lainnya	Rp	12.803.370
		Gedung dan Bangunan	Rp	565.357.000
		Peralatan dan Mesin	Rp	1.640.284.460
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	:	Gedung dan Bangunan	Rp	3.163.723.000
		Peralatan dan Mesin	Rp	1.536.899.155
		Tanah	Rp	648.391.000
Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	:	Gedung dan Bangunan	Rp	690.626.000
Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	:	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Rp	45.728.666
Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	:	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	59.266.442
Transaksi Normalisasi BMN	:	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	1.355.498.741
		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	908.097.064
Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	:	Gedung dan Bangunan	Rp	4.835.773.000
Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi	:	Gedung dan Bangunan	Rp	18.048.939.730
Koreksi Nilai barang Berlebih	:	Gedung dan Bangunan	Rp	14.481.281.570
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	:	Tanah	Rp	1.384.811.000
		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	80.637.449
		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	1.052.997.518
Koreksi Pencatatan	:	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	1.402.049.658
		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	27.125.184
Koreksi Penyusutan Karena 225	:	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	19.917.979.261
Penghapusan semu karena reklasifikasi dari intra ke ekstra/ sebaliknya	:	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	44.551
Revaluasi (<i>Take In</i>)	:	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Rp	14.062.486
		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	3.213.761.255
		Gedung dan Bangunan	Rp	26.323.893.441
		Tanah	Rp	17.706.395.500
Pengembalian belanja modal gedung bangunan tahun Berjalan	:	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	Rp	28.680.135

Pengembalian belanja modal gedung bangunan TAYL	: Gedung dan Bangunan	Rp	68.559.008	
Jumlah Mutasi Tambah				Rp 119.213.665.644
<u>Mutasi Kurang</u>				
Saldo Awal	: Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(Rp	100.449.981)	
	: Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(Rp	1.100.656.068)	
Hibah (Masuk)	: Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(Rp	10.181.633)	
Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi	: Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(Rp	104.473.797)	
	: Tanah	(Rp	93.635.000)	
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	: Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(Rp	643.847.738)	
	: Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(Rp	1.439.929.897)	
Koreksi Nilai barang Berlebih	: Tanah	(Rp	66.537.000)	
Koreksi Nilai KDP	: Konstruksi Dalam pengerjaan	(Rp	5.155.661)	
Koreksi Pencatatan	: Gedung dan Bangunan	(Rp	7.119.185.707)	
	: Peralatan dan Mesin	(Rp	484.403.844)	
	: Tanah	(Rp	491.550.000)	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	: Aset Tetap Lainnya	(Rp	30.939.384)	
	: Gedung dan Bangunan	(Rp	217.432.364)	
	: Peralatan dan Mesin	(Rp	1.065.427.219)	
Penghapusan semu karena reklasifikasi dari intra ke ekstra/ sebaliknya	: Peralatan dan Mesin	(Rp	445.509)	
Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	: Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(Rp	45.816.146)	
Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	: Gedung dan Bangunan	(Rp	353.342.000)	
Transaksi Normalisasi BMN	: Gedung dan Bangunan	(Rp	2.950.640.200)	
	: Peralatan dan Mesin	(Rp	942.809.816)	
	: Tanah	(Rp	648.391.000)	
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	: Aset Tetap Lainnya	(Rp	814.753)	
Revaluasi (<i>Take In</i>)	: Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(Rp	150.546.783)	
	: Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(Rp	43.472.296.839)	
	: Gedung dan Bangunan	(Rp	8.371.926.508)	
	: Tanah	(Rp	8.545.739.250)	
Jumlah Mutasi Kurang				(Rp 78.456.574.097)
Saldo 31 Desember 2019 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi				Rp 40.757.091.547

- Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi sebesar Rp1.871.291.700. Penjelasan dengan menggunakan perhitungan mutasi transaksi Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

<u>Mutasi Tambah</u>			
Saldo Awal	: Software	Rp	497.175.000
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	: Software	Rp	110.907.054
Transaksi Normalisasi BMN	: Akum. Amortisasi Software	Rp	429.268.690
Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	: Akum. Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	Rp	51.832.000

	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Rp	119.105.521	
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	: Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	Rp	1.716.416.992	
Koreksi atas Beban Amortisasi atas Software yang dilakukan Normalisasi	: Beban Amortisasi Software	Rp	182.113.797	
Jumlah Mutasi Tambah				Rp 3.106.819.054
Mutasi Kurang				
Saldo Awal	: Akumulasi Amortisasi Software	(Rp	62.146.875)	
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	: Akumulasi Amortisasi Software	(Rp	110.907.054)	
Koreksi Pencatatan	: Software	(Rp	497.175.000)	
Transaksi Normalisasi BMN	: Software	(Rp	420.559.439)	
Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	: Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	(Rp	25.916.000)	
	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(Rp	118.822.986)	
Jumlah Mutasi Kurang				(Rp 1.235.527.354)
Saldo 31 Desember 2019 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi				Rp 1.871.291.700

Koreksi Lain-Lain
Minus
Rp128.419.090

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Saldo Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah minus Rp128.419.090 dan minus Rp136.237.958. Saldo Koreksi Lain-Lain merupakan akun yang digunakan untuk mengkoreksi kesalahan pencatatan atas transaksi kas, piutang, dan utang pada periode berjalan. Saldo Koreksi Lain-Lain terbentuk akibat jurnal penyesuaian yang dicatat pada periode tahun berjalan.

Transaksi Antar
Entitas
Rp4.923.152.161.093

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Saldo Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.923.152.161.093 dan Rp4.305.400.408.938. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih Entitas yang berbeda baik dalam internal satker BPS, antar BPS dengan Kementerian Lain, maupun antar BPS dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 81
Rincian Saldo Transaksi Antar Entitas

No.	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ditagihkan Ke Entitas Lain	4.965.698.076.336	4.350.801.397.603
2	Diterima Dari Entitas Lain	(68.079.488.123)	(49.507.886.815)
3	Transfer Keluar	(132.072.685.368)	(143.171.234.877)
4	Transfer Masuk	132.379.004.368	138.384.772.105
5	Pengesahan Hibah Langsung	25.332.318.747	7.912.002.655
6	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(360.457.876)	(590.344.533)
7	Pengesahan Hibah Langsung TAYL	255.393.009	1.571.702.800
	Jumlah	4.923.152.161.093	4.305.400.408.938

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Saldo Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019, adalah masing-masing sebesar Rp68.079.488.123 dan Rp4.965.698.076.336. Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan Transaksi Antar Entitas atas pendapatan dan belanja pada BPS yang melibatkan Kas Negara (BUN).

Saldo Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 82
Rincian Diterima dari Entitas Lain dan Ditagihkan ke Entitas Lain

No.	Uraian	Diterima dari Entitas Lain (DDEL) (Rp)	Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	68.079.488.123	0
Jumlah		68.079.488.123	0
2	Belanja		
	- Belanja Pegawai	0	2.134.590.486.821
	- Belanja Barang	0	2.200.051.068.346
	- Belanja Modal	0	639.681.998.613
Jumlah		0	4.974.323.553.780

Nilai Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp4.965.698.076.336 jika dibandingkan dengan nilai rincian realisasi belanja sebagai pembentuk nilai Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp4.974.323.553.780 maka terdapat selisih sebesar Rp8.625.477.444. Selisih tersebut berasal dari:

- Realisasi Hibah Langsung Dalam Negeri sebesar Rp2.670.479.500.
- Realisasi Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp5.954.997.944.

E.4.2 Transfer Masuk dan Transfer Keluar

Saldo Transfer Masuk dan Transfer Keluar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019, adalah masing-masing sebesar Rp132.379.004.368 dan Rp132.072.685.368. Transfer Masuk dan Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu Entitas ke Entitas lain pada internal satker BPS, antara BPS dengan Kementerian Negara/Lembaga, dan antara BPS dengan BUN. Saldo Transfer Masuk/Transfer Keluar diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 83
Rincian Transfer Masuk dan Transfer Keluar

Kode Akun	Uraian	Transfer Masuk (Rp)	Transfer Keluar (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
117111	Barang Konsumsi	13.654.010.693	(13.654.010.693)	0
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	192.500	(192.500)	0
131111	Tanah	1.751.547.000	(1.751.547.000)	0
132111	Peralatan dan Mesin	132.685.473.452	(131.006.425.212)	1.679.048.240
133111	Gedung dan Bangunan	646.681.000	(340.362.000)	306.319.000
135121	Aset Tetap Lainnya	18.793.800	(18.793.800)	0

Kode Akun	Uraian	Transfer Masuk (Rp)	Transfer Keluar (Rp)	Selisih (Rp)
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(19.356.128.358)	17.677.080.118	(1.679.048.240)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(45.381.600)	45.381.600	0
162151	Software	3.168.150.000	(3.168.150.000)	0
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(144.334.119)	144.334.119	0
Jumlah		132.379.004.368	(132.072.685.368)	306.319.000

Selisih Nilai Transfer Masuk dan Transfer Keluar untuk periode 31 Desember 2019 sebesar Rp306.319.000. Nilai selisih tersebut terinci sebagai berikut:

1.	Transfer Masuk atas Peralatan dan Mesin dari Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Pertanian, Kementerian Pertanian kepada Badan Pusat Statistik pada satker Settama.	Rp	1.679.048.240
2.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin yang terbentuk pada transaksi Transfer Masuk Pusdatin Pertanian kepada Badan Pusat Statistik.	(Rp)	1.679.048.240)
3.	Transfer Masuk atas Gedung dan Bangunan berupa Rumah Dinas dari BPS Provinsi Kalimantan Selatan kepada BPS Kota Banjarmasin.	Rp	306.319.000
Jumlah		Rp	306.319.000

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung

Saldo Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp25.332.318.747. Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung pada BPS tahun berjalan dalam bentuk uang/kas, barang, maupun jasa. Sedangkan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Saldo Pengesahan Hibah Langsung diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 84
Rincian Pengesahan Hibah Langsung

No.	Wilayah/Satker	Jenis Hibah	Nilai (Rp)	Hibah Dari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	Uang	3.001.217.005	UNFPA
		Uang	3.340.648.836	UNICEF
		Jasa	506.352.330	UNFPA
		Jasa	3.879.390.618	PROSPERA
2	Prov. DKI Jakarta	Uang	2.820.390.000	Pemda Prov. DKI
3	Kab. Aceh Besar	Tanah	273.315.000	Pemda Kab. Aceh Besar
4	Kab. Pidie Jaya	Tanah	53.752.000	Bapak Khalil Alwajir
5	Kab. Batanghari	Barang	223.700.000	Pemda Kab. Batang Hari
6	Prov. Sumatera Selatan	Gedung dan Bangunan	50.000.000	Pemda Prov. Sumatera Selatan
7	Prov. Kalimantan Barat	Tanah	10.592.321.000	Pemda Prov. Kalimantan Barat
8	Kab. Tanah Toraja	Tanah	42.150.000	Pemda Kab. Tana Toraja
		Gedung dan Bangunan	148.633.827	Pemda Kab. Tana Toraja
9	Kab. Mandailing Natal	Tanah	153.651.096	Pemda Kab. Mandailing Natal
10	Kab. Tebo	Tanah	33.207.035	Pemda Kab. Tebo
11	Kab. Kepulauan Talaud	Tanah	213.590.000	Pemda Kab. Kepulauan Talaud
Jumlah			25.332.318.747	

E.4.4 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Saldo Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp360.457.876. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung yang telah dilakukan pengesahan. Saldo Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung per 31 Desember 2019 berasal dari satker Settama yang merupakan pengembalian dana hibah ke donor. Saldo Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 85
Rincian Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

No.	Wilayah/Satker	Donor	Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Settama	ADB	6.753.929
		UNFPA	1.621.550
		UNICEF	201.606.335
		UNFPA	565.562
2	Prov.DKI Jakarta	Pemda Prov.DKI	149.910.500
Jumlah			360.457.876

E.4.5 Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)

Saldo Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp255.393.009. Pengesahan Hibah Langsung TAYL merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung pada BPS dalam bentuk kas, barang, maupun jasa atas hibah yang diterima pada tahun 2018 dan/atau tahun-tahun sebelumnya, namun belum dilakukan pengajuan nomor register dan/atau pengesahan hibah di tahun 2019. Saldo Pengesahan Hibah Langsung TAYL diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 86
Rincian Pengesahan Hibah Langsung TAYL

No.	Wilayah/Satker	Jenis Aset	Nilai Hibah (Rp)	Hibah Dari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Labuhan Batu Selatan	Barang	142.542.857	Pemda Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2	Kab. Lombok Barat	Tanah	29.400.000	Pemda Kabupaten Lombok Barat
3	Kab. Muaro Jambi	Tanah	63.450.152	Pemda Kabupaten Muaro Jambi
4	Kab. Balangan	Tanah	20.000.000	Pemda Provinsi Kalimantan Selatan
Jumlah			255.393.009	

Ekuitas Akhir
Rp5.694.691.733.886

E.5 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp5.694.691.733.886 dan Rp2.946.911.855.967.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Daftar temuan dan monitoring penyelesaian tindak lanjut dilampirkan sebagaimana format terlampir.

F.2 REVISI DIPA

1. Selama periode tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, BPS melakukan perubahan pagu sebanyak 7 (tujuh) kali melalui Direktorat Jenderal Anggaran. Nilai pagu dalam DIPA awal sebesar Rp5.211.787.965.000 dan setelah dilakukan revisi menjadi sebesar Rp5.247.071.532.000 dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Revisi DIPA I terdapat pada 5 (lima) Satuan Kerja yaitu Sekretariat Utama BPS, BPS Provinsi Kalimantan Utara, BPS Provinsi DKI Jakarta, BPS Provinsi Sumatera Utara, dan BPS Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2019. Nilai pagu awal yang sebelumnya sebesar Rp5.211.787.965.000 berubah menjadi sebesar Rp5.218.862.685.000, sehingga mengalami penambahan pagu sebesar Rp7.074.720.000. Perubahan nilai pagu disebabkan oleh:
 - Penambahan pagu berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari kontrak/kerja sama pada Satker Sekretariat Utama BPS.
 - Pergeseran pagu belanja pegawai untuk memenuhi kekurangan belanja pegawai pada Satker BPS Provinsi Kalimantan Utara.
 - Realokasi pagu dari Satker Sekretariat Utama BPS ke beberapa satker, diantaranya yaitu ke Satker BPS Provinsi DKI Jakarta untuk kegiatan Survei Statistik Harga (2895.020) sebesar Rp399.900.000, BPS Provinsi Sumatera Utara untuk kegiatan Survei Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (2895.006) sebesar Rp194.538.000, BPS Provinsi Sulawesi Selatan untuk kegiatan Survei Statistik Hortikultura dan Perkebunan (2895.028) sebesar Rp406.012.000.
 - b. Revisi DIPA II terdapat pada 516 satker, kecuali Politeknik Statistika STIS, yang telah ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2019. Nilai pagu yang sebelumnya sebesar Rp5.218.862.685.000 berubah menjadi sebesar Rp5.222.937.034.000 sehingga mengalami penambahan pagu sebesar Rp4.074.349.000. Perubahan nilai pagu disebabkan oleh:
 - Penambahan pagu berupa PNBP yang berasal dari kontrak/kerja sama pada Satker Sekretariat Utama BPS, BPS Kabupaten Bekasi, dan BPS Kabupaten Badung.
 - Penghapusan blokir pagu dalam halaman IV.A. DIPA terkait pemberian ijin pembangunan gedung kantor pada satker – satker di BPS pada tahun anggaran 2019 berdasarkan Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia nomor 0121/Seskab/Polhukam/03/2019 tanggal 29 Maret 2019.

- Perubahan dalam halaman IV.B. DIPA terkait usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang berupa perubahan *volume* pengadaan pada beberapa satker.
 - Pergeseran pagu dalam 1 (satu) program yang sama yang digunakan dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun 2018.
 - Pergeseran pagu dalam 1 (satu) program yang sama pada Program DMPTTL, PSPA, dan PPIS.
- c. Revisi DIPA III terdapat pada 514 satker (kecuali BPS Kabupaten Sorong, BPS Kabupaten Kepulauan Seribu, dan BPS Kabupaten Halmahera Timur) yang telah ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2019. Nilai pagu sebelumnya sebesar Rp5.222.937.034.000 berubah menjadi sebesar Rp5.231.409.334.000 sehingga mengalami penambahan pagu sebesar Rp8.472.300.000. Perubahan pagu disebabkan oleh:
- Penambahan pagu berupa PNBPN yang berasal dari kontrak/kerja sama pada Satker Sekretariat Utama BPS dan BPS Kabupaten Bekasi.
 - Pergeseran pagu untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai.
 - Penghapusan blokir atas pagu dalam halaman IV.A DIPA pada Satker BPS Kabupaten Maluku Barat Daya untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai.
 - Pergeseran pagu pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS yang berasal dari sisa hasil pengadaan/optimalisasi yang digunakan untuk kebutuhan yang mendesak/prioritas pada beberapa satker.
- d. Revisi DIPA IV terdapat pada 37 satker terdiri dari 3 satker BPS di Pusat, 34 Satker BPS Provinsi, BPS Kabupaten Bangka, dan BPS Kabupaten Bangka Tengah yang telah ditetapkan pada tanggal 29 Agustus 2019. Nilai pagu sebelumnya sebesar Rp5.231.409.334.000 berubah menjadi sebesar Rp5.236.797.585.000, sehingga mengalami penambahan pagu sebesar Rp5.388.251.000. Perubahan pagu disebabkan oleh:
- Penambahan pagu berupa PNBPN yang berasal dari kontrak/kerja sama satker Sekretariat Utama BPS sebesar Rp4.672.114.000 BPS Kabupaten Bangka sebesar Rp473.168.000 dan BPS Kabupaten Bangka Tengah sebesar Rp242.999.000.
 - Pergeseran pagu antar satker yang terkait instrumen Sensus Penduduk 2020 (SP2020) dari keluaran Sensus Penduduk daerah ke pusat sebesar Rp12.585.913.000.
 - Pergeseran pagu antar belanja dari belanja modal (53) ke belanja barang (52) pada kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (2905) keluaran Publikasi/Laporan Sensus Penduduk (006) sebesar Rp19.854.510.000.
- e. Revisi DIPA V terdapat pada seluruh satker (517 satker) yang telah ditetapkan pada tanggal 26 September 2019. Tidak ada perubahan pada nilai pagu, akan tetapi terdapat beberapa pergeseran pos-pos dalam pagu yang antara lain adalah:

- Pergeseran pagu untuk memenuhi belanja pegawai yaitu berupa penambahan belanja pegawai sebesar Rp110.998.305.000.
 - Pergeseran pagu untuk memenuhi belanja pegawai senilai Rp71.312.745.000 yang berasal dari pagu belanja kegiatan PODES sebesar Rp1.724.003.000, SP2020 sebesar Rp68.116.527.000, Kerangka Sampel Area sebesar Rp427.015.000, *E-Commerce* sebesar Rp185.475.000, dan IRIO sebesar Rp859.725.000.
 - Pergeseran pagu pada Program PSPA yang berasal dari sisa hasil pengadaan/optimalisasi pada 138 satker dengan rincian 46 satker berkurang pagu dan 92 satker bertambah pagu dengan nilai Rp14.665.325.000 di mana 47 satker diantaranya merupakan usulan baru senilai Rp3.258.526.000.
 - Perubahan nomenklatur, target, dan satuan pada indikator *output* program, indikator kinerja kegiatan, indikator keluaran program, indikator sasaran program, dan indikator sasaran strategis pada DIPA Induk BPS.
 - Perubahan pencatatan halaman IV DIPA pada Satker BPS Kota Jakarta Timur, BPS Kota Jakarta Selatan, dan BPS Kota Jakarta Barat.
 - Ralat administrasi terkait perbaikan halaman III DIPA satker dan penyesuaian pejabat pengelola keuangan.
- f. Revisi DIPA VI terdapat pada 136 satker yang telah ditetapkan pada tanggal 11 November 2019. Nilai pagu sebelumnya adalah sebesar Rp5.236.797.585.000 berubah menjadi sebesar Rp5.240.953.417.000 sehingga mengalami penambahan pagu sebesar Rp4.155.832.000. Perubahan pagu ini disebabkan oleh:
- Penambahan pagu sebesar Rp4.155.832.000 yang bersumber dari PNBP sebesar Rp1.069.557.000 dan Hibah Langsung dalam bentuk uang Rp3.086.275.000.
 - Pergeseran pagu dalam rangka pemenuhan belanja pegawai senilai Rp60.530.182.000.
- g. Revisi DIPA VII terdapat pada Satker Sekretariat Utama BPS dan Satker BPS Provinsi DKI Jakarta yang telah ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2019. Nilai pagu sebelumnya sebesar Rp5.240.953.417.000 berubah menjadi sebesar Rp5.247.071.532.000 sehingga mengalami penambahan pagu sebesar Rp6.118.155.000. Perubahan pagu disebabkan oleh:
- Revisi Hibah Langsung Luar Negeri dalam bentuk uang pada Satker Sekretariat Utama BPS sebesar Rp3.297.725.000 untuk kegiatan UNICEF.
 - BPS Provinsi DKI Jakarta Rp2.820.390.000 (HLD-DKI).

F.3 REKENING BPS

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019

tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga bahwa setiap satuan kerja wajib melaporkan pengelolaan rekening setiap semesteran.

Berdasarkan hasil Rekonsiliasi Rekening Milik Satuan Kerja/Lingkup Kementerian Negara/Lembaga antara Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Kementerian Keuangan dengan Badan Pusat Statistik nomor BAR-118/PB.35/2020 tanggal 10 Februari 2020 bahwa seluruh rekening milik BPS yang dipertahankan sampai dengan periode pelaporan keuangan tanggal 31 Desember 2019 sebanyak 656 rekening aktif dari 517 satker (terlampir) yang dirinci sebagai berikut:

- a. Rekening Bendahara Pengeluaran sebanyak 517 buah.
- b. Rekening Bendaharan Penerimaan sebanyak 35 buah.
- c. Rekening Lainnya sebanyak 104 buah.

Masih terdapat perbedaan antara data BPS dengan data rekening yang dimiliki oleh Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan yaitu sebanyak 22 rekening dan akan dilakukan rekonsiliasi kembali di periode berikutnya yaitu pada triwulan I tahun 2020.

Berdasarkan penelusuran lebih lanjut, rekening aktif di BPS per tanggal 31 Desember 2019 sebanyak 678 rekening dari 517 satker (terlampir) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rekening Bendahara Pengeluaran sebanyak 517 buah.
- b. Rekening Bendaharan Penerimaan sebanyak 35 buah.
- c. Rekening Lainnya sebanyak 128 buah.

Daftar rekening aktif serta surat persetujuan pembukaan rekening dapat dilihat dalam lampiran pendukung I.

F.4 KERJA SAMA BPS

Pada periode tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, Badan Pusat Statistik melakukan kerja sama sebanyak 346 kegiatan dalam bentuk Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN), Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN), PNBPN, dan Swakelola dengan nilai kerja sama secara keseluruhan sebesar Rp97.448.495.540 dan realisasi sebesar Rp90.859.955.098 atau 93,24 persen. Rincian jenis dan jumlah kerja sama Badan Pusat Statistik baik dari satker di pusat maupun daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 87
Rekapitulasi Jenis Kerja Sama BPS

Uraian	Jumlah Kerja Sama	Jenis Kerja Sama (Rp)				Jumlah
		Swakelola			Hibah	
		Tipe I	Tipe II	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SESTAMA	22					
Anggaran		2.182.866.000	28.299.543.000	30.482.409.000	10.769.742.948	41.252.151.948
Realisasi		1.713.104.540	25.417.256.119	27.130.360.659	10.340.740.892	37.471.101.551
Saldo		469.761.460	2.882.286.881	3.352.048.341	429.002.056	3.781.050.397
Persentase		78,48	89,82	89,00	96,02	90,83
Pusdiklat BPS	27					
Anggaran		0	6.588.892.000	6.588.892.000	0	6.588.892.000

Uraian	Jumlah Kerja Sama	Jenis Kerja Sama (Rp)				Jumlah
		Swakelola			Hibah	
		Tipe I	Tipe II	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Realisasi		0	6.588.892.000	6.588.892.000	0	6.588.892.000
Saldo		0	0	0	0	0
Persentase		0	100,00	100,00	0	100,00
Jumlah Pusat	49					
Anggaran		2.182.866.000	34.888.435.000	37.071.301.000	10.769.742.948	47.841.043.948
Realisasi		1.713.104.540	22.006.148.119	33.719.252.659	10.340.740.892	44.059.993.551
Saldo		469.761.460	2.882.286.881	3.352.048.341	429.002.056	3.781.050.397
Persentase		78,48	91,74	90,96	96,02	92,10
Daerah	297					
Anggaran		9.085.046.822	23.306.163.803	32.391.210.625	17.216.240.967	49.607.451.592
Realisasi		8.239.953.659	21.493.677.421	29.733.631.080	17.066.330.467	46.799.961.547
Saldo		845.093.163	1.812.486.382	2.657.579.545	149.910.500	2.807.490.045
Persentase		90,70	92,22	91,80	99,13	94,34
Total Pusat & Daerah	346					-
Anggaran		11.267.912.822	58.194.598.803	69.462.511.625	27.985.983.915	97.448.495.540
Realisasi		9.953.058.199	53.499.825.540	63.452.883.739	27.407.071.359	90.859.955.098
Saldo		1.314.854.623	4.694.773.263	6.009.627.886	578.912.556	6.588.540.442
Persentase		88,33	91,93	91,35	97,93	93,24

Anggaran kerja sama Swakelola selama tahun anggaran 2019 sebesar Rp69.462.511.628 dengan realisasi belanja sebesar Rp63.452.883.739 sehingga dari penggunaan anggaran tersebut maka didapat sisa saldo sebesar Rp6.009.627.886. Sisa saldo sebesar Rp6.009.627.886 terdiri dari saldo yang sebesar Rp2.987.418.452 merupakan saldo yang tidak terealisasi dan dana masih di Bendahara Umum Negara (BUN) (kegiatan PNBP), saldo sebesar Rp1.948.029.615 merupakan saldo yang tidak terealisasi dan masih dalam penguasaan Mitra kerja sama karena pencairan dilakukan oleh Mitra kerja sama (kegiatan swakelola Tipe I dan II), saldo sebesar Rp930.815.495 merupakan saldo yang ditransfer ke Mitra kerja sama, saldo sebesar Rp128.014.324 merupakan setoran ke Kas Negara, dan sebesar Rp15.350.000 merupakan SPJ yang dibayarkan pada tahun 2020.

1. Swakelola Tipe I

Kerja sama Swakelola Tipe I yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik bersama dengan mitra kerja sama (Kementerian Negara/Lembaga/Badan/Institusi) selama tahun 2019 memiliki nilai anggaran sebesar Rp11.267.912.822 dan realisasi belanja sebesar Rp9.953.058.199 atau 88,33 persen dari nilai anggarannya.

Kerja sama Swakelola Tipe I yang dilaksanakan pada satker Badan Pusat Statistik di pusat mempunyai anggaran sebesar Rp2.182.866.000 dan realisasi sebesar Rp1.713.104.540 atau 78,48 persen. Kerja sama Swakelola Tipe I yang dilakukan oleh satker Badan Pusat Statistik di daerah mempunyai anggaran sebesar Rp9.085.046.822 dan realisasi sebesar Rp8.239.953.659 atau 90,70 persen. Rincian anggaran dan realisasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 88
Anggaran dan Realisasi Kerja Sama Swakelola Tipe I Tahun 2019

Uraian	Non APBN BPS (Rp)	APBN BPS (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
SESTAMA			
Anggaran	2.182.866.000	0	2.182.866.000
Realisasi	1.713.104.540	0	1.713.104.540
Saldo	469.761.460	0	469.761.460
Persentase	78,48	0	78,48
Jumlah Pusat			
Anggaran	2.182.866.000	0	2.182.866.000
Realisasi	1.713.104.540	0	1.713.104.540
Saldo	469.761.460	0	469.761.460
Persentase	78,48	0	78,48
BPS Daerah			
Anggaran	9.085.046.822	0	9.085.046.822
Realisasi	8.239.953.659	0	8.239.953.659
Saldo	845.093.163	0	845.093.163
Persentase	90,70	0	90,70
Total Pusat & Daerah			
Anggaran	11.267.912.822	0	11.267.912.822
Realisasi	9.953.058.199	0	9.953.058.199
Saldo	1.314.854.623	0	1.314.854.623
Persentase	88,33	0	88,33

2. Swakelola Tipe II

Kerja sama Swakelola Tipe II yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dengan Mitra kerja sama (Kementerian Negara/Lembaga/Badan/Institusi) selama tahun 2019 memiliki nilai anggaran sebesar Rp58.194.598.803 dan realisasi belanja sebesar Rp53.499.825.540 atau 91,93 persen dari nilai anggarannya, terdiri dari Pusat dan Daerah dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 89
Anggaran dan Realisasi Kerja Sama Swakelola Tipe II Tahun 2019

Dalam Rupiah

Uraian	RPL			PNBP			Jumlah
	Non APBN BPS	APBN BPS	Jumlah	Non APBN BPS	APBN BPS	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SESTAMA							
Anggaran	0	0	0	24.820.884.000	3.478.659.000	28.299.543.000	28.299.543.000
Realisasi	0	0	0	21.938.597.119	3.478.659.000	25.417.256.119	25.417.256.119
Saldo	0	0	0	2.882.286.881	0	2.882.286.881	2.882.286.881
Persentase	0	0	0	88,39	100,00	89,82	89,82
Pusdiklat BPS							
Anggaran	0	5.261.025.000	5.261.025.000	1.327.867.000	0	1.327.867.000	6.588.892.000

Uraian	RPL			PNBP			Jumlah
	Non APBN BPS	APBN BPS	Jumlah	Non APBN BPS	APBN BPS	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Realisasi	0	5.261.025.000	5.261.025.000	1.327.867.000	0	1.327.867.000	6.588.892.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Persentase	0	100,00	100,00	100,00	0	100,00	100,00
Jumlah Pusat							
Anggaran	0	5.261.025.000	5.261.025.000	26.148.751.000	3.478.659.000	29.627.410.000	34.888.435.000
Realisasi	0	5.261.025.000	5.261.025.000	23.266.464.119	3.478.659.000	26.745.123.119	32.006.148.119
Saldo	0	0	0	2.882.286.881	0	2.882.286.881	2.882.286.881
Persentase	0	100,00	100,00	88,98	0	90,27	91,74
BPS Daerah							
Anggaran	21.324.803.803	0	21.324.803.803	1.981.360.000	0	1.981.360.000	23.306.163.803
Realisasi	19.617.448.992	0	19.617.448.992	1.876.228.429	0	1.876.228.429	21.493.677.421
Saldo	1.707.354.811	0	1.707.354.811	105.131.571	0	105.131.571	1.812.486.382
Persentase	91,99	0	91,99	94,69	0	94,69	92,22
Total Pusat & Daerah							
Anggaran	21.324.803.803	5.261.025.000	26.585.828.803	28.130.111.000	3.478.659.000	31.608.770.000	58.194.598.803
Realisasi	19.617.448.992	5.261.025.000	24.878.473.992	25.142.692.548	3.478.659.000	28.621.351.548	53.499.825.540
Saldo	1.707.354.811	0	1.707.354.811	2.987.418.452	0	2.987.418.452	4.694.773.263
Persentase	91,99	100,00	93,58	89,38	100,00	90,55	91,93

Kerja sama Swakelola Tipe II menggunakan 2 (dua) mekanisme yaitu dengan cara membuka Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) dan PNBP.

a. Rekening Pemerintah Lainnya (RPL)

Sumber dana kerja sama dengan membuka RPL terdiri dari non APBN BPS dan APBN BPS dengan nilai anggaran sebesar Rp26.585.828.803 dan realisasi sebesar Rp24.878.473.992 atau 93,58 persen.

Kerja sama yang dibiayai oleh Non APBN BPS adalah kerja sama yang sumber pembiayaannya berasal dari mitra kerja sama. Kerja sama jenis ini terdapat pada BPS di daerah yaitu yang melakukan perikatan kerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sekretaris Daerah, dan dinas lainnya. Pagu yang tercatat sebesar Rp21.324.803.803 dan realisasi belanja tercatat sebesar Rp19.617.448.992 atau 91,99 persen.

Sedangkan kerja sama yang dibiayai oleh APBN BPS adalah kerja sama yang sumber pembiayaannya menggunakan pagu dari APBN BPS. Kerja sama ini terdapat pada Satker Pusdiklat BPS berupa kerja sama bidang pendidikan dengan menjalin pihak Perguruan Tinggi/Universitas. Pagu atas kerja sama ini tercatat Rp5.261.025.000 dan realisasi tercatat sebesar Rp5.261.025.000 atau 100 persen.

b. PNBP

Sumber dana kerja sama dengan mekanisme PNBP terdiri dari non APBN BPS dan APBN BPS. Pagu yang tercatat atas kerja sama dengan mekanisme PNBP sebesar Rp31.608.770.000 dan realisasi tercatat sebesar Rp28.621.351.548 atau 90,55 persen.

Kerja sama mekanisme PNBPN yang dibiayai dari Non APBN BPS adalah kerja sama dimana sumber pembiayaan kegiatannya berasal dari mitra kerja sama. Kerja sama jenis ini memiliki pagu tercatat sebesar Rp28.130.111.000 dan realisasi tercatat sebesar Rp25.142.692.548 atau 89,38 persen. Kerja sama ini terdapat di satker-satker di pusat maupun di daerah.

Sedangkan kerja sama mekanisme PNBPN yang dibiayai dari APBN BPS memiliki pagu tercatat sebesar Rp3.478.659.000 dengan realisasi 100 persen atau sebesar Rp3.478.659.000. Kerja sama jenis ini dilakukan oleh Satker Sekretariat Utama BPS dengan BPPT, POLRI, dan Rumah Sakit Gatot Subroto.

3. Hibah

Badan Pusat Statistik menjalin kerja sama dengan pihak lain melalui mekanisme Hibah. Kedudukan Badan Pusat Statistik dalam kerja sama ini adalah sebagai penerima Hibah dari mitra kerja sama, baik berupa uang, barang, dan jasa. Hibah yang diterima oleh Badan Pusat Statistik dicatat sebagai pagu sebesar Rp27.985.983.915 sedangkan realisasinya sebesar Rp27.407.071.359 atau 97,93 persen. Secara rinci realisasi Hibah yang diterima oleh Badan Pusat Statistik dalam bentuk barang sebesar Rp14.395.850.967 dalam bentuk uang sebesar Rp8.625.477.444 dan dalam bentuk jasa sebesar Rp4.385.742.948.

Rincian pagu dan realisasi Hibah dalam bentuk barang, uang, dan jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 90
Anggaran dan Realisasi Kerja Sama Hibah Tahun 2019

Uraian	HIBAH (Rp)			Jumlah (Rp)
	Barang	Uang	Jasa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SESTAMA				
Anggaran	0	6.384.000.000	4.385.742.948	10.769.742.948
Realisasi	0	5.954.997.944	4.385.742.948	10.340.740.892
Saldo	0	429.002.056	0	429.002.056
Persentase	0	93,28	100,00	96,02
Jumlah Pusat				
Anggaran	0	6.384.000.000	4.385.742.948	10.769.742.948
Realisasi	0	5.954.997.944	4.385.742.948	10.340.740.892
Saldo	0	429.002.056	0	429.002.056
Persentase	0	93,28	100,00	96,02
BPS Daerah				
Anggaran	15.780.661.967	2.820.390.000	0	18.601.051.967
Realisasi	15.780.661.967	2.670.479.500	0	18.451.141.467
Saldo	0	149.910.500	0	149.910.500
Persentase	100,00	94,68	0	99,19
TOTAL Pusat & Daerah				
Anggaran	14.395.850.967	9.204.390.000	4.385.742.948	27.985.983.915
Realisasi	14.395.850.967	8.625.477.444	4.385.742.948	27.407.071.359

Saldo	0	578.912.556	0	578.912.556
Persentase	100,00	93,71	100,00	97,93

Penjelasan rincian kerja sama dengan mekanisme Hibah menurut jenisnya adalah sebagai berikut:

Tabel 91
Kerja sama Hibah Menurut Jenisnya Tahun 2019

No	Kegiatan	Nilai (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	% Real	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI (HLLN)						
1	Government of the Republic of Indonesia, BPS Statistics-Indonesia & United Nations Children's Fund (UNICEF)	3.297.725.000	2.954.346.501	343.378.499	89,59	Hibah Uang
2	UNFPA Country Programme for Republic Indonesia, BPS-UNFPA Siklus 9 (2016-2020)	3.086.275.000	3.000.651.443	85.623.557	97,23	Hibah Uang
3	Program Kerja Sama Indonesia Australia untuk Perekonomian (PROSPERA)	3.879.390.618	3.879.390.618	0	100,00	Hibah Jasa
4	Hibah Program UNFPA(Population Dynamics and Data Analysis)	506.352.330	506.352.330	0	100,00	Hibah Jasa
Jumlah HLLN		10.769.742.948	10.340.740.892	429.002.056	96,02	
HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI (HLDN)						
1	Hibah Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Roda Empat Milik Pemerintah Kabupaten Batang Hari	223.700.000	223.700.000	0	100,00	Hibah Barang
2	Hibah Barang Milik Daerah berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tebo	33.207.035	33.207.035	0	100,00	Hibah Barang
3	Hibah Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Rumah Dinas Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	190.783.827	190.783.827	0	100,00	Hibah Barang
4	Hibah Barang Milik Daerah berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talud	213.590.000	213.590.000	0	100,00	Hibah Barang
5	Hibah Barang Milik Daerah berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	29.400.000	29.400.000	0	100,00	Hibah Barang
6	Hibah Barang Milik Daerah berupa Tanah dari Pemda Kabupaten Aceh Besar	273.315.000	273.315.000	0	100,00	Hibah Barang
7	Hibah Barang Milik Negara berupa Tanah dari Pemda Kabupaten Pidie Jaya	53.752.000	53.752.000	0	100,00	Hibah Barang
8	Hibah Barang Milik Negara berupa Tanah dari Pemda Kabupaten Mandailing Natal	153.651.096	153.651.096	0	100,00	Hibah Barang
9	Hibah Barang Milik Negara berupa Kendaraan Roda 4 dari Pemda Kabupaten Labuhan Batu Selatan	142.542.857	142.542.857	0	100,00	Hibah Barang

No	Kegiatan	Nilai (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	% Real	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	Hibah Barang Milik Negara berupa Tanah dari Pemda Kabupaten Balangan	20.000.000	20.000.000	0	100,00	Hibah Barang
11	Hibah Barang Milik Negara berupa Gedung Bangunan dari Pemda Provinsi Sumatera Selatan	50.000.000	50.000.000	0	100,00	Hibah Barang
12	Hibah Barang Milik Negara berupa Tanah dari Pemda Provinsi Kalimantan Barat	10.592.321.000	10.592.321.000	0	100,00	Hibah Barang
13	Hibah Barang Milik Negara berupa Tanah dari Pemda Kabupaten Muaro Jambi	63.450.152	63.450.152	0	100,00	Hibah Barang
HLDN berupa hibah dari Pemerintah Daerah		12.039.712.967	12.039.712.967	0	100,00	
1	Hibah Barang Milik Negara berupa Bangunan Rumah Negara kepada Pemerintah Kabupaten Pati	104.034.000	104.034.000	0	100,00	Hibah Barang
2	Hibah Barang Milik Negara Berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto	458.389.000	458.389.000	0	100,00	Hibah Barang
3	Hibah Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dalam Renovasi kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan	18.810.000	18.810.000	0	100,00	Hibah Barang
4	Hibah Barang Milik Negara berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen kepada Pemerintah Kota Denpasar	445.683.000	445.683.000	0	100,00	Hibah Barang
5	Hibah Barang Milik Negara Berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I kepada Pemerintah Kabupaten Barito Timur	250.716.000	250.716.000	0	100,00	Hibah Barang
6	Hibah Barang Milik Negara Berupa Tanah Rumah Negara Golongan I kepada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	975.575.000	975.575.000	0	100,00	Hibah Barang
7	Hibah Barang Milik Negara berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen kepada Pemerintah Kota Sorong	102.931.000	102.931.000	0	100,00	Hibah Barang
HLDN berupa hibah ke Pemerintah Daerah		2.356.138.000	2.356.138.000	0	100,00	
1	Pemberian Hibah Dalam Bentuk Uang	2.820.390.000	2.670.479.500	149.910.500	94,68	Hibah Uang
HLDN berupa hibah uang		2.820.390.000	2.670.479.500	149.910.500	94,68	
Jumlah HLDN		17.216.240.967	17.066.330.467	149.910.500	99,13	
Jumlah HLLN dan HLDN		27.985.983.915	27.407.071.359	578.912.556	97,93	

Realisasi Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN) sebesar Rp10.340.740.892 dari pagu yang sebesar Rp10.769.742.948 atau 96,02 persen. Sedangkan realisasi Hibah Langsung Dalam Negeri sebesar (HLDN) Rp17.066.330.467 dari pagu yang sebesar Rp17.216.240.967 atau 99,13 persen.

a. Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN)

Hibah Langsung Luar Negeri yang diterima oleh Badan Pusat Statistik berupa Hibah Uang dan Hibah Jasa. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Hibah uang sebesar Rp6.384.000.000 yang sudah disahkan dan masuk ke dalam DIPA BPS melalui mekanisme Revisi DIPA. Pengesahan hibah atas pendapatan sebesar Rp6.341.865.841 dan pengesahan hibah atas belanja sebesar Rp5.954.997.944 sehingga saldo Hibah sebesar Rp386.867.897. Pengesahan pengembalian pendapatan hibah langsung sebesar Rp203.793.447. Dana Hibah dari kegiatan UNICEF sebesar Rp184.696.000 merupakan pembayaran kegiatan BPS Kabupaten Jayapura tahun 2019 dan dibayarkan pada tanggal 15 Januari 2020.
- 2) Hibah Jasa sebesar Rp4.385.742.948 dari kegiatan UNFPA dan PROSPERA dan sudah dilakukan pengesahan pada tanggal 31 Desember 2019.

Tabel 92
Rincian SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS dan Sisa Dana HLLN Tahun 2019

No	Donor	No. Register	Dana Dalam DIPA (Rp)	Saldo Awal Hibah 2019 (Rp)	Pendapatan Hibah s.d 31 Desember 2019 (Rp)	SP2HL/MPHL-BJS (Rp)	SP4HL (Rp)	Saldo Sisa Dana Hibah (Rp)	Penanggung Jawab Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	UNFPA	2AB9MTXA	3.086.275.000	1.621.550	3.001.217.005	3.000.651.443	2.187.112	0	Direktorat Statistik Kependudukan dan Tenaga Kerja
2	UNICEF	2KC5N9AA	3.297.725.000	0	3.340.648.836	2.954.346.501	201.606.335	184.696.000	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
JUMLAH HIBAH UANG			6.384.000.000	1.621.550	6.341.865.841	5.954.997.944	203.793.447	184.696.000	
1	UNFPA	2AB9MTXA	0	0	506.352.330	506.352.330	0	0	Direktorat Statistik Kependudukan dan Tenaga Kerja
2	PROSPERA	23TSV7CA	0	0	3.879.390.618	3.879.390.618	0	0	Direktorat Lisbang Statistik
JUMLAH HIBAH JASA			0	0	4.385.742.948	4.385.742.948	0	0	

Rincian kegiatan Hibah dapat dilihat dibawah ini.

a) United Nations Population Fund (UNFPA) Tahun 2019

- Nomor register 2AB9MTXA.
- Saldo awal Tahun 2019 sebesar Rp1.621.550 sudah dikembalikan ke UNFPA pada tanggal 14 Januari 2019 dan Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung dilakukan pada tanggal 31 Desember 2019 nomor 191400500530001.
- Pendapatan tahun 2019 sebesar Rp3.001.217.005. Pengesahan pendapatan sebesar Rp3.001.217.005 dan pengesahan belanja sebesar Rp3.000.651.443

sesuai Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) nomor 19140000000109 tanggal 31 Desember 2019.

- Saldo sisa dana hibah pada 31 Desember 2019 sebesar Rp565.562 dan sudah dikembalikan ke UNFPA pada tanggal 27 Desember 2019. Pengesahan Pengembalian sebesar Rp565.562 telah disahkan sesuai SP3HL nomor 191400500530002 tanggal 31 Desember 2019.
- Penanggung jawab kegiatan adalah Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.
- Kegiatan kerja sama difokuskan pada Program Dinamika Kependudukan dan Analisis Data yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data kependudukan yang berkualitas dan analisis dan keterkaitannya dengan kebijakan dan program nasional. Kerja sama difokuskan untuk dukungan penyelenggaraan Sensus Penduduk 2020 dan pengembangan Statistik Kebencanaan.
- *Output* berupa dukungan persiapan Sensus Penduduk 2020 dan kajian *big data* melalui pemanfaatan *Mobile Positioning Data* (MPD) untuk Statistik Mobilitas Penduduk.

b) *United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) Tahun 2019*

- Nomor rekening 032901000531304 sesuai izin pembukaan rekening nomor S-699/WPB.12/KP.0630/2016 tanggal 26 April 2016.
- Nomor register 2KC5N9AA.
- Pendapatan tahun 2019 sebesar Rp3.340.648.836. Pengesahan pendapatan sebesar Rp3.340.648.836 dan pengesahan belanja sebesar Rp2.954.346.501 sesuai Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) nomor 19140000000108 tanggal 31 Desember 2019 sehingga saldo sebesar Rp386.302.335.
- Pengembalian ke UNFPA sebesar Rp201.606.335 (5 tahap pengembalian), saldo sebesar Rp184.696.000 untuk pembayaran kegiatan BPS Kabupaten Jayapura tahun 2019 dan dibayarkan pada tanggal 15 Januari 2020.
- Penanggung jawab kegiatan adalah Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.
- a. Digunakan untuk kegiatan pembahasan hasil survei *Child Grant* di Provinsi Aceh, finalisasi dan sosialisasi Indeks Kebahagiaan Anak, gladi bersih Sensus Penduduk 2020 di Kota Makassar dan Kota Surakarta, pembahasan data kebencanaan, dan ujicoba instrumen kualitas pendidikan.
- *Output* berupa Laporan Kegiatan pembahasan hasil survei *Child Grant* di Provinsi Aceh, finalisasi dan sosialisasi Indeks Kebahagiaan Anak, gladi bersih Sensus Penduduk 2020 di Kota Makassar dan Kota Surakarta, pembahasan data kebencanaan, dan uji coba instrumen kualitas pendidikan.

c) *Asian Development Bank (ADB) Tahun 2019*

- Nomor register 72205701.

- Saldo awal sebesar Rp6.753.929 sudah dikembalikan pada tanggal 18 Januari 2019 dengan nomor NTPN 093BC4FQE7OUQ932.
- Penanggung jawab kegiatan adalah Direktorat Statistik Harga.
- Digunakan untuk kegiatan *International Comparison Program (ICP) RDTA 7507* berupa survei dan pengolahan data harga barang/jasa rumah tangga, survei dan pengolahan data harga barang/jasa non rumah tangga, dan perolehan data nilai PDB menurut *basic heading*.
- *Output* berupa data untuk penghitungan *Purchasing Power parity (PPP) of Indonesia*.

d) Hibah Jasa UNFPA Tahun 2019

- Nomor register 2AB9MTXA.
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Jasa untuk kegiatan hibah program UNFPA nomor 444/PDA/12/2019 tanggal 30 Desember 2019 dari *Officer in Charge* UNFPA kepada Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS dengan nilai sebesar Rp506.352.330.
- Pengesahan Hibah dalam bentuk Jasa sebesar Rp506.352.330 nomor 2019019018576002 tanggal 31 Desember 2019.
- Penanggung jawab kegiatan adalah Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.
- Digunakan untuk kegiatan hibah program UNFPA, *output IDN09PDA (Population Dynamics and Data Analysis)*.
- *Output* berupa terlaksananya kegiatan yang dibiayai dari hibah program UNFPA.

e) Hibah Jasa PROSPERA Tahun 2019

- Nomor register 23TSV7CA.
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Jasa untuk kegiatan hibah nomor B-679/BPS/2100/11/2019 tanggal 26 November 2019 dari *Second Secretary, Economic Governance, Departement of Foreign Affairs and trade (DFAT)* kepada Kepala Biro Bina Program BPS dengan nilai sebesar Rp3.879.390.618.
- Pengesahan pendapatan Hibah dalam bentuk Jasa sebesar Rp3.879.390.618 nomor 2019019018576001 tanggal 31 Desember 2019.
- Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Biro Bina Program.
- Digunakan untuk kegiatan *Advisory Activities (AP190)* dan *APS-BPS (Activity)*.
- *Output* berupa terlaksananya kegiatan yang dibiayai dari hibah program PROSPERA.

b. Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN)

Hibah Langsung Dalam Negeri baik BPS sebagai penerima hibah dan sebagai pemberi hibah yang berupa hibah uang dan barang, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp17.216.240.967 dan realisasi sebesar Rp17.066.330.467. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1) BPS sebagai pihak yang menerima hibah barang dari Pemerintah Daerah dengan nilai sebesar Rp12.039.712.967 berupa tanah, gedung bangunan dan kendaraan dinas roda 4. Rincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 93
Rincian Hibah dari Pemerintah Daerah ke BPS

No	Uraian	Mitra	Penanggung Jawab	Nilai (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Roda Empat Milik Pemerintah Kabupaten Batang Hari	Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari	BPS Kabupaten Batang Hari	223.700.000	Kendaraan Dinas Roda Empat merk <i>Mitsubishi Expander</i> Nopol BH 2701 YX
2	Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tebo	Pemerintah Kabupaten Tebo	BPS Kabupaten Tebo	33.207.035	Sebidang tanah seluas 3.000 m ²
3	Hibah Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Rumah Dinas Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja kepada Badan Pusat Statistik	Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	Kepala Badan Pusat Statistik, bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik	190.783.827	Tanah seluas 281 m ² dan Rumah Dinas seluas 126,5 m ²
4	Hibah Barang Milik Daerah berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud kepada Badan Pusat Statistik	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud	Kepala BPS Kepulauan Talaud	213.590.000	Tanah
5	Hibah Barang Milik Daerah berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kepada Badan Pusat Statistik	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat	29.400.000	Tanah seluas 2.100 m ²
6	Hibah Barang Milik Daerah berupa Tanah dari Pemda Kabupaten Aceh Besar	Pemerintah Kabupaten Aceh Besar	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar	273.315.000	Tanah seluas 1.200 m ²
7	Hibah Barang Milik Negara berupa Tanah dari Pemda Kabupaten Pidie Jaya	Khalil Anwar	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya	53.752.000	Hibah Tanah seluas 103 m ²
8	Hibah Barang Milik Negara berupa Tanah dari Pemda Kabupaten Mandailing Natal	Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal	153.651.096	Tanah seluas 1.719 m ²
9	Hibah Barang Milik Negara berupa Kendaraan Roda 4 dari Pemda Kabupaten Labuhan Batu Selatan	Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu Selatan	142.542.857	Kendaraan Dinas merk <i>Avanza</i> 1.3 G M/T

10	Hibah Barang Milik Negara berupa Tanah dari Pemda Kabupaten Balangan	Pemerintah Kabupaten Balangan	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan	20.000.000	Tanah seluas 880 m ²
11	Hibah Barang Milik Negara berupa Gedung Bangunan dari Pemda Provinsi Sumatera Selatan	Ketua Kerohanian BPS Provinsi Sumatera Selatan	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan	50.000.000	Gedung Bangunan Mushola
12	Hibah Barang Milik Negara berupa Tanah dari Pemda Provinsi Kalimantan Barat	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat	10.592.321.000	Tanah seluas 2.258 m ²
13	Hibah Barang Milik Negara berupa Tanah dari Pemda Kabupaten Muaro Jambi	Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi	63.450.152	Tanah
Jumlah				12.039.712.967	

- 2) BPS sebagai pihak yang menghibahkan barang kepada Pemerintah Daerah dengan nilai sebesar Rp2.356.138.000 berupa tanah dan rumah negara, gedung kantor, dan aset tetap dalam renovasi. Rincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 94
Rincian Hibah dari BPS ke Pemerintah Daerah

No	Uraian	Mitra	Penanggung Jawab	Hibah (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Hibah Barang Milik Negara berupa Bangunan Rumah Negara kepada Pemerintah Kabupaten Pati	Pemerintah Kabupaten Pati	Kepala Badan Pusat Statistik selaku Pengguna Barang Badan Pusat Statistik	104.034.000	Bangunan Rumah Negara golongan I tipe C Permanen
2	Hibah Barang Milik Negara berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Kepala Badan Pusat Statistik	458.389.000	Tiga Bangunan Gedung Kantor Permanen dan satu garasi permanen
3	Hibah Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dalam Renovasi kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan	Pemerintah Kabupaten Lamongan	Kepala Badan Pusat Statistik selaku Pengguna Barang Badan Pusat Statistik	18.810.000	Aset Tetap dalam Renovasi atas realisasi belanja modal tahun 2014 terkait penambahan daya listrik gedung kantor
4	Hibah Barang Milik Negara berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen kepada Pemerintah Kota Denpasar	Pemerintah Kota Denpasar	Kepala Badan Pusat Statistik	445.683.000	Bangunan Gedung Kantor Permanen seluas 251 m ²
5	Hibah Barang Milik Negara berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I kepada Pemerintah Kabupaten Barito Timur	Pemerintah Kabupaten Barito Timur	Kepala Badan Pusat Statistik selaku Pengguna Barang Badan Pusat Statistik	250.716.000	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I seluas 842 m ²
6	Hibah Barang Milik Negara berupa Tanah Rumah Negara Golongan I Kabupaten Tana Toraja	Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	Kepala Badan Pusat Statistik bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik	975.575.000	Tanah dan Rumah Negara Golongan I seluas 206 m ²

No	Uraian	Mitra	Penanggung Jawab	Hibah (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Hibah Barang Milik Negara berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen kepada Pemerintah Kota Sorong	Pemerintah Kota Sorong	Kepala Badan Pusat Statistik	102.931.000	Bangunan Gedung Kantor Permanen seluas 90 m ²
Jumlah				2.356.138.000	

- 3) Hibah dalam bentuk uang diterima oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kegiatan Penyusunan Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS), Studi Penyusunan PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, dan Studi Penyusunan Pendapatan Per Kapita, dengan nilai pagu yang disahkan pada DIPA sebesar Rp2.820.390.000 dan realisasi sebesar Rp2.670.479.500 atau 94,68 persen. Dana yang diterima oleh Badan Pusat Statistik dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta sebesar Rp3.115.000.000 pada tanggal 7 Juli 2019, sehingga sisa dana hibah sebesar Rp444.520.500 dikembalikan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019.

Badan Pusat Statistik dalam melakukan pengelolaan kerja sama mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Di Lingkungan Badan Pusat Statistik. Kerja sama dalam bentuk Swakelola, pembiayaan bersumber pada pagu yang tercantum dalam DIPA mitra kerja sama. Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban atas pencatatan realisasi belanja ada pada mitra kerja sama. Dengan demikian maka Badan Pusat Statistik tidak mencatat realisasi belanja pada Laporan Realisasi Anggaran. Namun demikian tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Lampiran Pendukung II pada Laporan Keuangan atas penjelasan rinci kerja sama tersebut.

Rekapitulasi kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) beserta realisasinya terdiri dari satker BPS di Pusat yang meliputi Satker Settama BPS, Satker Politeknik Statistika STIS, dan Satker Pusdiklat BPS, serta satker BPS di daerah yang terdiri dari Satker BPS Provinsi dan Satker BPS Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam Lampiran Pendukung II Laporan Keuangan.

F.5 PAKET PENGADAAN BELANJA MODAL DAN BELANJA BARANG YANG DISELESAIKAN DENGAN MEKANISME PENYELESAIAN BELANJA AKHIR TAHUN

BPS pada tahun 2019 terdapat paket pengadaan pada belanja modal dan belanja barang yang diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian belanja akhir tahun sebanyak 51 kegiatan menggunakan bank garansi sebesar Rp.69.563.470.509 dari nilai pekerjaan Rp118.347.669.628. Rincian pengadaan belanja modal dan belanja barang dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel 95
Rekapitulasi Pengadaan Belanja Modal dan Barang
dengan menggunakan Garansi Bank

Satker/Wilayah	Jenis Belanja			Nilai Bank Garansi	Status Realisasi
	Belanja Modal	Belanja Barang	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sestama	40.018.278.807	60.383.156.002	100.401.434.809	54.034.357.219	selesai
Sestama	6.089.407.500	2.158.365.000	8.247.772.500	8.247.772.500	Putus Kontrak
Jawa Timur	0	176.352.000	176.352.000	176.352.000	selesai
Kalimantan Selatan	0	127.000.000	127.000.000	127.000.000	selesai
Kab. Sorong	4.015.000.000	0	4.015.000.000	1.927.200.000	selesai
Jawa Barat	0	2.186.700.000	2.186.700.000	2.186.700.000	selesai
Jawa Tengah	0	2.607.507.108	2.607.507.108	2.607.570.108	selesai
Kota Batam	0	198.392.000	198.392.000	198.392.000	selesai
Kab. Lombok Timur	387.511.211	0	387.511.211	58.126.682	selesai
Jumlah	50.510.197.518	67.837.472.110	118.347.669.628	69.563.470.509	

Paket pengadaan pada tahun 2019 dengan mekanisme penyelesaian belanja akhir tahun, berdasarkan jenis belanja terdiri dari:

a. Belanja Barang (akun 52)

Paket pengadaan belanja barang sebanyak 34 kegiatan dengan nilai pekerjaan Rp67.837.472.110 dengan menggunakan bank garansi sebesar Rp31.519.914.583.

b. Belanja Modal (akun 53)

Paket pengadaan belanja modal sebanyak 17 kegiatan dengan nilai pekerjaan Rp50.510.197.518 dengan menggunakan bank garansi sebesar Rp38.043.555.926.

Paket pengadaan pada tahun 2019 dengan mekanisme penyelesaian belanja akhir tahun, berdasarkan penyelesaian pekerjaan terdiri dari:

a. Penyelesaian pekerjaan selesai 100 persen

Paket pengadaan yang dapat menyelesaikan pekerjaan sebanyak 47 kegiatan dengan nilai pekerjaan Rp110.099.897.128 dan terdapat 3 (tiga) kegiatan yang terjadi kelebihan bayar, yaitu:

1) Paket Pemeliharaan Perangkat Jaringan Komunikasi Data BPS.

a) Kontrak nomor DMPT2L/2885/15.03.05/K/2019, tanggal 15 Maret 2019 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp2.549.250.000. Jangka waktu pekerjaan dari tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

b) Pekerjaan dinyatakan telah selesai dengan BAST Nomor DMPT2L/2885/31.12.45/BAST/2019 tanggal 31 Desember 2019. Berdasarkan temuan BPK terjadi kelebihan pembayaran yang disebabkan selama tahun 2019 tidak ada perbaikan atau penggantian kabel *fiber optic*, sesuai dengan struktur dan spesifikasi teknis. Biaya tersebut harus dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp58.900.000.

- c) Penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp58.900.000 tanggal 8 Januari 2020, dengan nomor NTPN 7CA6D48VU95I9MLA.
- 2) Paket Pengadaan Koneksi Mediasi Data Wisatawan Nasional atau *Outbound* Berdasarkan *Data Mobile Network Operator*.
 - a) Kontrak nomor PPIS/2908/26.09.03/K/2019 tanggal 26 September 2019 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp2.451.463.740. Jangka waktu pekerjaan dari tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019.
 - b) Pekerjaan dinyatakan telah selesai sesuai BAST Nomor PPIS/2908/20.12.02/BAST/2019 tanggal 20 Desember 2019. Berdasarkan temuan BPK terjadi kelebihan pembayaran berupa realisasi volume koneksi mediasi *roaming data* lebih yang lebih rendah (174 koneksi) dibandingkan dengan *volume* yang ditargetkan di dalam kontrak (201 Koneksi).
 - c) Setoran atas kelebihan pembayaran tersebut telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp290.169.000 (Rp2.451.463.740 - Rp2.161.294.740), pada tanggal 13 Januari 2020 dengan nomor NTPN 1C9C37QLTJFBF1EG.
- 3) Paket Pemeliharaan Perangkat Pendukung DC dan DRC.
 - a) Kontrak nomor DMPT2L/2885/02.05.01/K/2019, tanggal 02 Mei 2019 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp4.593.000.000. Jangka waktu pekerjaan dari tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
 - b) Pekerjaan dinyatakan telah selesai sesuai BAST Nomor DMPT2L.2881/31.12.41/BAST/2019 tanggal 31 Desember 2019. Berdasarkan temuan BPK terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp254.338.260 yang disebabkan biaya penggantian *sparepart* (*reimbursable cost*) lebih kecil realisasinya Rp143.668.250 dibandingkan dengan nilai kontrak untuk biaya *reimbursable cost* yang nilainya sebesar Rp398.006.510.
 - c) Setoran atas kelebihan pembayaran tersebut telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp254.338.260 (Rp398.006.510 - Rp143.668.250), pada tanggal 13 Januari 2020 dengan nomor NTPN 1D7D66U8DOSQQQF.

b. Pemutusan Kontrak Kerja

Paket pengadaan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pada satker Sekretariat Utama sebanyak 4 kegiatan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp8.247.772.500, terdiri dari:

- 1). Paket Jasa Konsultan *Integrated Processing System*.
 - a) Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor: DMPT2L/2881/22.05.01/K/2019 tanggal 22 Mei 2019 antara PPK program DMPT2L dengan PT Electronic Data Interchange Indonesia. Jangka waktu kontrak tanggal 22 Mei s/d 3 Desember 2019 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp2.575.320.000.

- b) KPPN Jakarta II melakukan pembayaran tanggal 20 Desember 2019 nomor SP2D 190191304034336 sebesar Rp2.575.320.000 dengan jaminan garansi bank nomor: G020124, tanggal garansi bank 13 Desember 2019, bank penerbit PT Bank OCBC NISP, Tbk.
 - c) BAST nomor DMPT2L/2881/31.12.53/S/2019 tanggal 31 Desember 2019
 - d) Surat Pemutusan Kontrak nomor: DMPT2L/2881/31.12.53/S/2019 tanggal 31 Desember 2019,
 - e) Surat Penetapan Nilai Pengembalian Kepada Negara (SPNP) nomor: DMPT2L/2881/03.01.03/S/2019 sebesar Rp2.575.320.000.
 - f) Surat Perintah Penyetoran Pengembalian (SP3) nomor: DMPT2L/2881/03.01.03/S/2019 sebesar Rp2.575.320.000.
 - g) Penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp2.575.320.000 tanggal 14 Januari 2019, NTPN 6D7C37QLTJFBBJTU.
- 2). Paket Jasa Konsultan *Data Management System*.
- a) Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor: DMPT2L/2881/21.06.02/K/2019 tanggal 21 Juni 2019 antara PPK program DMPT2L dengan PT Microvac Indonesia. Jangka waktu kontrak tanggal 21 Juni s/d 5 Desember 2019 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp2.158.365.000.
 - b) KPPN Jakarta II melakukan pembayaran tanggal 26 Desember 2019 nomor SP2D 190191302079249 sebesar Rp2.158.365.000 dengan jaminan garansi bank nomor: MBG774027172619N, tanggal garansi bank 16 Desember 2019, bank penerbit PT Bank Mandiri Tbk.
 - c) BAST nomor DMPT2L/2881/31.12.52/S/2019 tanggal 31 Desember 2019.
 - d) Surat Pemutusan Kontrak nomor: DMPT2L/2881/31.12.52/S/2019 tanggal 31 Desember 2019.
 - e) Surat Penetapan Nilai Pengembalian Kepada Negara (SPNP) nomor: DMPT2L/2881/03.01.02/S/2019 sebesar Rp2.158.365.000.
 - f) Surat Perintah Penyetoran Pengembalian (SP3) nomor: DMPT2L/2881/03.01.02/S/2019 sebesar Rp2.158.365.000.
 - g) Penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp2.575.320.000 tanggal 14 Januari 2019, NTPN 099FD8N3DE1V3JDT.
- 3). Paket Jasa Konsultan *Integrated Dissemination System*.
- a) Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor: DMPT2L/2881/24.07.01/K/2019 tanggal 24 Juli 2019 antara PPK program DMPT2L dengan PT Gamatechno Indonesia. Jangka waktu kontrak tanggal 24 Juli s/d 31 Desember 2019 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp1.753.125.000.
 - b) KPPN Jakarta II melakukan pembayaran tanggal 26 Desember 2019 nomor SP2D 190191302079211 sebesar Rp1.753.125.000 dengan

- jaminan garansi bank nomor: MBG774027033419N9N, tanggal garansi bank 12 Desember 2019, bank penerbit PT Bank Mandiri Tbk.
- c) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. B-741/BPS/3330/12/2019, tanggal 9 Desember 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor: B-742/BPS/3330/12/2019, tanggal 9 Desember 2019.
 - d) Surat Pemutusan Kontrak nomor: DMPT2L/2881/23.02.01/S/2020 tanggal 23 Februari 2020.
 - e) Pencairan Bank Garansi sebesar Rp1.753.125.000 disetor ke Kas Negara pada tanggal 9 Januari 2019, NTPN BFG123CIEEJ828VF.
- 4). Paket Jasa Konsultan *Frame and Register System* (FRS).
- a) Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor: DMPT2L/2881/26.06.01/K/2019 tanggal 26 Juni 2019 antara PPK program DMPT2L dengan PT Probindo Artika Jaya. Jangka waktu kontrak tanggal 26 Juni s/d 24 Desember 2019 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp1.760.962.500.
 - b) KPPN Jakarta II melakukan pembayaran tanggal 26 Desember 2019 nomor SP2D 190191301083654 sebesar Rp1.760.962.500 dengan jaminan garansi bank nomor: 03450117190000077, tanggal garansi bank 18 Desember 2019, bank penerbit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
 - c) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor: B-100/BPS/3330/2/2020, tanggal 12 Februari 2020.
 - d) Surat Pemutusan Kontrak nomor: DMPT2L/2881/17.02.01/S/2020 tanggal 17 Februari 2020.
 - e) Pencairan Bank Garansi sebesar Rp1.753.125.000 disetor ke Kas Negara pada tanggal 9 Januari 2019, NTPN 0D0E948VU95VV8EQ.

Bahwa dari 4 (empat) Pengadaan Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa di tahun 2019 yang dinyatakan putus kontrak, PPK yang bersangkutan sedang meminta pendapat dengan berkonsultasi ke LKPP terkait pengenaan sanksinya.

F.6 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik (BPS) per 31 Desember 2019 disusun berdasarkan dari aplikasi *e-rekon&LK* sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-2157/PB/2019 tanggal 31 Desember 2019 perihal Jadwal Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun.
2. Terdapat barang – barang yang awalnya tercatat sebagai Persediaan yang kemudian dikeluarkan dari pencatatan Persediaan yang dikarenakan perubahan kondisi dari kondisi yang persediaan yang baik menjadi barang rusak dan usang. Nilai barang tersebut adalah Rp152.039.236. Masing-masing barang rusak dan usang tersebut dirinci sebagai berikut:
 - a. Barang dengan kondisi usang senilai Rp146.113.105.

- b. Barang dengan kondisi rusak senilai Rp5.926.131.
3. BPS telah menyajikan penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam Laporan Keuangan Tahun 2019 (*Audited*) dengan berpedoman pada surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor S-58/PB/2020 tanggal 24 Januari 2020 perihal Rilis Update SIMAK BMN Versi 19.2 serta Petunjuk dan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 menggunakan Aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA dan surat Sekretaris Utama nomor B-110/BPS/2520/02/2020 tanggal 7 Februari 2020 perihal Penyajian Koreksi Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN dalam Laporan Barang Pengguna Tahun 2019 (*Unaudited*), dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Satker Konsolidasi melakukan jurnal untuk memasukkan kembali (*take in*) hasil IP tahun 2017-2018 beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan yang telah dikeluarkan (*take out*) dari Laporan Keuangan tahun 2018 dan semester I tahun 2019 dengan menggunakan aplikasi SAIBA.
 - b. Setiap satker yang memiliki BMN objek IP melakukan pencatatan perbaikan atau koreksi hasil IP tahun 2017-2018 dalam Laporan Keuangan tahun 2019 *audited* menggunakan aplikasi SIMAK BMN.
4. Rincian Penggolongan Kualitas Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak BPS per 31 Desember 2019 terdapat pada Lampiran Pendukung I Laporan Keuangan.
5. Pada awal tahun anggaran 2020 terjadi bencana nasional berupa Pandemi COVID-19 atau sering disebut virus corona. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi dampak ekonomi yang timbul akibat kebijakan social distancing pada masyarakat. Salah satu kebijakan tersebut adalah mengalokasikan anggaran untuk menangani dampak ekonomi masyarakat melalui pengeluaran belanja untuk bantuan sosial. BPS sebagai bagian dari Pemerintah Pusat juga memberikan sebagian anggaran kegiatan selama tahun 2020 untuk dialokasikan dalam rangka penanganan dampak ekonomi atas pandemi ini. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020, Anggaran Tahun 2020 BPS sebagian dialokasikan untuk penanganan dampak pandemi sebesar Rp3.286.652.768.000, yaitu dari anggaran semula sebesar Rp7.927.750.271.000 menjadi Rp4.641.097.503.000 atau sebesar 41,45 persen dari anggaran semula.
6. Pengalokasian pagu pendapatan dan belanja tahun 2020 BPS untuk penanganan dampak pandemi ini dilakukan dengan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarfungsi, dan/antar program sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
7. Sebagai tindak lanjut dari pengalokasian anggaran untuk penanganan dampak pandemi ini, Kepala BPS menerbitkan surat nomor B-083/BPS/1000/04/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Penghematan Anggaran Tahun 2020. Isi dari surat tersebut menyebutkan bahwa BPS harus melakukan penyesuaian anggaran sebesar Rp3,28 Trilyun. Penghematan anggaran ini dilakukan pada pos belanja barang dan belanja modal pada program DMPTTL dan program PPIS untuk kegiatan SP2020 dan kegiatan non SP2020. Rincian penghematan anggaran untuk program DMPTTL dan PPIS disajikan sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)	SELISIH (Rp)
054.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMP TTL)	2.973.171.471.000	2.850.024.461.000	(123.147.010.000)
2881 Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran	49.748.115.000	11.380.771.000	(38.367.344.000)
2882 Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum	6.083.283.000	3.014.117.000	(3.069.166.000)
2883 Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian	22.176.073.000	16.161.497.000	(6.014.576.000)
2884 Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan	258.044.238.000	248.722.649.000	(9.321.589.000)
2885 Dukungan Manajemen BPS Lainnya	125.174.271.000	115.301.676.000	(9.872.595.000)
2886 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi	2.390.440.098.000	2.352.375.475.000	(38.064.623.000)
2887 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS)	62.579.943.000	53.758.659.000	(8.821.284.000)
2888 Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)	49.869.717.000	45.862.995.000	(4.006.722.000)
4203 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I	2.987.929.000	1.233.227.000	(1.754.702.000)
4204 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II	2.953.034.000	1.104.635.000	(1.848.399.000)
4205 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III	3.114.770.000	1.108.760.000	(2.006.010.000)
054.01.06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	4.954.578.800.000	1.791.073.042.000	(3.163.505.758.000)
2896 Pengembangan dan Analisis Statistik	5.095.928.000	3.255.893.000	(1.840.035.000)
2897 Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik	48.604.596.000	36.603.620.000	(12.000.976.000)
2898 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran	27.169.986.000	20.159.666.000	(7.010.320.000)
2899 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi	62.787.804.000	35.859.184.000	(26.928.620.000)
2900 Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	13.551.639.000	9.642.043.000	(3.909.596.000)
2901 Pengembangan Sistem Informasi Statistik	9.364.551.000	10.269.900.000	905.349.000
2902 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi	20.598.803.000	14.840.413.000	(5.758.390.000)
2903 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga	58.996.696.000	46.300.587.000	(12.696.109.000)
2904 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Peggalian, Energi, dan Konstruksi	61.058.647.000	50.841.841.000	(10.216.806.000)
2905 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	4.146.940.203.000	1.141.892.097.000	(3.005.048.106.000)
2906 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat	243.242.590.000	211.592.074.000	(31.650.516.000)
2907 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial	41.032.867.000	34.153.642.000	(6.879.225.000)
2908 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	66.000.764.000	50.995.177.000	(15.005.587.000)
2909 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	7.792.734.000	5.056.208.000	(2.736.526.000)
2910 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	142.340.992.000	119.610.697.000	(22.730.295.000)
TOTAL	7.927.750.271.000	4.641.097.503.000	(3.286.652.768.000)

8. Rincian penyesuaian anggaran belanja berupa penghematan sebagai respon atas pandemi COVID-19 untuk tahun anggaran 2020 untuk program PPIS terkait kegiatan SP2020 dan kegiatan non SP2020 disajikan sebagai berikut:

PROGRAM/PN/BELANJA	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)	SELISIH (Rp)
054.01.06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik			
NON_PN	682.979.139.000	558.819.999.000	(124.159.140.000)
52	675.209.877.000	551.052.237.000	(124.157.640.000)
53	7.769.262.000	7.767.762.000	(1.500.000)
PN Lainnya	237.109.661.000	184.572.409.000	(52.537.252.000)
52	237.109.661.000	184.572.409.000	(52.537.252.000)
PN SP2020	4.034.490.000.000	1.047.680.634.000	(2.986.809.366.000)
52	3.934.489.983.000	963.177.271.000	(2.971.312.712.000)
53	100.000.017.000	84.503.363.000	(15.496.654.000)
Jumlah	4.954.578.800.000	1.791.073.042.000	(3.163.505.758.000)

Program PPIS dilakukan penyesuaian belanja yang semula Rp4.954.578.800.000 menjadi Rp1.791.073.042.000 atau berkurang sebesar Rp3.163.505.758.000. Penyesuaian pengeluaran belanja untuk kegiatan statistik rutin (Non Prioritas Nasional) yang semula Rp682.679.139.000 menjadi Rp558.819.999.000 atau berkurang sebesar Rp124.159.140.000 dalam rangka penyediaan data indikator strategis. Penyesuaian anggaran belanja ini terdiri dari belanja barang yang berkurang menjadi Rp551.052.237.000 dan belanja modal yang berkurang menjadi Rp7.767.762.000. Sedangkan penyesuaian pengeluaran belanja untuk kegiatan Prioritas Nasional (PN) dilakukan pada komponen PN Lainnya dan PN tentang SP2020, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. PN Lainnya dilakukan penyesuaian anggaran belanja yang semula sebesar Rp237.109.661.000 menjadi Rp184.572.409.000 atau berkurang sebesar Rp52.537.252.000. Penyesuaian ini seluruhnya merupakan belanja barang.
 - b. PN SP2020 dilakukan penyesuaian anggaran belanja yang semula sebesar Rp4.034.490.000.000 menjadi Rp1.047.680.634.000 atau berkurang sebesar Rp2.986.809.366.000. Penyesuaian ini terdiri dari belanja barang yang berkurang menjadi sebesar Rp963.177.271.000 dan belanja modal yang berkurang menjadi sebesar Rp84.503.363.000.
9. Penyusunan Laporan Keuangan BPS Tahun 2019 *audited* sedikit terkendala sebagai akibat kebijakan *Work From Home* (WFH) yang dicanangkan oleh Pemerintah sebagai cara untuk pencegahan penyebaran COVID-19, dimana salah satunya adalah kesepakatan nilai hasil pemeriksaan laporan keuangan antara tiga pihak (tripartit) yaitu BPS, BPK, dan Kementerian Keuangan dilakukan dengan media *online* atau tidak bisa bertatap muka langsung.